



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Praktik Perjanjian Perkawinan di Indonesia

Praktik perjanjian perkawinan di Indonesia banyak dilakukannya oleh pasangan dari perkawinan Campuran, Artis, Pengusaha, Profesi Dokter, notaris, pasangan yang pernah menikah sebelumnya dengan membawa harta & Pejabat. Sedangkan esensi yang diperjanjikan antar pasangan terkait pisah harta. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik perjanjian perkawinan yang terjadi di Indonesia diantaranya:

1. Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial inilah yang selama ini banyak melatarbelakangi praktik perjanjian perkawinan di Indonesia. Stratifikasi sosial adalah sebuah konsep yang menunjukkan adanya pembedaan dan pengelompokan suatu kelompok sosial secara bertingkat. Misalnya: dalam komunitas tersebut ada strata tinggi, strata sedang dan strata rendah. Pembedaan dan pengelompokan ini didasarkan pada adanya suatu simbol-simbol tertentu yang dianggap berharga atau bernilai baik berharga atau bernilai secara sosial, ekonomi, politik, hukum, agama dan budaya maupun dimensi lainnya dalam suatu kelompok sosial.

Simbol-simbol tersebut misalnya, kekayaan, pendidikan, jabatan, kesalehan dalam beragama, dan pekerjaan, dengan kata lain, selama dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu kelompok sosial pasti ada sesuatu yang dianggap berharga atau bernilai, maka selama itu pula akan ada stratifikasi sosial dalam kelompok sosial tersebut. Secara sosiologis jika dilacak ke belakang konsep stratifikasi sosial memang kalah populer dengan istilah kelas sosial, dimana istilah kelas sosial pada awalnya menurut Ralf Dahrendorf menyatakan :

Diperkenalkan pertama kali oleh penguasa Romawi kuno untuk mendapat sebuah otoritas kelas sosial yang dimilikinya atas kelas sosial yang lain, sehingga otoritas tadi menjadi sebuah kekuatan penuh untuk menguasai individu dan kelompok di dalam sebuah sistem struktur sosial¹

Soerjono Soekanto menjelaskan stratifikasi sosial adalah suatu lapisan masyarakat yang di dalamnya terdapat kelas-kelas sosial di mana di dalam setiap masyarakat di manapun selalu dan pasti mempunyai sesuatu yang dihargai dan sesuatu yang dihargai di masyarakat itu bisa berupa kekayaan, ilmu pengetahuan, dan keturunan keluarga terhormat dll.²

Pritim A Sorikin mengatakan stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat (secara hirarkis). Perwujudannya adalah kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah. Dasar dan inti lapisan-lapisan masyarakat adalah tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban, kewajiban dan tanggung jawab, nilai-nilai sosial dan pengaruhnya diantara

¹ Ralf Dahrendorf, *Konflik Dan Konflik Kelas Dalam Masyarakat Industri*, (Jakarta: PT.Rajawali, 1986), hlm. 95-96.

² J.Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2007), hlm.152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota-anggota masyarakat.³

Sedangkan Karl Marx mengatakan Stratifikasi sosial adalah perbedaan kelompok masyarakat kedalam kelas-kelas sosial yang di tentukan oleh adanya 'relasi' mereka terhadap 'alat-alat produksi' yaitu antara kelas atas dan kelas bawah. Kelas atas (*borjois*) adalah kelompok masyarakat yang mempunyai modal kekayaan dan yang mengontrol sumber-sumber kekayaan seperti tanah, bahan baku, mesin-mesin produksi, dan tenaga kerja. Sedangkan kelas bawah (*proletar*) adalah kelompok masyarakat yang tidak mempunyai apa-apa selain tenaga kerja mereka.

Pandangan Karl Marx tentang masyarakat pada hakikatnya sebagai medan konflik; mengingat keterbatasan sumber-sumber kekayaan, maka kelas-kelas yang tidak mempunyai apa-apa menentang kelas atas yang mempunyai sumber-sumber kekayaan. Marx melihatnya dalam proses produksi terjadi sebuah determinisme ekonomi masyarakat kapitalisme dan sering kali terjadi sebuah penindasan terhadap kaum buruh yang tidak sesuai dengan apa yang dikerjakannya sehingga keadaan seperti itu oleh Marx disebut perbuatan yang sangat tidak bermoral.⁴ Sedangkan dasar pelapisan sosial dimasyarakat diantaranya:

- 1) Ukuran kekayaan, Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak, termasuk dalam lapisan teratas. Kekayaan tersebut misalnya: harta benda, mobil, rumah, tanah, dan sebagainya. Pada wilayah ini setiap kelompok masyarakat akan di lihat menempati posisi lapisan paling atas

³ C.Dewi Wulansari, *Sosiologi Konsep Dan Teori*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 101.

⁴ Ibid, hlm.103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila para kelompok ini memiliki sebuah kekayaan yang sangat melimpah di banding dengan kelompok lainnya.

- 2) Ukuran kekuasaan, Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar atas posisi jabatannya dia akan juga menempati posisi lapisan atas. Kekuasaan merupakan sisi lain di luar individu maupun kelompok, kekuasaan biasanya berorientasi pada sebuah kedudukan seseorang dalam menempati sebuah jabatan paling tinggi di masyarakat, semakin tinggi kekuasaan yang dia dapatkan maka semakin tinggi pula penghargaan yang di berikan oleh masyarakat
- 3) Ukuran kehormatan, dan Orang yang paling disegani dan dihormati, mendapat tempat yang teratas, ukuran semacam ini banyak dijumpai pada masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa karena itu ukuran yang di gunakan itu bukanlah seberapa banyak hartanya atau stinggi apa jenjang poendidikannya namun lebih kepada sisi peran-perannya yang baik, sikap dan prilaku sangat bijaksana dan wibawa di masyarakat, dan kerap kali orang yang kaya dan yang miskin akan sama dimata masyarakat yang menggunakan ukuran kehormatan.
- 4) Ukuran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan juga sebagai ukuran dalam menentukan lapisan sosial paling atas, yang dipakai oleh masyarakat untuk menghargai ilmu pengetahuan yang dimilikinya, semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang maka semakin tinggi pula peluang posisi dalam menempati posisi lapisan sosial paling atas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan menggunakan teori diatas prkatik perjanjian perkawinan banyak dilakukan dari stratifikasi sosial menengah ke atas. Perjanjian perkawinan biasanya dilakukan oleh orang kaya, pengusaha, orang berpendidikan, artis dan perkawinan campuran. Ini menandakan bahwa stratifikasi sosial sangat mempengaruhi masyarakat muslim dalam membuat perjanjian perkawinan. Serta bagi masyarakat muslim yang memiliki staratifikasi sosial menengah ke atas perjanjian perkawinan merupakan bentuk pencegahan dan perlindungan harta yang dimiliki dari masing-masing pasangan akibat perceraian. Sedangkan bagi masyarakat muslim yang memiliki strata menengah kebawah praktik perjanjian perkawinan tidak banyak dilakukan dan dianggap kurang etis dalam perkawinan karena dapat menodai kesakralan perkawinan, menimbulkan tidak saling percaya, materialistis dan juga egois karena tujuannya hanya untuk memproteksi aset pribadi

2. Sosial Budaya

Faktor yang melatar belakang perjanjian perkawinan yang selanjutnya adalah sosial budaya kedua pasangan dimana mereka berdomisili. Secara bahasa sosial merupakan sesuatu yang menyangkut aspek hidup masyarakat. Sedangkan budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) di artikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia. Menurut Koentjoroningrat,⁵ budaya berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus di biasakan dengan belajar serta keseluruhan dari hasil budi pekerti. Ada juga yang mengatakan kebudayaan dapat berarti simpanan akumulatif dari pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, pilihan waktu, peranan, relasi ruang, konsep yang luas, dan objek material atau kepemilikan yang di miliki dan di pertahankan oleh sekelompok orang atau suatu generasi.

Budaya adalah sesuatu yang kompleks yang mengandung pengetahuan, kepercayaan seni, moral, hukum, kebiasaan, dan kecakapan lain yang merupakan kebiasaan manusia sebagai anggota komunikasi setempat. Kondisi sosial budaya (adat istiadat) dan kondisi lingkungan (kondisi geografis) berpengaruh terhadap praktik perjanjian perkawinan. Biasaya praktik perjanjian perkawinan banyak dilakukan di kota-kota besar yang memiliki kondisi sosial budaya kompleks. Pengaruh sosial budaya ini dimulai dari keluarga, sahabat, tempat kerja, lingkungan masyarakat dan dengan kewarganegaraan mana dia menikah. Karena perjanjian perkawinan di negara-negara eropa sudah menjadi hal yang biasa bagi pasangan yang akan menikah membuat perjanjian perkawinan. Dengan tujuan untuk perlindungan terhadap harta pribadi yang dibawah sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh selama perkawinan.

⁵ Koentjoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1981), hlm. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sosial Ekonomi

Sosial memiliki artian segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, sedangkan ekonomi memiliki artian ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sosial ekonomi memiliki arti sebagai segala sesuatu hal yang berhubungan dengan tindakan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Keadaan dan kondisi sosial ekonomi setiap orang memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kondisi sosial ekonomi rendah, sedang, dan tinggi.

Sosial ekonomi menurut Soerjono Soekanto⁶ adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam berhubungan dengan sumber daya.

Sosial ekonomi dapat juga diartikan sebagai suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara sosial dan menetapkan seseorang dalam posisi tertentu dalam struktur masyarakat. Pemberian posisi ini disertai pula seperangkat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sipembawa status misalnya, pendapatan, dan pekerjaan. Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan kondisi sosial ekonomi dalam penelitian ini adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kepemilikan aset rumah tangga, dan pemenuhan kebutuhan keluarga. Dengan demikian, keempat hal tersebut

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mempengaruhi tingkat sosial ekonomi masyarakat yang juga menentukan tinggi rendahnya status seseorang dalam masyarakat.

Kondisi sosial ekonomi seseorang di masyarakat berbeda sesuai status dan perannya. Menurut Nasution⁷ tingkat status sosial ekonomi dilihat atau diukur dari pekerjaan orang tua, penghasilan dan kekayaan, tingkat pendidikan orang tua, keadaan rumah dan lokasi, pergaulan dan aktivitas sosial.

Status sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat, status sosial ekonomi adalah gambaran tentang keadaan seseorang atau suatu masyarakat yang ditinjau dari segi sosial dan ekonomi, gambaran itu seperti tingkat pendidikan, pendapatan dan sebagainya. Status ekonomi kemungkinan besar merupakan bentuk gaya hidup keluarga.

Di Indonesia perjanjian perkawinan dilakukan oleh kalangan artis, pengusaha, pejabat, perkawinan campuran dan masyarakat yang memiliki ekonomi menengah atas serta jarang ditemukan praktik perjanjian perkawinan pada masyarakat ekonomi menengah bawah. Ini menunjukkan pengaruh status sosial ekonomi selama ini menjadikan alasan yang utama dalam praktik perjanjian perkawinan di Indonesia. Ini dibuktikan dengan temuan dilapangan, kecenderungan masyarakat melakukan perjanjian perkawinan ketika terjadi perbedaan status sosial ekonomi atau memiliki status ekonomi yang sama. Sedangkan masyarakat yang hanya pada level status ekonomi bahwa kecenderungannya tidak melakukan perjanjian

⁷ Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Bandung: Jemmars, 2004), hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan ketika menikah.

4. Sosial Pendidikan

Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia, aspek rohaniah dan jasmaniah, juga harus berlangsung secara bertahap. Oleh karena itu, suatu kematangan yang bertitik akhir pada optimalisasi perkembangan/pertumbuhan, baru dapat tercapai bilamana berlangsung melalui proses demi proses ke arah tujuan akhir perkembangan atau pertumbuhannya.

Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Oleh karenanya agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masyarakat, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Tanggung jawab tersebut didasari kesadaran bahwa tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh pada kebudayaan suatu daerah, karena bagaimanapun juga, kebudayaan tidak hanya berpangkal dari naluri semata-mata tapi terutama dilahirkan dari proses belajar dalam arti yang sangat luas.

Pengaruh kondisi sosial pendidikan ini memberikan pemahaman terkait pentingnya perjanjian perkawinan. Selama ini praktik perjanjian perkawinan ditemukan pasangan yang memiliki pendidikan tinggi, dengan indikasi temuan dilapangan dari profesi yang digeluti seperti Dokter, Guru, Notaris, pengusaha, dan Pejabat. Sedangkan materi perjanjian yang dibuat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pasangan yang memiliki pemahaman pendidikan lebih detail dalam draf akta perjanjian perkawinan menyangkut masalah pisah harta.

5. Stakeholder

Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai stakeholder jika memiliki karakteristik seperti mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan.⁸ Henriques⁹ (mengemukakan beberapa ruang lingkup stakeholders, yaitu :

- a. Pemerintah (*Governmental*), yaitu pemerintah dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan.
- b. Kelompok masyarakat (*Community*), kelompok masyarakat harus diperhatikan, karena kelompok masyarakat adalah elemen konsumen yang akan mengkonsumsi hasil produksi dari perusahaan.
- c. Organisasi Lingkungan (*Environmental Organization*), dewasa ini telah menjadi salah satu kekuatan kontrol sosial yang dapat mengawasi aktifitas perusahaan. Orientasi organisasi lingkungan secara umum adalah menghindari eksploitasi yang berlebihan terhadap lingkungan hidup demi kepentingan perusahaan (*profit*).

⁸Arif Budimanta, Dkk, *Corporate Social Responsibility Alternatif bagi Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: ICSD, 2008), hlm. 56.

⁹Henriques, dan Sadorsky, *The Relationship Between Environmental Commitment and Managerial Perception of Stakeholder Importance*. Academy of Management Journal, Vol. 42, No. 1, 1999, hlm. 87-89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Media massa (*Mass Media*) dalam lingkungan bisnis saat ini memiliki peran yang sangat dominan dalam membentuk opini masyarakat terhadap suatu aktifitas perusahaan. Media menyediakan informasi bagi perusahaan dan dapat pula sebagai alat publikasi dan sosialisasi yang digunakan oleh perusahaan untuk dapat membangun kepercayaan (*image*) publik tentang aktifitas-aktifitas sosial yang dijalankan perusahaan.

Dari penjelasan diatas stakeholder yang banyak mempengaruhi praktik perjanjian perkawinan seperti dalam teorinya Henriques. Dalam hal ini peran lembaga Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun Kementerian Agama. Perjanjian perkawinan agar memiliki kekuata hukum harus di buat atau dicatatkan di notaris dan disahkan pada lembaga perkawinan dibawah kementrian agama bagi orang Islam.

6. Peran Lembaga Perkawinan

Lembaga perkawinan yang dimaksud disini adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Ini menjadi penting terhadap praktik perjanjian perkawinan dimasyarakat karena memiliki posisi sebagai lembaga pengesahan akta perjanjian perkawinan bagi masyarakat Islam. KUA juga berperan dalam menganalisa terkait materi yang diperjanjian, apakah bertentangan dengan hukum Islam atau tidak. Dengan hasil analisa tersebut perjanjian perkawinan dapat di sahkan. Serta lembaga perkawinan berperan dalam mensosialisasikan kepada setiap pasangan yang akan menikah tentang urgensi perjanjian perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

7. Modernisas

Pada era modernisasi ini perjanjian perkawinan merupakan hal yang penting bagi pasangan untuk menjaga dan melindungi terhadap aset harta yang dimiliki sebelum menikah serta perjanjian perkawinan sebagai salah satu bentuk atau model dalam meminimalkan konflik harta akibat perceraian pada saat ini.

Modernisasi berasal dari kata modern yang berarti terbaru, mutakhir, atau sikap dan cara berpikir yang sesuai dengan tuntutan zaman. Selanjutnya modernisasi diartikan sebagai proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan masa kini.¹⁰ Menurut Nurcholish Madjid, pengertian modernisasi hampir identik dengan pengertian rasionalisasi, yaitu proses perombakan pola berpikir dan tata kerja lama yang tidak rasional dan menggantinya dengan pola berpikir dan tata kerja baru yang rasional. Hal itu dilakukan dengan menggunakan penemuan mutakhir manusia di bidang ilmu pengetahuan.¹¹ Oleh karena itu sesuatu bisa disebut modern kalau ia bersifat rasional, ilmiah, dan kesesuaian hukum-hukum yang berlaku dalam alam. Contoh: sebuah mesin hitung termmodern dibuat dengan rasionalitas yang optimal, menurut penemuan ilmiah yang terbaru, dan karena itu penyesuaiannya dengan alam paling mendekati kesempurnaan.

¹⁰ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)), hlm. 589.

¹¹ Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan, dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Koentjaraningrat, sebagaimana dikutip Faisal Ismail, mendefinisikan modernisasi sebagai suatu usaha secara sadar yang dilakukan oleh suatu bangsa atau negara untuk menyesuaikan diri dengan konstelasi dunia pada suatu kurun tertentu di mana bangsa itu hidup.¹² Sementara itu Harun Nasution juga memberikan pandangannya tentang pembaharuan yang berafiliasi dengan kata modernisasi dengan arti terbaru, mutakhir, atau sikap dan cara berpikir serta bertindak dengan tuntutan zaman. Pembaharuan atau modernisasi yang dimaksud Harun Nasution lebih tepat dikatakan sebagai sebuah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan hidup masa kini. Modern bukan hanya membaharui pahampaham, sikap atau adat istiadat, melainkan lebih luas lagi mencakup pembaharuan institusi-institusi yang dipandang lama untuk disesuaikan dengan pendapat-pendapat dan keadaan-keadaan yang baru.¹³ Pembaharuan atau modernisasi yang dikehendaki Harun Nasution yang diarahkan pada pembaharuan pesantren bermakna, bahwa seharusnya pesantren mengalami perubahan. Tujuannya adalah untuk mencapai perubahan dan penyempurnaan sistem sosial dan lain sebagainya dengan proses yang dilakukan secara mendasar dan sistematis. Pada prinsipnya, hakikat pembaharuan/modernisasi antara lain :

¹²Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press: 1998), hlm. 196.

¹³Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1975), hlm. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- a. Adanya perubahan. Segala sesuatu yang dapat diamati oleh panca indra mengalami perubahan. Perubahan adalah proses yang tidak mungkin dihindari atau dicegah sama sekali.
- b. Pelaksanaan proses perubahan dilakukan secara mendasar, meskipun ada yang tidak mendasar. Jadi ada perubahan mendasar dan tidak mendasar. Namun, perubahan mendasar itu inti dari yang tidak mendasar. Sebab, jika ada perubahan yang sudah sampai pada waktunya, maka perubahan itu tidak luar biasa karena memang telah datang waktunya untuk berubah. Mengarah pada perbaikan. Perubahan yang tidak menuju pada perbaikan hanya akan menimbulkan kerusakan dan anarkisme, sedangkan kerusakan dan anarkisme itu sendiri secara inheren bertentangan dengan ajaran dasar Islam.
- c. Obyeknya jelas. Proses perubahan, disamping dilakukan dengan arah perbaikan yang jelas juga menuntut pada kejelasan aspek-aspek yang ingin dilakukan pada perubahan. Sebab, tanpa kejelasan obyek sasaran, maka pembaharuan yang dilakukan hanya akan menjadi kekecewaan yang sulit untuk diobati.
- d. Terjadinya pada wilayah tertentu. Poin ini menjadi spesifikasi pembaharuan. Wilayah atau tempat berlakunya pembaharuan bisa berada di mana-mana. Pembaharuan pun bisa terjadi pada tempat yang dianggap sangat mustahil. Dalam hal ini bisa diambil contoh dunia pesantren.¹⁴

¹⁴Ainurrofiq, "Pesantren dan Pembaruan : Arah dan Implikasi", dalam Abuddin Nata (ed), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2001), hlm. 152-153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hakikat modernisasi (pembaharuan) di atas pada dasarnya mengajak untuk mengambil perubahan demi menuju perbaikan yang sesuai dengan kapasitas kondisi masyarakat sekitar. Kondisi yang sesuai dengan keadaan zaman dengan tanpa meninggalkan makna kekhasan dan keasliannya. Disinilah praktik perjanjian perkawinan dibuat, karena pengaruh modernisasi dari pasangan yang menikah.

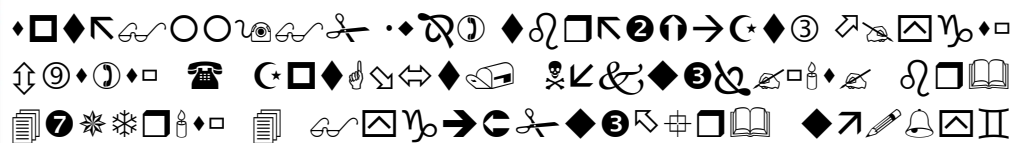
B. Praktik Perjanjian Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

1. Perjanjian Perkawinan dalam hukum Islam

Sebelum membahas tentang perjanjian perkawinan dalam Islam, terlebih dahulu akan dikemukakan konsep syarat dalam akad baik dalam al-Qur'an, hadits maupun pendapat ulama mazhab. Karena perjanjian perkawinan dalam Islam diistilahkan dengan *persyaratan dalam nikah* (*al-Shru@t} fi@ al-nika@h*) sehingga tidak terlepas dari pembahasan mengenai syarat dalam akad.

a. Konsep Dasar Syarat dalam Akad

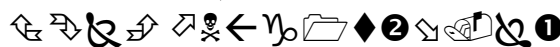
Pengertian syarat secara etimologi adalah *Tanda*, kata jama'nya '*ashra@t}un* seperti '*ashrat} al-sa@'ah* '*Tanda-tanda hari kiamat*', sedangkan lafadz *al-'ishtirat}* adalah tanda yang di jadikan oleh manusia diantara mereka.¹⁵ Seperti firman Allah dalam Q.S Muhammad ayat 18:



¹⁵ Lisa@n al-Arab , Juz 29, Jilid IV, hlm. 2235.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat (yaitu) kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena Sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka Apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila kiamat sudah datang”.¹⁶(Q.S Muhammad: 18)

Dikatakan pula *sharat*}, *yashru@t*}u artinya, apabila seorang perempuan menetapkan suatu perkara kepada calon suaminya di dalam akad nikah, maka dia telah mewajibkan perkara tadi kepada calon suaminya. Menurut Ulama Ahli Bahasa syarat adalah menyusun suatu perkara yang lain menggunakan suatu lafad. Lafadz-lafadz yang digunakan di dalam penyusunan tersebut seperti *in*, *wa min* dan *mahma@*.¹⁷

Adapun pengertian syarat menurut terminologi Ulama *Us}u@l* adalah perkara yang dibutuhkan oleh sesuatu dan dijadikan sebagai syaratnya serta bukan bagian dari esensi sesuatu tersebut.¹⁸ Al-Kafawi@ mengatakan syarat adalah perkara yang dibutuhkan oleh sesuatu tertentu tetapi tidak masuk di dalam bagiannya dan tidak mempengaruhi.¹⁹ Sedangkan Al-Shaukani@ menjelaskan syarat adalah sifat yang jelas dan kuat yang apabila tidak ada menetapkan tidak adanya *mashru@t*, tapi eksistensinya tidak menjamin ada dan tidak adanya *mashru@t*}.²⁰

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 832.

¹⁷ Ali@ Muh}ammad 'Ali@ Qa@sim, *al-Tafri@q Baina al-Zaujaini li 'adami al-Wafa@'i Bi al-shart*}, (Iskandaria: Da@r al-Ja@mi'ah al-Jadi@dah, 2005), hlm. 9.

¹⁸ Muh}amad Kama>l al-di>n Ima>m, *al-Zawa>j fi al-Fiqhi> al-Islami>*, (Iskandaria: Da>r al-Jami'ah al-Jadi>dah, 1998), hlm. 84.

¹⁹ Isma>'i>l A>mi>n Nawa>hid}ah, *al-Ah}wa@l al-Shakhs}iyyah Fiqhi al-Nika@h*, (Jordan: Da@r al- Maisi@r, 2010), hlm. 189.

²⁰ Ibid, *al Tafri@q Baina al-Zaujaini li 'adami*, hlm.10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Ulama fiqih tidak berselisih dalam menjelaskan hakikat syarat. Mereka hanya berusaha mendahulukan *ta'ri@f Ja@mi'Ma@ni'* bagi syarat. Oleh karenanya, terdapat banyak definisi dari Ulama fiqih yang mengarah kepada substansi makna, sebagaimana syarat itu bermacam-macam, ada *sharat} shar'i@* yaitu syarat yang menciptakan *mashru@t}* melalui hukum *shar'i@* seperti syarat-syarat yang menciptakan akad, semisal *mahar* (maskawin) dan wali di dalam akad nikah. Syarat ini adalah syarat yang didahulukan daripada mengadakan akadnya. Adapun macam yang kedua adalah *sharat} Ja'li@*, yaitu syarat yang datang sebagai hal yang baru bagi akad serta mengikuti kehendak dari dua belah pihak yang akad.

Dalam kitab *Us}u@l al-fiqh* karya 'Abd al-Wahha@b Khala@f, syarat terbagi atas dua bagian; *al-shart} al-shar'i}* dan *al-shart} al-ja'li@*. Yang dimaksud dengan *Al-shart} al-shar'i@* adalah syarat yang penetapannya berdasarkan pada hukum *shara'*. Sedangkan *al-shart} al-ja'li@* adalah syarat yang ditetapkan oleh *mukalla@f*.²¹

Adapun Ulama fiqih telah membagi syarat *al-shart} al-ja'li@* menjadi tiga bentuk diantaranya:

1) *Al-Shart} al-Mu'allaq* (digantungkan)

Pada pembahasan ini yang dimaksud menggantungkan syarat, menurut Ulama fiqih adalah menghubungkan sesuatu sebab dengan sebab yang lain. Demikian ini merupakan bentuk dari *sharat} tanji@z* yang akadnya berjalan secara *mut}hlaq*, mengikuti hukum sejak pertama kali dibuat. Taklik

²¹ 'Abd al-Wahha@b Khala@f, *'Ilm Us}u>l al-Fiqh*, hlm. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada biasanya dibentuk dengan salah satu sebab syarat yang menghubungkan antara dua *fi'il*, seperti *in*, *idza@*, *matá*, dan *kullama@*. contoh seorang lelaki berkata kepada seorang perempuan;

تَزَوِّجُكَ إِن بَحَحْتُ فِي الْإِمْتِحَانِ هَذَا الْعَامِ فَتَقُولُ قَبْلْتُ ذَلِكَ

“Aku akan menikahimu bila kamu lulus ujian pada tahun ini. Pihak perempuan menjawab ‘saya terima’”.²²

Ulama fiqih membedakan dua keadaan di dalam hukum penggunaan shigat (taklik) ini: a) Adanya perkara yang *ditaklik* tidak ada pada waktu akad maka keadaan ini akadnya tidak sah, karena menerima atas perkara yang tidak diyakini atau mustahil wujudnya dalam masa akan datang. b) Adanya perkara yang *ditaklik* atas nikah ada pada saat akad. Seperti seorang lelaki berkata kepada seorang perempuan ‘aku akan menikahimu atas mahar sekian’, lalu pihak perempuan menjawab ‘aku terima apabila ayahku rela’. Pada saat itu sang ayah hadir di majlis akad dan menyetujui atas mahar yang dimaksud.²³

2) *Al-Shart} al-Mud}a@f* (Disandarkan)

Merupakan syarat yang lafadznya menunjukkan sifat dari karakter sumbernya artinya hukum yang dihasilkan dari syarat ini hanya untuk masa akan datang. Seperti seseorang berkata ‘aku akan menikahimu besok atau bulan depan’. Perempuan menjawab ‘saya terima’. Seperti dalam kasus

²² Mustawa Ahmad Zarka@, *al-Madkhal al-Fiqhi@ al ‘A@mm*, (Damaskus: Da@r al-Qalam, 2004), hlm. 573.

²³ H}asan H}asan Mans}u>r, *al-Muh}i>d fi Sharh Masa@il al-Ah}wa@l al-Shakhs}iyyah*, (Libanon: Sa@mi@, 2001), hlm. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wasiat yang bermakna penyandaran pada waktu setelah mati.²⁴ Maka ketika lafad menggunakan taklik atas datangnya suatu masa dan menfungsikan sebagian taklik *shara@t}* maka dianggap sebagai taklik yang murni bukan penyandaran (*id}o@fah*) karena syarat tersebut ditaklik dan diikat dengan masa tertentu sebagaimana ikatan *mashru@t}* dengan syaratnya.²⁵

3) *Al-Shart} al-Muqoyyad* (Dibatasi)

Membatasi hukum akad dan hasilnya dengan tujuan membandingkan hasil akad yang asli dengan mewajudkan beberapa ketentuan yang sebelumnya tidak wajib apabila akadnya dibuat *mut}laq*. Fuqaha' menyebut syarat yang dibatasi dengan akad atau bersamaan dengan syarat.²⁶ Apabila akadnya telah diputuskan dan dilaksanakan tidak ditaklik dan diikat dengan syarat semisal menikahi seorang istri dengan syarat tidak mengeluarkannya dari negaranya. Berdasarkan ini maka tidak semua akad dan beberapa fungsi ucapan menurut kaca mata mayoritas *Fuqaha@*' bisa menerima semua model tiga syarat ini taklik, *id}o@fah taqyi@d*.

Disamping itu akad nikah merupakan akad yang berfaidah *tamli@k* (memberi kepemilikan) dengan seketika dan tidak boleh disandarkan pada masa akan datang melihat konotasi akad nikah sendiri adalah halal bersenang-senang antara suami istri pasca akad secara langsung tidak perlu menunggu masa akan datang untuk menyusun hukum-hukumnya.²⁷

²⁴ Badra>n Abu@ al-'Ainaini Badra>n, *Ta>rikkh al-Fiqih al-Isla@mi@ wa naz}ariyah al-Malikiyah wa al-'uqud*, (Beirut: Da@r Nahd}ah al-'Arabiyah, t.t.), hlm. 493.

²⁵ Must}afa@ Ah}mad al-Zarqa@, *al-Madkhal al-Fiqhi@*, hlm. 577.

²⁶ Badra>n Abu@ al-'Ainaini Badra>n, *Ta>rikkh al-Fiqih al-Isla@mi@ wa nad}ariyah*, hlm. 490.

²⁷ H}asan H}asan Mans}u>r, *al-Muh}i>d fi Sharh Masa@il*, hlm. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun perbedaan secara jelasnya adalah sebagai berikut: 1) Syarat nikah di tetapkan oleh syariat (*shar'i*), sedangkan persyaratan dalam pernikahan di tetapkan oleh orang yang akad (*'a*). 2) Akibat hukum dari syarat nikah adalah keabsahan nikah (*sihah al-nika*), sedangkan persyaratan dalam pernikahan tidak memiliki dampak hukum atas keabsahan nikah melainkan hanya berdampak pada keberlangsungan nikah (*luzu* *al-nika*).²⁸ 3) *Shuru' al-luzu*, adalah syarat yang menentukan kepastian suatu pernikahan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu pernikahan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin pernikahan yang sudah berlangsung itu dibatalkan.²⁹ 4) Syarat nikah tidak mungkin dapat di gugurkan, sedangkan persyaratan dalam pernikahan sewaktu-waktu dapat di gugurkan.³⁰

b. Syarat Bersamaan dengan Akad

Munculnya beberapa akad itu mengikuti kehendak orang yang berakad. Terkadang akad itu muncul secara bebas dan ada pula yang terikat dengan beberapa syarat, diantaranya ada akad yang di *taklik* (digantungkan) dengan satu syarat tertentu sehingga keberadaannya tidak dianggap kecuali dengan adanya syarat yang dimaksud. Ada pula yang hukum dan hasil akad dibatasi atau dibersamakan dengan syarat tersebut.

²⁸ Muh}ammad ibn S}a}lih al-At}imayn, *al-Sharh} al-Mumt}i' 'alá Za>d al-Mustaqni>*", Vol. 12, (Beirut: Da>r Ibn al-Jauzi>, 1427 H.), hlm. 162.

²⁹ Wabbah al-Zuh}aili, *al-Fiqih al-Islam}i wa adillatuhu*. Vol. VII, hlm. 47.

³⁰ Muh}ammad ibn S}a}lih al-At}imayn, *al-Sharh} al-Mumt}i*, hlm. 162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian mengenai beberapa syarat yang bersamaan dengan akad dan terkadang mempengaruhi terhadap akad. Beberapa syarat ini tidak diwajibkan oleh syara' atau undang-undang, akan tetapi ketika syarat-syarat telah diambil maka dianggap memiliki *mas{lah}ah*.³¹ Seperti akad yang lafadznya muncul secara mutlak tanpa ada taklik atas suatu syarat atau disandarkan pada masa akan datang atau dibatasi dengan satu waktu akan tetapi bersamaan dengan syarat.³² Adapun contohnya, seorang perempuan berkata kepada seorang lelaki 'aku akan nikah denganmu dengan syarat engkau membawaku keluar kota'. Lalu sang lelaki menjawab 'saya terima'. Maka di dalam lafadz ini terdapat satu syarat dari salah satu dua orang yang akad padahal itu bukan bagian dari *Ija@b* (persetujuan). Adapun hukum akad yang bersamaan dengan syarat adalah jelas sah akan tetapi harus dengan lafadz yang menunaikan.³³

Sesungguhnya makna terpenting bagi syarat menurut bahasa adalah menetapkan, ketetapan dan tanda. Tiga arti ini sesuai dengan makna syarat shar'i seperti suci untuk shalat adalah tanda yang pasti dimana tidak ditemukan shalat tanpanya. Sedangkan syarat *taqyi@di@* itu melebihi dari ketetapan asli yaitu tanda yang pasti bagi akad berpengaruh di dalamnya dengan mempertimbangkan hasilnya.³⁴

³¹ Muh}amad Kama>l al-di>n Ima>m, *al-Zawa>j fi al-Fiqhi>*, hlm.101.

³² Muh}ammad Mus}tafa@ Shalabi@, *Ah}ka@m al-Usrah fi al-Isla@m Baina Madha@hib al-Saniyah wa al-Ja'fariyah*, (Beirut: Da@r al-nahdah al-Arabiyah, 1988), hlm. 153-154.

³³ 'Abd al-Fata@h Taqiyah, *Maba@hith fi Qa@nu@n al-Usrah al-Jaza@iri@ min Khila@l Maba@di'i wa Ah}ka@m fi al-Fiqhi al-Isla@mi@*, (al-Jaza@ir: Da@r Tha@lah, 2000), hlm. 107.

³⁴ 'Abd al-S}amad Balh}a@a@ji@, *H}ukmu al-Shart}i al-Jaza@i al-Wa@ridi 'alá al-A'ma@l wa S}u@rah Tat}bi@qiyah fi al-Mas}a@rif al-Isla@miyah*, Majallah al-Wa@ha@t Li al-buhu@th wa al-Dira@sah, Vol. XI (Ja@mi'ah Abu@ Bakar Balka@id Tilmisa@n, 2011), hlm. 323.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika mendefinisikan syarat bersamaan dengan akad maka wajib menjelaskan perbedaan antara taklik atas syarat dan akad bersamaan dengan syarat. Fuqaha telah memberi perbedaan antara keduanya: bahwa persetujuan yang digantungkan atas terjadinya syarat maka kejelasan maknanya bergantung kenyataan syaratnya, artinya keberadaannya tidak dianggap sebelum terwujudnya syarat tersebut. Seperti ketika menggunakan alat taklik *in, idza@*.

Adapun akad yang bersamaan dengan syarat maka makna persetujuannya akan berhasil dan menjadi kenyataan dengan mengucapkan syaratnya. Seperti ketika seorang perempuan berkata kepada seorang lelaki ‘aku menikahkan diriku padamu dengan syarat engkau hanya hidup denganku atau dengan syarat engkau memberikan padaku mahar’. Garis besarnya adalah kata ‘aku menikahkan diriku padamu dan syarat yang harus dipenuhi oleh sang lelaki’. Maka bagian pertama dari ucapan perempuan ‘aku menikahkan diriku padamu’ adalah yang menjadikan sempurnanya akad.³⁵

Bertendensi pada definisi syarat yang telah berlalu serta penjelasan korelasinya dengan akad mungkin adanya konklusi beberapa kehususan yang membedakan syarat yang bersamaan dengan akad diantaranya:

- a. Syarat yang bersamaan dengan akad adalah perkara tambahan dasar penggunaan akad

Al-Zarkashi@ berkata syarat merupakan perkara yang ditetapkan dalam dasar penggunaan dan harus ada syarat lain. Bila seseorang berkata

³⁵ Ah}mad Fara@j H}usain, *Ah}ka@m al-Zawa@j fi al-Shari@'ah al-Isla@miyah*, (Iskandaria: Da@r al-Ja@mi'ah al-Jadi@dah, 2006), hlm. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada orang lain: aku jual padamu mobil ini dengan harga 1000 dinar hingga satu tahun dengan syarat engkau beri aku jaminan, lalu teman bicaranya menerima. Maka jaminan adalah ketetapan yang lebih dari transaksi jual beli karena jual beli bisa sah tanpa syarat seperti ini dan secara mendasar eksistensinya tidak membutuhkan pada syarat tersebut.

Inilah perbedaan syarat yang bersamaan dengan akad dengan syarat taklik karena syarat taklik adalah menghubungkan hasil satu perkara dengan perkara yang lain menggunakan syarat. Contoh; seorang berkata pada orang lain ‘apabila anak datang dari perjalanan maka aku akan menjual rumahku padamu dengan harga 100.000 dinar’. Maka inilah syarat taklik tidak lebih dari dasar penggunaan dan tidak menjadi sah pada seketika akad.³⁶

b. Merupakan perkara yang mungkin dilaksanakan

Syarat wajib berkorelasi dengan perkara yang menurut pihak yang disyaratkan mudah untuk dilakukan ketentuan ini menuntut adanya syarat itu bisa terjadi pada masa akan datang, karena apabila suatu syarat mustahil terjadi maka akadnya batal.

Kemustahilan suatu syarat adakalanya dari segi materi atau undang-undang. Mustahil secara materi akan nampak jelas ketika ditemukan didalam karakter perkara yang penuh rintangan yang menghalangi untuk memenuhi syarat. Seperti menggantungkan suatu pemberian dengan terbang di angkasa tanpa menggunakan pesawat terbang. Atau dengan tidak terbenamnya matahari dalam semalam suntuk. Adapun mustahil secara undang-undang

³⁶ Ah}mad ‘Uthma@n Shabi@r, *al-Shuru@t al-Muqtarinah bi al-‘aqd wa Atharuha@ Fi hi fi al-Fiqhi al-Islam@mi@*, (t.t.) hlm. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka garis besarnya adalah ketentuan undang-undang yang menghalangi untuk memenuhi syarat. Seperti menikah dari salah satu perempuan muhrim.³⁷

1) Dilaksanakan pada waktu akad

Syarat yang bersamaan dengan akad adalah yang terjadi pada saat akad lalu disandarkan pada naskah dan lafadz akad ketika diucapkan. Sehingga tidak masuk pada syarat yang bersamaan akad bila terjadi sebelum akad sekalipun mengandung ketetapan dan dianggap dari bagian perjanjian. Begitu pula syarat yang mengikuti akad tidak masuk dalam bagian syarat yang bersamaan dengan akad setelah diucapkan dan ditetapkan.³⁸

2) Syarat yang sesuai dengan aturan agama

Suatu syarat wajib sejalan dengan tuntutan akad dan tujuannya. Seperti perkara yang mewajibkan berupa hukum dari beberapa hukum akad atau memperkuat pada akad atau dibawa oleh syara' atau kebiasaan manusia. Maka syarat ini bertemu dengan dasar akad dan tidak berpengaruh pada akad.³⁹

Maka suatu syarat wajib tidak bertentangan dengan aturan umum dan undang-undang, syarat dianggap sebagai penguat pada tuntutan akad dan akad pada hakikatnya tidak membutuhkan syarat.⁴⁰

³⁷ Yu@suf Mas'u@di@, *Al-Ishtira@t} fi Aqdi al-Zawa@j fi Qa@nun al-Usrah al-Jaza@iri@ Risa@lah Ma@gister*, (Al-Markaz al-Ja@mi'i@ Bisha@r, 2007), hlm. 15.

³⁸ Ah}mad 'Uthma@n Sh@abir, *al-Shuru@t Al-Muqtarinah bi al-'aqad*, hlm.64.

³⁹ 'Ali@ Muh}ammad 'Ali@ Qa@sim, *al-Tafri@q Baina al-Zaujaini*, hlm. 109.

⁴⁰ Yu@suf Mas'u@di@, *al-Ishtira@t} fi Aqdi al-Zawaj*, hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama fiqih berbeda pendapat dalam mengklarifikasi syarat-syarat yang sah dan yang tidak sah dan antara syarat yang mempersulit dan yang memperluas dalam kebebasan memberi syarat dalam akad nikah. Maka diantara Ulama fiqih ada yang berpendapat pada dasarnya syarat tersebut haram. Dan sebagian yang lain ada yang memandangnya boleh.

c. Bentuk-Bentuk Syarat dalam Akad

Sesungguhnya aturan hukum dalam syariat Islam tidak pernah meninggalkan urusan syarat yang berjalan mengikuti keinginan dan kesenangan manusia. Bahkan telah diatur dengan syariat yang tidak menjerumuskan mereka dalam dosa akan tetapi memberikan *mas}lah}ah* bagi umat manusia. Bahkan lebih dari itu, hukum Syariat telah memberikan kebebasan berakad dan model dalam penggunaan dan transaksi berakad. Hanya saja hukum Syariat telah meletakkan fase-fase dan batas-batas yang tidak bisa diukur dengan hal yang membawa mereka pada bahaya dengan mempertimbangkan kemaslahatan khusus dan kemaslahatan hamba.

Adapun syarat-syarat yang bertentangan dengan tujuan akad maka harus dilarang. Inilah yang menjadi obyek pembahasan dalam menjelaskan macam-macam syarat yang dianggap sah oleh Ulama fiqih, baik merupakan tuntutan akad atau menjelaskan manfaat pada beberapa sisi akad. Kemudian kita melihat syarat-syarat yang tidak sah dan memiliki pengaruh di dalam akad.

1) Syarat-Syarat Yang Sah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat-syarat yang sah adalah syarat-syarat yang dituntut oleh akad atau menguatkan tuntutanannya, yaitu syarat-syarat yang dibawa oleh syara' baik berupa nas} s} atau berlaku di dalam 'urf (kebiasaan) manusia.⁴¹

Apabila terdapat syarat kedua belah pihak atas tuntutan akad untuk memperkokoh perkara yang mewajibkan akad maka syarat itu sah dan dianggap.⁴² Inilah syarat-syarat yang menetap di dalam akad baik ditetapkan oleh salah satu pihak atau tidak. Seperti seorang suami memenuhi hak-hak istri secara penuh, semisal nafaqah, menolak mempercepat mahar sebelum jimak, bagus dalam menggauli istri dan seorang istri tidak memberi izin laki-laki lain masuk rumahnya pada saat suaminya bepergian. Contoh-contoh syarat ini semuanya dari suami-istri yang wajib dipenuhi.⁴³

Mayoritas Ulama fiqih sepakat sahnyanya syarat yang sesuai tuntutan akad dan tujuannya. Karena firman Allah SWT “Ya@ ayyuha al-ladzi@na a@manu@ awfu@ bil ‘uqu@d” Allah menghendaki dengan lafadz “al-‘uqu@d Sesuatu yang Allah halalkan dan yang Allah haramkan dan semua yang Allah batasi di dalam al-Qur’an. Janganlah kalian berkhianat dan melanggar.

Mengenai hal ini, berkata *Al-Khatta@bi@* menurut yang dinukil oleh *Ibnu H}ajar Al-Athqola@ni@*:

⁴¹ Isma@’i@l Aba@ Bakr ‘Ali@ al-Ba@miri@, *Ah}ka@m al-Usrah al-Zawa@j wa al-t}ala@q baina al-H}anafiyah wa al-Sha@fi’i@yah*, (Oman: Da@r al-H}a@mid, 2008), hlm. 107.

⁴² Muh}ammad Ah}mad Sira@j, *Naz}ariyah al-‘Aqd wa al-Ta’si@f fi Isti’ma@l al-Haqq*, (Iskandaria: Da@r al-Mat}bu@’ah al-Ja@mi’iyah, 1998), hlm. 158.

⁴³ Muh}ammad H}asan Abu@ Yahyá, *Ah}ka@m al-Zawa@j fi al-Shari@’ah al-Isla@miyah*, (Oman: Da@r Ya@fa@, 2011), hlm. 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مِنَ الشُّرُوطِ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهَا إِتِّفَاقًا, وَهُوَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ إِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

“Diantara beberapa syarat yang wajib dipenuhi menurut aklamasi Ulama adalah syarat yang Allah perintahkan dengannya untuk menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik pula”.⁴⁴

Adapun syarat-syarat yang diperbolehkan menurut para ulama mazhab adalah sebagai berikut:

- a. Syarat menurut mazhab H}anafi

Syarat yang sah menurut mazhab H}anafi Terdapat empat (4) kriteria diantaranya;

- 1) Harus berupa syarat yang dituntut akad dan yang mewajibkan berupa hukum dari beberapa hukum akad dan konsekuensi dari beberapa konsekuensi akad. Seperti memberi syarat istri tidak boleh keluar dari rumah suami kecualiizinkan suami;
- 2) Syarat harus memperkuat terhadap tanggungan akad, seperti disyaratkan orang tua suami yang menjamin mahar;
- 3) Adanya syarat telah diperbolehkan oleh *shara'* dan mewajibkan untuk menjaganya. Seperti “bila suami telah menikahi istrinya maka urusan istri berada pada tangan istri” hukumnya sah;
- 4) Merupakan beberapa syarat yang diberlakukan oleh ‘*Urf*’ (kebiasaan) manusia. Seperti mempercepat mahar atau nafkah.⁴⁵

- b. Syarat menurut mazhab Ma@liki

⁴⁴ ‘Umar Sulaima@n al-Ashqa@r, *Ah}ka@m al-Zawa@j fi Dhaui al-Kita@b wa al-Sunnah*, (Jordan: Da@r Nafa@is, 1997), hlm. 180.

⁴⁵ Ah}mad Fara@j H}usain, *Ah}ka@m al-Zawa@j fi al-Shari@'ah al-Isla@miyah*, hlm. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat-syarat yang sah menurut mazhab Ma@liki ada dua bagian; 1) Syarat-syarat yang sah dan tidak makruh. Yaitu syarat yang berupa hukum dari beberapa hukum akad nikah atau menjadi konsekuensinya. Maka suami boleh memberi syarat pada istri agar taat kepada dirinya, karena syarat ini merupakan hukum akad nikah. Dan istri boleh memberi syarat suami agar memberi nafkah kepadanya atau menggaulinya dengan bagus, dan 2) Syarat-syarat yang sah dan makruh, maksudnya syarat-syarat yang tidak menghilangkan tujuan nikah tapi di dalam terdapat penekanan terhadap suami. Seperti seorang istri memberi syarat suami agar tidak menikah di atas dirinya (dimadu).⁴⁶

c. Syarat menurut mazhab H}ambali

Syarat-syarat yang sah menurut mazhab H}ambali ada 2 bagian yaitu:

1) Berupa syarat yang dituntut akad seperti pasrahnya istri pada suami dan memberi peluang untuk bersenang dengannya. Maka syarat ini tidak butuh disebut dalam akad karena merupakan tuntutan akad dan menunjukkan padanya, 2) Berupa syarat yang berguna dan menolong dalam akad dimana akad tidak terjadi kecuali bila syaratnya sempurna. Seperti seorang istri memberi syarat agar tidak dimadu atau tidak diusir dari rumahnya. Maka syarat-syarat ini dan sesamanya wajib dipenuhi dan bagi istri memiliki hak menggugat dengan merusak akad bila suami tidak memenuhinya.⁴⁷

d. Syarat menurut mazhab Sha@fi'i@

⁴⁶ Ah}mad Na@s}r al-Jundi@, *Sharh} Qanun al-Usrah al-jaz@airi@*, (Mesir: Da@r Shata@t, 2009), hlm. 60-61.

⁴⁷S}a@lih} Gha@nim al-Sadla@n, *al-Shuru@t} fi al-Nika@h}*, (Riya@d}: Da@r Ma'had, 1998), hlm. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat-syarat yang sah menurut mazhab Sha'fi' sama dengan mazhab Hambali, yaitu syarat yang sesuai dengan tuntutan akad nikah. Seperti syarat member nafkah dan bergilir antara beberapa istri. Atau tidak sesuai tuntutan nikah akan tetapi tidak berkaitan dengan satu tujuan, seperti syarat istri tidak boleh makan kecuali makanan tertentu.⁴⁸

Adapun aturan dibuat berdasarkan pertimbangan fiqh dan memperbolehkan kedua mempelai memberi ketentuan atas syarat yang dianggap bermanfaat bagi keduanya dan memberi kemaslahatan pada keduanya atau salah satunya dengan tetap menghormati undang-undang dan hukum dengan tidak memberi ketentuan yang melanggar hukum dan berpegangan pada dasar yang menjadikan ratifikasi akad.

Ulama yang mengusung pendapat ini berkomentar bahwa pada dasarnya syarat itu boleh selagi tidak bertentangan dengan *nas* *shara'* atau tuntutan akad. Mazhab Hambali adalah ulama pertama yang mengatakan bahwa syarat itu tidak ada yang haram kecuali bila *shara'* menunjukkan atas haram dan batalnya secara *nas* dan *qiyaas*. Maka syarat yang tidak sah dianggap pengecualian bagi mereka. Diantara syarat yang dikecualikan dari asal adalah 1) Syarat yang menurut *shara'* haram 2) Syarat yang bertentangan dengan tuntutan akad 3) Syarat akad di dalam akad. Oleh karena ini mazhab Hambali adalah mazhab yang paling banyak memberi peluang pada perputaran syarat yang sah.

⁴⁸ Wabbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa adillatuhu*, Vol.VII. hlm. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan mazhab H}ambali pada kasus ini banyak dipengaruhi dari pemikiran barat. Pemikir barat menganggap semua syarat yang bersamaan akad sah kecuali syarat-syarat yang bertentangan dengan undang-undang atau kebiasaan masyarakat.⁴⁹

Pendapat mazhab H}ambali, berkembang dengan pesat masa Ibnu Taimiyah yang sefaham dengan muridnya Ibnu al-Qoyi@m, dan al-Sha@t}ibi@, al-Ma@liki dengan al-H}ana@bilah bahwa pada dasarnya syarat itu boleh tapi mereka meringkas syarat yang haram atas dua bagian:

- Syarat yang merusak tujuan syari' yang bijaksana;
- Syarat yang merusak tuntutan akad dan tujuan syari' dari akad.⁵⁰ Seperti memberi syarat tidak adanya pergaulan suami-istri. Hanya saja mazhab H}ambali besebrangan dengan mazhab Maliki dalam masalah wajib memenuhi syarat-syarat yang sah dan bertentangan dengan tuntutan akad. Menurut mazhab Ma@liki sunnah memenuhi.

Sedangkan menurut pendapat Ibnu al-Qoyi@m berkata:

إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَطْلَانُ حَتَّى يُقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْأَمْرِ، وَالْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يُقُومَ دَلِيلٌ عَلَى بَطْلَانٍ وَالتَّحْرِيمِ

“Sesungguhnya dasar di dalam beberapa ibadah adalah batal sehingga ada dalil untuk menunjukannya. Sedangkan dasar di dalam beberapa akad adalah sah sehingga ada dalil yang menunjukkan batal dan haram”.⁵¹

⁴⁹ Abd al-Razza@q Ah}mad al-Sanhu@ri@, *Mas}adir al-Haqq fi al-Fiqhi al-Isla@mi@*, Juz. I, (Beirut: Manshu@ra@t Khalbi@ Huqu@qiyah, 1998), hlm. 175.

⁵⁰ Ah}mad ‘Uthma@n Sh@abir, *al-Shuru@t Al-Muqtarinah bi al-‘aqad*, hlm. 89.

⁵¹ S}a@lih Gha@nim al-Shadla@n, *al-shuru@t fi*, hlm. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

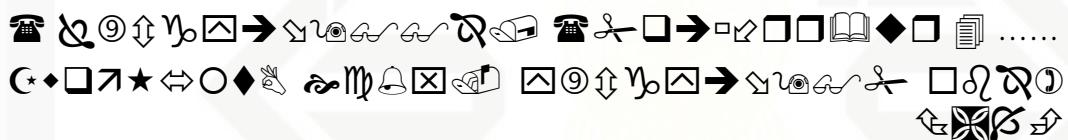
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Adapun dasar yang diambil dari Mazhab Hanbali terdapat dalam al-Qur'an dan hadits. Seperti firman Allah dalam Q.S: al-Maidah ayat 1:



“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”⁵² (Q.S. Al-Maidah: 1)

Perbuatan yang Allah halalkan, haramkan, wajibkan serta yang dibatasi di dalam al-Qur'an semuanya. Janganlah kalian berkhianat dan melanggar.



“..... Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.”⁵³ (Q.S. al-Isra: 34)

Ayat ini memberi petunjuk dengan jelas dan *sarih* atas wajib memenuhi janji-janji dan akad yang diputuskan manusia atas dirinya sendiri dan memenuhi janji merupakan sifat hamba-Nya yang mukmin. Adapun syarat-syarat yang datang atas akad sama seperti janji yang wajib ditepati selagi tidak bertentangan dengan aturan Islam. Apalagi syarat tersebut sejalan dengan garis yang diperbolehkan syara' maka pada dasarnya akad dan syarat tersebut hukumnya boleh. Sedangkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW “Orang-orang Islam itu menurut syarat mereka, kecuali apabila berupa syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”.⁵⁴

⁵² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 156.

⁵³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 429.

⁵⁴ Hadits ini diriwayatkan oleh Abi@ ‘Abdullah Muhammad bin Isma@il al-Bukha@ri@, *al-Ja@mi’ al-S{ah}i@h*, Juz. II, hlm. 135. Abi@ Da@wud Sulaiman Ibnu al-ush’ath al-Sijista@ni@ al-uzdi@, *Sunan Abi@ Da@wud*, Juz. IV, hlm. 16, (Hadits No: 3594), Sunan al-Tirmidhi@ Abi I@sa@ Muhammad ibnu I@sa@ Ibnu Su@rah, *Al-Ja@mi Al-S{ah}i@h*, Sunan al-Tirmidzi@, Juz. III, hlm. 626. (Hadits No: 1352), Hadits ini menurut Abu Isa Hasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Petunjuk hadits ini, bahwa dasar dalam syarat adalah boleh dan sah selama tidak terdapat perkara yang mencegahnya menurut syara'. Nabi pernah memberi kabar dengan wajibnya orang Islam tunduk pada syarat mereka dan mereka wajib memenuhi syarat yang mereka tetapkan atas diri mereka sendiri diantara mereka.

2. Syarat-Syarat yang Tidak Sah

Di maksud syarat tidak sah adalah syarat yang bertentangan dengan tuntutan akad, dan tidak berlandaskan nas{s} serta tidak berlaku di dalam kebiasaan manusia. Seperti syarat tidak memberi nafkah atau tidak terjadi warisan.

Menurut mayoritas ulama fiqih dan Ahli Ilmu syarat-syarat di atas ini tidak sah karena bertentangan dengan perintah Allah atau larangannya dan merusak tujuan nikah yang mendasar. Diantaranya lagi seorang istri memberi syarat pada suaminya agar dirinya tidak menaati suaminya atau suami memeberi syarat bahwa tidak ada mahar bagi istrinya. Juga merupakan syarat yang tidak sah seorang istri memberikan syarat pada suami yang bisa merusak tujuan dasar pernikahan, yaitu pergaulan suami-istri.⁵⁵

Rasulullah SAW, melarang dari sebagian syarat yang isinya dilarang dan memutus tali silaturahmi. Seperti seorang perempuan memberi syarat

Shahih. Abi@ Bakr Ahmad Ibnu al-Husain Ibnu Ali@ al-Baihaqi@, *Sunan al-Kubra*, Juz. VIII, hlm. 131 dan 275. (Hadits No: 11429 dan 11929).

⁵⁵ Umar Sulaima@n al-Ashqar, *Ah}ka@m al-Zawa@j*, hlm. 181.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar madunya ditalaq. Maka ini adalah syarat yang batil, Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، لِيَسْتَفْرِغَ بِصَفْحَتِهَا، فَإِنَّمَا هَا مَا قُدِرَ لَهَا

“Tidak halal bagi seorang wanita meminta saudari perempuannya (madunya) diceraikan agar dia dapat menggantikan posisinya. Sebab, dia hanya mendapatkan yang ditentukan untuknya”.⁵⁶

Maka hadits ini menunjukkan batalnya syarat menalak seorang madu, karena bertentangan dengan larangan yang dijelaskan dalam nas} dan hadits, terlebih syarat ini bisa membahayakan orang lain. Ibnu Taimiyah berpendapat:

مَنْ اشْتَرَطَ فِي الْوَقْفِ أَوْ الْعَتَقِ أَوْ أَهْيَةٍ أَوْ الْبَيْعِ أَوْ النِّكَاحِ أَوْ الْإِجَارَةِ أَوْ النَّذْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ شَرْطًا تُخَالِفُ مَا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ، بِحَيْثُ تَتَضَمَّنُ تِلْكَ الشُّرُوطُ الْأَمْرَ بِمَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، أَوْ النَّهْيَ عَمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، أَوْ تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ، أَوْ تَحْرِيمِ مَا حَلَّلَهُ، فَهَذِهِ الشُّرُوطُ بَاطِلَةٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ فِي جَمِيعِ الْعُقُودِ

“Barang siapa yang memberi syarat ketika berwakaf, memerdekakan budak, hibah, jual beli, nikah, sewa, nadzar atau akad yang lain, dengan syarat yang bertentangan dengan apa yang yang Allah tentukan atas hambanya, sekiranya syarat tersebut berisi perintah mengerjakan hal yang dilarang Allah dan melarang sesuatu yang diperintah-Nya, menghalalkan perkara yang diharamkan dan mengharamkan perkara yang dihalalkan. Maka syarat-syarat ini batal menurut mufakat kaum muslim dalam segala akad.”⁵⁷

⁵⁶ Abi@ ‘Abdullah Muh{ammad bin Isma@il al-Bukha@ri@, al-Ja@mi’ al-S{ah}i@h, Juz. III, hlm. 375-376. (Hadits No: 5152).

⁵⁷ Ibnu Taimiyah, Majmu@’ Fata@wá Ah}mad ibnu Taimiyah, hlm. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka bagi suami istri harus mengetahui syarat-syarat yang sah dan bisa membedakan dengan syarat-syarat yang rusak dan tidak sah, agar mereka tidak menetapkan syarat-syarat yang bertentangan dengan aturan agama dalam akad nikah. Syarat-syarat yang rusak adalah syarat yang menghalalkan perkara haram dan mengharamkan perkara halal seperti dalam hadits Nabi.

Ketika seorang istri memberi syarat pada suaminya agar menceraikan madunya atau suami memberi syarat tidak ada nafkah atas istrinya maka syaratnya batal tapi akadnya sah. Karena syarat-syarat ini tidak memberi pengaruh pada akad dan tidak menyebabkan batal.

Adapun bentuk batalnya akad yang disebabkan syarat hanya ketika syarat menghilangkan asas akad seperti syarat memberi waktu pernikahan dengan waktu yang disepakati. Terakhir kita menyimpulkan bahwa syarat yang bersamaan akad ada yang sah dan ada yang tidak sah.

Para Ulama fiqih berbeda terhadap syarat-syarat antara yang boleh dan yang dilarang sehingga ada yang menganggap syarat kecuali yang telah di nas} s} shar'i@. Dan ada yang memberi kebebasan terkait syarat karena dianggap sah kecuali bila dilarang oleh peraturan hakim. Dengan begitu pendapat Ulama mengarah pada dua kesimpulan boleh atau haram di dalam dasar syarat.

Pembahasan tentang dasar syarat adalah haram kecuali bila ada dalil yang menunjukkam syara' atas bolehnya. Pendapat ini di pelopori oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok al-Z}ahiriyah karena mereka memutuskan ada tujuh syarat yang sah sedangkan yang lain batal.⁵⁸

Mazhab H}anafi, Imam Ma@liki. dan mazhab Sha@fi'i@ sepakat dengan Al-Z}ahiriyah bahwa dasar syarat itu haram. Hanya saja mazhab H}anafi sepakat dengan mazhab Sha@fi'i@ di dalam mengecualikan syarat yang sesuai dengan tuntutan akad namun berbeda pendapat di dalam cara membenarkan. Jika mazhab Sha@fi'i@ bertendensi pada *Qiya@s* dan mas}lah}ah maka mazhab H}anafi di dalam membenarkannya berpedoman pada *is}tih}sa@n*.

Sedangkan mazhab Ma@liki tidak memberi ketentuan syarat yang sah harus sesuai tuntutan akad. Tapi mereka menetapkan prinsip lain yaitu membenarkan setiap akad yang mengandung manfaat pada salah satu pihak dengan catatan tidak bertentangan dengan akad.⁵⁹

Sedangkan Ibnu Taimiyah berpendapat dalam bentuk klarifikasi perbedaan ini: bahwa keterangan Imam Ah}mad memberi indikasi bahwa memperbolehkan beberapa syarat di dalam akad lebih banyak daripada Imam Sha@fi'i. Terkadang sepakat di dalam dasarnya dan mengecualikan penentang lebih banyak dari Imam Shafi'i dan sebagaimana juga pendapat Abu@ H}anifah. Tiga kelompok ini bertentangan dengan penganut Z}ahir dan memberi keluasaan didalam beberapa syarat melebihi mereka, karena tiga kelompok ini berpedoman pada *Qiya@s*, beberapa makna serta pendapat para Sahabat RA. Dan karena mereka memahami makna naskah yang asli yang

⁵⁸ As}mat 'Abd al-Majid Bakr, *Naz}ariyah al-'Aqd fi al-Fiqhi al-Islam@mi@*, (Beirut: Da@r Kitab al- 'Ilmiah, 2000), hlm. 59.

⁵⁹ Ah}mad 'Uthma@n Sh@abir, *al-Shuru@t Al-Muqtarinah bi al-'aqad*, hlm. 72-74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak terdapat pada penganut Z}ahir serta memberikan keluasaan dalam memberi syarat.⁶⁰ Argumentasi dibangun dengan bertendensi pada beberapa dalil dan *h}ujja@h* dari al-Qur'an dan hadits.



“...Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.⁶¹ (Q.S al-Baqarah: 229)



“...Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.....”.⁶² (Q.S At-Thalaq: 1)

Penjelasan dari kedua ayat ini, bahwa Allah memberi penjelasan barang siapa yang melanggar batas-batas Allah maka dianggap *z}alim*. Oleh karena itu, orang yang memberi syarat yang tidak terdapat dalil yang memperbolehkan atas syarat tersebut maka dianggap menyalai syariat Allah dan bertentangan dengan aturan-Nya. Maka syarat demikian ini tidak wajib dipenuhi.

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Barang siapa yang melakukan amalan, yang tidak didasari perintah kami, maka di tolak”.⁶³

⁶⁰ Ah}mad Sha@mi@, *Qa@nu@n al-Usrah al-Jaza@iri@*, (Iskandariyah: Da@r al-Ja@mi'ah al-Jadi@dah, 2010), hlm. 118.

⁶¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 55.

⁶² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 945.

⁶³ Abu@ Zakariya Yahya al-Nawawi, *S}ah}i@h}a Muslim Bish}arah{ al-Nawawi@*, Juz. XII, hlm. 346 (hadits No: 1718).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits ini menunjukkan batalnya setiap syarat yang tidak memiliki dalil yang memperbolehkan, ketika manusia telah melakukan transaksi dengan transaksi yang tidak tertuang di dalam syari'at dan dasar-dasarnya maka mereka telah menghalalkan dan mengharamkan dengan selain yang ditetapkan Allah, dan tidak seorangpun dari manusia memiliki kekuasaan untuk membuat aturan syari'at.

Maka penganut z}ahir melihat bahwa syarat-syarat yang bisa terjadi pada kebanyakan transaksi jual beli, akad nikah dan yang lain, tidak pasti dan tidak wajib dipenuhi dan yang melakukan akad tidak memiliki hak menuntut sehingga ada dalil yang menunjukkan sah. Dan mereka beri'tibar pada beberapa hadits dalam memenuhi syarat-syarat secara khusus.

Dari sini dapat dipahami bahwa penganut z}ahir menganggap adanya batasan pada kekuasaan kehendak dan kebebasannya dalam memberi syarat dan mempertajam dalil-dalil akad. Sehingga tidak mungkin muncul akad atau menetapkan syarat yang tidak terdapat keterangan yang memperbolehkan. Dengan begitu mereka tidak mengambil syarat-syarat yang memiliki mas}lah}ah perorangan atau jama'ah bagi kedua belah pihak sekalipun syarat tersebut tidak bertentangan dengan konotasi akad.

Di lihat dari waktu pengajuan syarat, maka syarat dapat di kelompokkan menjadi dua; syarat yang di ajukan sebelum akad dilangsungkan, dan syarat yang di ajukan ketika prosesi akad. Hal ini senada dengan perkataan Ibnu al-At}himain:

وَأَعْلَمُ أَنَّ الشُّرُوطَ فِي النِّكَاحِ يُعْتَبَرُ أَنْ تَكُونَ مُقَارَنَةً لِلْعَقْدِ، أَوْ سَابِقَةً عَلَيْهِ، لَا لَاحِقَةً بِهِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Ketahuilah bahwa persyaratan yang diajukan dalam nikah hanya ternilai ketika bersamaan dengan akad nikah atau sebelum akad nikah, bukan menyusul (setelah) akad nikah.”⁶⁴

a) Syarat yang di Ajukan Sebelum Pernikahan

Pada dasarnya pada setiap akad, baik nikah maupun jual beli, syarat yang di perhitungkan adalah syarat yang bersamaan (*al-muqa@rin*) dengan akad. Namun jika syarat tersebut sudah di sepakati oleh kedua belah pihak, maka syarat tersebut berstatus seperti halnya syarat yang *al-muqa@rin* (bersamaan).⁶⁵ Artinya akad yang terdapat syarat tersebut menjadi akad yang terbatas (*muqayyad*) keberlangsungannya dengan terlaksananya syarat tersebut.

Lebih jelas lagi, Ibnu al-Taimiyah mengatakan bahwa syarat yang diajukan oleh salah satu pihak ke yang lain sebelum akad berlangsung ber hukum sah dan *luzu@m* selagi syarat tersebut belum di batalkan sampai akad nikah berlangsung.

Di samping pendapat tersebut, di kalangan mazhab Ah}mad, terdapat satu pendapat lagi yang sangat berbeda dari pendapat sebelumnya, yakni syarat yang diajukan sebelum akad tidak memiliki pengaruh apapun pada keberlangsungan akad.⁶⁶

b) Syarat yang Di Ajukan Ketika Pernikahan

1. Mazhab H}anafî membagi menjadi dua; syarat yang *s}ah@ih@* (dapat dibenarkan) dan syarat yang *fa@sid* (rusak). Syarat yang

⁶⁴ Muh}ammad ibn S}a@lih al-At}imayn, *al-Sharh*, hlm. 163.

⁶⁵ *ibid.*

⁶⁶ Ibn Taimiyah, *Ah}ka@m al-Zawa@j*, (Beirut: Da@r al-Kutub, 1988), hlm. 182.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$\{s\}ah\{i\}h@$ adalah syarat yang menyempurnakan tuntutan akad, serta tidak bertentangan dengan hukum-hukum syara'. Sedangkan syarat yang $fa@sid$ adalah syarat yang justru menafikan tuntutan akad, serta bertentangan dengan hukum-hukum *shara'*.

Akibat hukum dari syarat yang $s\{ah\}i@h$ adalah adanya kewajiban untuk memenuhinya. Sedangkan akibat hukum dari syarat yang $fa@sid$ adalah syarat tersebut menjadi batal serta akadnya tetap berhukum sah.⁶⁷

2. Mazhab Ma@liki. Pendapat ini sedikit berbeda dengan pendapat di kalangan mazhab H}anafi. Sebab di samping pembagian *sahi* dan *fasid* sebagaimana di atas, juga di kalangan mazhab Ma@liki. *sahi* terbagi menjadi $al-s\{ah\}i@hah$ $al-makru@hah$ dan $al-s\{ah\}i@hah$ *ghairu al-makru@hah*. $al-s\{ah\}i@hah$ $al-makru@hah$ adalah syarat yang sesuai dengan tuntutan akad, sebagaimana syarat memberikan nafkah pada istri. Sedangkan $al-s\{ah\}i@hah$ *ghairu al-makru@hah* adalah syarat yang tidak ada kaitannya dengan akad, juga tidak menafikan tuntutan akad, tapi hanya menyempitkan pihak yang menerima syarat, sebagaimana syarat untuk tidak keluar rumah yang di ajukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki.⁶⁸
3. Mazhab Sha@fi'i@. Dalam pandangan Shafi'iyyah tidak jauh berbeda dengan pandangan Hanafiyyah, yakni membagi syarat menjadi syarat $s\{ah\}ih@$ dan syarat $fa@sid$. Syarat $s\{ah\}ih@$ menurut

⁶⁷ Wahbah Zuhaili@, *al-Fiqh al-Islam@mi@*, Vol. VII, hlm. 54.

⁶⁸ Wahbah Zuhaili@, *al-Fiqh al-Islam@mi@*, Vol. VII, hlm. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sha@fi'i@yyah adalah syarat yang sesuai dengan tuntutan akad, serta syarat yang tidak sesuai dengan tuntutan nikah, namun tidak memiliki hubungan dengan tujuan (*ghard*) nikah, sebagaimana ucapan: "*jangan engkau memakan ini*". Sedangkan syarat *fas@id* di kalangan Sha@fi'i@yyah dapat dikategorikan menjadi dua:

- a) Syarat yang bertentangan dengan tuntutan nikah, namun tidak sampai menghilangkan maksud asli (*al-maqs}u@d al-asli@*) nikah yaitu *wat}i*. Hukum yang ditimbulkan dari syarat ini adalah tetap sahnyanya akad dan gugurnya syarat. Sebagaimana syarat untuk tidak perlu memberi nafkah.
- b) Syarat yang bertentangan dengan tuntutan nikah, sekaligus juga menghilangkan maksud asli (*al-maqs}u@d al-asli@*) dari nikah. Hukum yang ditimbulkan dari syarat ini adalah batalnya akad nikah. Sebagaimana syarat untuk tidak di *wat}i*.⁶⁹

4. Mazhab H}anbali sebagaimana Sha@fi@'i juga membagi syarat menjadi *sahih* dan *fa@sid*, namun perinciannya berbeda, yakni:

- a) *Al-shuru@t} al-sah}i@ha}h*, yakni syarat yang menjadi tuntutan akad, serta syarat yang tidak menjadi tuntutan akad namun memiliki manfaat bagi salah satu pihak selama *shara'* tidak melarang dan selama tidak menghilangkan maksudnya akad. Syarat ini harus di penuhi, sebab terdapat manfaat di dalamnya.

⁶⁹ Wahbah Zuhaili@, *al-Fiqh al-Islam@mi@*, Vol. VII, hlm. 56-57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana syarat yang diajukan oleh pihak istri kepada suaminya untuk tidak memberi nafkah.

- b) *Al-shuru' al-ghayr al-sahihah*, yakni syarat yang dilarang oleh syara' dan bertentangan dengan tuntutan akad. Syarat yang batal dan tetap sah akadnya. Seperti syarat yang diajukan oleh pihak laki-laki untuk tidak memberi mahar, dan tidak memberi nafkah. Syarat ini ber hukum tidak sah, sebab di samping syarat ini menafikan tuntutan akad juga mengandung pembatalan hak-hak yang wajib sebab akad sebelum akad tersebut dilakukan. Syarat yang secara asli sudah membatalkan akad. Seperti mengajukan syarat pembatasan jangka waktu nikah (nikah *mut'ah*).

2. Dasar Hukum Syarat yang Bersamaan Akad Nikah

Sesungguhnya lafadz akad nikah yang disertai syarat-syarat oleh kedua pihak dengan tujuan terciptanya kemaslahatan dan manfaat bagi pasangan akan mengakibatkan hukum.⁷⁰ Karena dengan adanya akad maka menjadikan sebab terjadinya hak dan kewajiban untuk dijalankan oleh masing-masing pihak. Akan tetapi perlu diketahui oleh suami istri tentang syarat sah dan syarat yang dilarang, karena masing-masing memiliki implikasi hukum yang memengaruhi terhadap akad.

Dalam pandangan Ibn Taimiyah syarat dalam pernikahan itu dibagi menjadi tiga macam:⁷¹ 1) Syarat *sahihah*, yaitu syarat yang sesuai dengan tuntutan akad atau tidak sesuai dengan tuntutan akad tetapi manfaatnya

⁷⁰ 'Abd al-rahman ibn Na'ir Sa'di Rahmatullah, *Sharah Minhaj al-Salikin wa Taudhihi al-fiqhi fi al-Din*, (Riyad: Dar Wathan Linasir, 2001), hlm. 242.

⁷¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, Vol. VII, hlm. 57-59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembali kepada salah satu pelaksana akad nikah dan syari'at tidak melarang selama tidak menyalahi maksud dari tujuan akad. Hukumnya wajib untuk dipenuhi, seperti syaratnya istri agar suami menafkahnya, menggaulinya dengan cara baik, atau suami tidak boleh memadunya; 2) Sesuatu yang membatalkan syarat tetapi akad nikahnya tetaplah sah. Seperti laki-laki mensyaratkan untuk tidak memberikan mahar bagi istrinya, atau suami tidak akan menafkahi padanya, atau istri mensyaratkan suami tidak boleh menyetubuhnya. Hal ini tidak sah karenan syarat tersebut mengandung pengguguran hak-hak yang wajib sebab adanya akad sebelum akadnya, maka tidak sah; 3) Syarat yang membatalkan perkawinan dari asalnya misalnya mensyaratkan pernikahannya dengan waktu yakni nikah *mut'ah*.

a. Hukum Sahnya Syarat dalam Akad Nikah

Syarat yang *s{ah}ih@}* adalah syarat yang termasuk dalam tuntutan akad (*muqtada al-aqd*). Yakni syarat yang berupa hukum (ketentuan) yang berada pada akad tersebut, atau syarat yang merupakan akibat (*athar*) yang ditimbulkan dari keberadaan akad tersebut.⁷² Sebagaimana syarat yang diajukan oleh pihak istri untuk memberikan mahar dimana mahar itu sendiri merupakan syarat yang harus ada dalam akad pernikahan, serta syarat untuk memberi nafkah dimana nafkah adalah akibat yang ditimbulkan dari keabsahan akad nikah. Dan juga syarat yang termasuk dalam tujuan dari pada akad itu sendiri (*maqas{id al-aqd}*).⁷³ Sebagaimana syarat untuk berhubungan suami istri yang dalam pandangan Shafi'iyyah hubungan

⁷² Al-Gharyani, *Mudawwanah al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuh*, Vol. II, (Beirut: Mu'assasah al-Rayya@n, 2002), hlm. 520.

⁷³ Sayyid Sa@biq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. II, hlm. 476.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami istri (*wat'i*) merupakan tujuan utama (*maqa@s}id al-as}li@*) dalam pernikahan.⁷⁴

Termasuk dalam syarat yang *s}ah}ih@}* adalah syarat yang bukan termasuk tuntutan akad, namun hanya memperkuat (*ta'ki@d*) hal-hal yang wajib dalam akad serta memiliki manfaat dan *mas}lah}ah* yang kembali kepada kedua belah pihak maupun salah satu pihak saja.⁷⁵ *Ta'ki@d* yang di maksud di sini adalah syarat tersebut tidak sampai bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada, serta tidak ada dalil yang melarang keberadaan syarat tersebut. Dan juga yang di maksud dengan manfaat dalam konteks ini adalah manfaat yang tidak sampai merusak maksud dan tuntutan dari akad. Sebagaimana syarat untuk memperkuat akad nikah dengan pencatatan perkawinan, serta contoh-contoh lainnya.

Dari pembahasan diatas ulama fiqh sepakat bahwa syarat-syarat yang sah adalah syarat yang menjadi ketentuan akad selama *shara'* tidak melarang dan selama tidak menghilangkan maksudnya akad, sebagaimana mereka sepakat akan wajib memenuhinya. Seperti memberi nafkah istri atau menyerahkan mahar kepadanya.⁷⁶ Syarat seperti ini wajib suami dan istri memenuhinya. Seperti dalam al-Qur'an al-Maidah: 1 : *Ya@ayuha@ al-dhi@na amanu@ aufu@ bil'uqu@d*⁷⁷ Dalam ayat ini Allah memerintahkan orang mukmin untuk memenuhi syarat yang telah ia buat. Dan perintah tersebut menunjukkan adanya hukum wajib. Sehingga selama syarat yang

⁷⁴ Wahbah Zuhaili@, *al-Fiqh al-Islam@mi@*, Vol. VII, hlm. 56.

⁷⁵ Al-Shairazi@, *al-Muhadhdhab*, Vol. III, (Beirut: Da@r al-Sha@miyyah, 1996), hlm. 51.

⁷⁶ Mah}mu@d 'Ali@ al-Sart}awi>, *Fiqh al-Ah}wa>l al-Shakhs}iyah al-Zawa>j wa al-Thala>q*, (Jordan: Da@>r al-Fikr, 2008), hlm. 87.

⁷⁷ Kitab Suci al-Qur'an, hlm. QS. Al-Maidah: 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diajukan tersebut tidak bertentangan dengan *shara'* ia memberikan ketentuan hukum wajib untuk dipenuhi.⁷⁸ Dalam hadits Nabi Muhammad Saw.

*Inna ah}aqqa al-Shuru@t} an tuwaffa ma istah{laltum bihi al-furu@j*⁷⁹ hadits ini merupakan dalil yang sangat jelas atas kewajiban memenuhi syarat yang telah dibuat. Sedangkan syarat yang lebih berhak untuk dipenuhi adalah syarat yang terkait (*muttasi}lah*) dengan akad nikah, sebab nikah adalah akad yang menuntut kehati-hatian (*ah}wat*), serta pintunya juga dipersempit (*udiq*).⁸⁰

Di samping dalil dari al-Qur'an dan hadits Nabi, juga terdapat dalil dari perkataan (*athar*) sahabat, yakni:

رَوَى أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا ثُمَّ أَرَادَ نَقْلَهَا فَخَاصَمُوهُ إِلَى عَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهَا شَرَطُهَا مُقَاطَعُ الْحَقُوقِ عِنْدَ الشَّرْطِ

“Diriwayatkan, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, ia mensyaratkan kepada sang perempuan (agar ia tinggal) di rumah perempuan tersebut, kemudian ia ingin memindahkannya. Akhirnya, hal ini dilaporkan kepada Umar bin Khattab beliau berkata: Baginya (pihak perempuan) syaratnya, sebab terputusnya hak adalah ketika adanya syarat.”⁸¹

⁷⁸ Ibn al-Kathir, *Tafsi@r al-Qur'an al-Adzi@m*, Vol. III, (Beirut: Da@r Taybah, t.t.), hlm. 7-8.

⁷⁹ Hadits ini diriwayatkan oleh Abi@ 'Abdullah Muh}ammad bin Isma@il al-Bukha@ri@, *al-Ja@mi' al-S}ah}i@h*, Juz II, hlm. 276. Abu@ Zakariya Yahya al-Nawawi, *S}ah}i@h}a Muslim Bish}arah} al-Nawawi@*, Juz IX, hlm. 288. *Musnad al-Imam Ah}mad Ibnu H}anbal*, Juz IV, hlm. 144, 150 dan 151. Abdulla@h Ibnu Abdurah}ma@n al-Dara@mi@ al-Samarqandi@, *Sunan al-Dara@mi*, Juz II, hlm. 191, Abi@ Da@wud Sulaiman Ibnu al-ush'ath al-Sijista@ni@ al-uzdi@, *Sunan Abi@ Da@wud*, Juz II, hlm. 417, Sunan al-Tirmidhi@ Abi I@sa@ Muh}ammad ibnu I@sa@ Ibnu Su@rah, *Al-Ja@mi Al-S}ah}i@h*, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz III, hlm. 425. Imam Nasa@i Ah}mad Ibnu Ali Ibnu Shu'aib, *Sunan Al-Nasa@i@*, Juz VI, hlm. 400-401. dan Abi@ Abdulla@h Muh}ammad Ibnu Yazid al-Qazawi@ni@, *Sunan Ibnu Ma@jah*, Juz III, hlm. 375.

⁸⁰ Sa>biq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. II, hlm. 477.

⁸¹ Sa@biq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. II, hlm. 477.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam *athar* ini sahabat Umar menjadi mediator antara dua orang yang saling berselisih dengan hukum wajibnya memenuhi syarat tersebut. Dan kewajiban ini oleh sahabat-sahabat yang lain tidak diingkari. Sehingga menjadi jelas akan wajibnya memenuhi syarat selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan maksud dari nikah.⁸²

Redaksi lain dari manfaat yang kembali kepada salah satu pihak adalah redaksi manfaat bagi perempuan. Dalam hal ini, ketika di teliti secara seksama, semua ulama sepakat bahwa akad nikah yang dilakukan dengan adanya syarat ini ber hukum sah.⁸³ Letak *khilaf* (perbedaan) mereka adalah tentang hukum memenuhinya (*luzu@m al-wafa@*) apakah ber hukum wajib ataukah tidak.

Maka diantara Ulama ada yang berpendapat bahwa nikahnya sah dan syarat-syaratnya tidak wajib suami memenuhinya. Namun ada juga sebagian Ulama berpendapat wajib dipenuhi syarat untuk istri, bila tidak dipenuhi maka nikahnya rusak (*fasakh*).⁸⁴

Pendapat *pertama*, diusung oleh mayoritas ulama H}anafi, Shafi@’i dan Ma@liki dan kebanyakan dari Ahli Ilmu. Mereka berpendapat syaratnya rusak dan suami tidak wajib memenuhi, akan tetapi tidak menyebabkan rusaknya akad namun hanya syaratnya yang rusak dan akadnya tetap sah.⁸⁵

⁸² Ibn Quda@>mah, *al-Mughni@*, Vol. IX, (Riyad} : Da@r ‘Alam al-Kutub, 1997), hlm. 485.

⁸³ Ibn al-H}imam, *Sharh} Fath} al-Qa@dir*, Vol. III, (Beirut; Da>@r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 335. Al-Qarafi@, *Al-Da@khirah*, Vol. IV, (Beirut: Da>@r al-Gharb al-Isla@mi@, 1994), hlm. 405. Al-Shaira@zi@, *al-Muhadhdhab*, Vol. IV, 162. Dan Ibnu Taimiyah, *Majmu@’ Fata@w@ Ah}mad ibnu Taimiyah*, hlm.164.

⁸⁴ Sayid Sa>biq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 44.

⁸⁵ Kauthar Ka>m@il ‘Ali@, *Shurut} ‘Aqd al-Zawa@j fi al-Shari>@’ah al-Isla>miyah*, (Tunisia: Da>@r Sala@mah, 1985), hlm. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ma@likiyah berpendapat bahwa syarat-syarat yang tidak memberi pengaruh di dalam akad nikah tidak mengubah ketentuan akad. Seperti, memberi syarat agar tidak dimadu, suami tidak mengambil budak perempuan dan tidak membawanya keluar dari negaranya. Maka syarat-syarat ini tidak sampai menjadi haram atau merusak akad nikah.⁸⁶

Pendapat *kedua*, yaitu Mazhab H}ambali, Z}ahiriyah dan Syi'ah Imamiyah melihat bahwa syarat-syarat di atas sah dan wajib dipenuhi. Bila suami tidak memenuhi maka perempuan memiliki hak pembatalan pernikahan.⁸⁷

Pendapat golongan Z}ahiriyah, bila suami menikahi istri dengan syarat suami tidak membahayakan jiwa dan harta istrinya, menahan dengan baik dan menyerahkan dengan baik maka syarat ini sah dan begitu juga akad yang bersamanya. Sedangkan golongan Syi'ah Imamiyah menambahkan syarat yang diajukan ini merupakan syarat yang tidak *menafikan* akad dan memiliki tujuan melakukan *istimta@'* (bersenggama) pada waktu tertentu.⁸⁸

Adapun dasar perbedaan antara mayoritas ulama fiqih dan Mazhab H}ambali terdapat pada ruang lingkup syarat-syarat lebih sempit menghindari kesia-sian. Sedangkan H}ambali mengatakan syarat dapat batal ketika ada larangan yang *s}a@rih* dan bertentangan dengan akad yang di dalam nas}s}.
UIN SUSKA RIAU

⁸⁶ Muh}ammad 'Ulu@shi@sh al-Warthala@ni@, *al-Shuru@t} al-Muqtarinah bi al-'Aqd fi al-Fiqhi al-Isla@mi@ wa Athar al-Ikhtila>fa@t al-Isla>miyah Fi ha>@*, (Jaza@ir: Da@r Ummah, 1997), hlm. 163.

⁸⁷ Kauthar Ka>m@il 'Ali@, *Shurut} 'Aqd al-Zawa@j fi al-Shari@'ah al-Isla@miyah*, hlm. 72.

⁸⁸ Muh}ammad Khad}ra Qa@dir, *Dauru al-Ira@dah fi ah}ka@m al-Zawa@j wa al-T}ala@q wa al-Was}iyah*, (Jordan: Dar al-Yazuri, 2010), hlm. 163.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelompok H}ambali menggunakan dalil dalam hadits Nabi Muhammad SAW.⁸⁹ *"Inna ah}aqqa al-Shuru@t} an tuwaffá ma istah{laltum bihi al-furu@j}"*⁹⁰ petunjuk dari hadits ini bahwa Nabi SAW. Mewajibkan memenuhi setiap syarat yang disebut di dalam akad nikah, dan tidak memiliki keterangan husus atau dalil khusus. Karena syarat yang tidak memiliki dalil maka hadits inilah dalilnya dengan melihat lafadznya yang umum dan mencakup terhadap sesuatu yang menunjukkan atasnya, serta menguatkan tuntutan memenuhinya.⁹¹

Adapun dalil yang digunakan oleh mayoritas ulama adalah terdapat dalam Nabi Muhammad SAW. *Kullu Shart}in laisa fi@ kita@bi allahi fahuwa ba@t}il wa in ka@na miatu shart}in*⁹² dan sabda Beliau" adalah "*al muslimu@na 'ala@ shuru@t}ihim illa Shart}a ah{alla h}ara@man aw*

⁸⁹ Bukha@ri@, No. 5151, hlm. 249.

⁹⁰ Hadits ini diriwayatkan oleh Abi@ 'Abdullah Muh}ammad bin Isma@il al-Bukha@ri@, *al-Ja@mi'* *al-S{ah}i@h*, Juz. II, hlm. 276. Abu@ Zakariya Yahya al-Nawawi, *S{ah}i@h}a Muslim Bish}arah{ al-Nawawi@*, Juz. IX, , hlm. 288. *Musnad al-Imam Ah}mad Ibnu H}anbal*, Juz. IV, hlm. 144, 150 dan 151. Abdulla@h Ibnu Abdurah}ma@n al-Dara@mi@ al-Samarqandi@, *Sunan al-Dara@mi*, Juz. II, hlm. 191, Abi@ Da@wud Sulaiman Ibnu al-ush'ath al-Sijista@ni@ al-uzdi@, *Sunan Abi@ Da@wud*, Juz. II, hlm. 417, Sunan al-Tirmidhi@ Abi I@sa@ Muh}ammad ibnu I@sa@ Ibnu Su@rah, *Al-Ja@mi Al-S{ah}i@h*, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz. III, hlm. 425. Imam Nasa@i Ah}mad Ibnu Ali Ibnu Shu'aib, *Sunan Al-Nasa@i@*, Juz. VI, hlm. 400-401. dan Abi@ Abdulla@h Muh}ammad Ibnu Yazid al-Qazawi@ni@, *Sunan Ibnu Ma@jah*, Juz. III, hlm. 375.

⁹¹ Muh}ammad Abu@ Zahrah, *al-Ah}wa@l al-Shakhs}iyyah*, hlm. 158.

⁹² Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Nasa@i Ah}mad Ibnu Ali@@ Ibnu Shu'aib, *Sunan Al-Nasa@i@*, Juz. VI, hlm. 476. (Hadits No: 3451) dan Abi@ Abdulla@h Muh}ammad Ibnu Yazid al-Qazawi@ni@, *Sunan Ibnu Ma@jah*, Juz. VI, hlm. 145. (Hadits No: 2521). Abi@ Bakr Ahmad Ibnu al-Husain Ibnu Ali@ al-Baihaqi@, *Sunan al-Kubra*, Juz. VII, hlm. 213-214. Abi@ Qa@sim Sulaima@n Ibnu Ah}mad Ibnu Ayu@b li al-Khami@ al- T}a@bra@ni@, *al-Mu'jam S{agi}r al-T}abra@ni@*, Juz. I, hlm. 177. Dia menyebutkan bahwa dia tidak meriwayatkannya dari Shu'bah, tapi dari Ibnu Abi Sirri dia juga meriwayatkannya di dalam Abi@ Qa@sim Sulaima@n Ibnu Ah}mad al- T}a@bra@ni@, *al-Mu'jam al-Kabi@r*, Jilid. XI, hlm. 11. (Hadits No. 10869), dan Zawa@id Bazzar Jilid. I hlm. 111. Dia juga mengatakan bahwa Bazzar meriwayatkannya dengan sanad yang berbeda-beda salah satu diantaranya adalah perawi thiqah. Riwayat Bazzar adalah mursal yang berasal dari para perawi hadits shahih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*h}{arrama h{ala@lan}*⁹³ Dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa setiap syarat yang tidak terdapat dalil atas sahnya maka hukumnya batal dan tidak wajib dipenuhi, karena tidak terdapat di dalam kitab Allah SWT.

Mayoritas Ulama menolak dasar yang digunakan Mazhab H}ambali di dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Bahwa yang dikehendaki Nabi di dalam haditsnya adalah tentang syarat mas kawin yang Allah perintahkan dan itulah yang menjadikan halalnya kemaluan (*farji*) bukan yang lain.⁹⁴

b. Hukum Tidak Sahnya Syarat dalam Akad Nikah

Para ulama mazhab sepakat atas tidak sahnya syarat-syarat yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah serta merusak tujuan dari nikah secara mendasar. Adapun contohnya seperti seorang perempuan memberi syarat untuk tidak patuh pada suaminya, bisa keluar rumah tanpa izin suaminya atau tidak bergilir pada para madunya.⁹⁵

Ibnu Taimiyah mengatakan barang siapa memberi syarat di dalam wakaf, memerdekakan budak, hibah, jual beli, nikah, sewa, nadzar dan lain-lain. Dengan syarat yang bertentangan dengan ketentuan Allah pada hamba-hamba-Nya, dimana syarat-syarat tersebut mengindikasikan pada perintah

⁹³ Hadits ini diriwayatkan oleh Abi@ 'Abdullah Muh{ammad bin Isma@il al-Bukha@ri@, *al-Ja@mi'* *al-S{ah{i}@h*, Juz. II, hlm. 135. Abi@ Da@wud Sulaiman Ibnu al-ush'ath al-Sijista@ni@ al-uzdi@, *Sunan Abi@ Da@wud*, Juz. IV, hlm. 16, (Hadits No: 3594), Sunan al-Tirmidhi@ Abi I@sa@ Muh{ammad ibnu I@sa@ Ibnu Su@rah, *Al-Ja@mi Al-S{ah{i}@h*, Sunan al-Tirmidzi@, Juz. III, hlm. 626. (Hadits No: 1352), Hadits ini menurut Abu Isa Hasan Shahih. Abi@ Bakr Ahmad Ibnu al-Husain Ibnu Ali@ al-Baihaqi@, *Sunan al-Kubra*, Juz. VIII, hlm. 131 dan 275. (Hadits No: 11429 dan 11929)

⁹⁴ Ibn H}azm, *al-Mah}all@i bi al-A@tsa@r*, Juz. IX, (Mesir: Ida@rah al-t}oba@'ah al-muni@riyah, t.t.), hlm. 518.

⁹⁵ 'Umar Sulaima@n Ashqar, *Ah}ka@m al-Zawa@j fi Dhau'i al Kita@b*, hlm. 181.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilarang Allah, maka syarat-syarat ini hukumnya batal menurut pendapat fuqaha di dalam semua akad.⁹⁶

Adapun contoh yang lain seperti, seorang istri memberi syarat suami agar menceraikan madunya maka syarat ini tidak sah, didalam hadits Nabi yang diriwayatkan dari Abu@ Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW melarang seorang perempuan memberi syarat menceraikan saudaranya. Adanya larangan itu menuntut keringanan dari perkara yang dilarang. Juga dikarenakan perempuan itu telah memberi syarat suaminya untuk merusak akadnya dan membatalkan hak suami dan istrinya sehingga hukumnya tidak sah.

Dari itu maka kita melihat bahwa setiap syarat yang mengharamkan perkara halal atau menghalalkan perkara haram adalah syarat yang batal. Seperti seorang lelaki memberi syarat tidak adanya mahar. Maka hal ini dianggap menggugurkan satu hak dari beberapa hak yang wajib dipenuhi dengan hanya terlaksananya akad. Dari penjelasan ini terdapat perbedaan pendapat mengenai akibat hukum syarat yang rusak diantaranya:

1. Menurut pendapat Ulama fiqh batal akad tersebut. Pendapat ini yang dipilih Ibnu Taimiyah, maka tidak ada perbedaan antara syarat yang dilarang oleh syara' dan yang tidak. Mereka mengambil dali dengan beberapa nikah yang dilarang oleh syara' seperti nikah *shigha@r* dan *muh}allil*.⁹⁷

⁹⁶ Ibnu Taimiyah, *Majmu@' Fata@w@ Ah}mad ibnu Taimiyah*, hlm. 28.

⁹⁷ 'Umar Sulaima@n Ashqar, *Ah}ka@m al-Zawa@j fi }d}au'i al Kita@b*, hlm. 182.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menurut Mazhab H}anafi syarat-syarat yang rusak tidak membatalkan nikah kecuali bila memberi syarat batasan waktu di dalam akad maka ini bisa menghilangkan sifat selama-selamanya (*takbi@d*) yang dimiliki akad nikah selama perjalanan hidup suami istri.⁹⁸ Dengan begitu maka nikah-nikah yang dilarang seperti nikah *shigha@r* dan *tah}li@l* hukumnya sah ketika di dalamnya terdapat syarat yang rusak tadi, kecuali nikah mut'ah, karena di dalamnya terdapat syarat batas waktu maka hukumnya tidak sah karena lafadz yang digunakan tidak layak diucapkan. Nikah mut'ah adalah nikah yang menjadikan shigat akadnya menunjukkan dengan jelas pada batas waktu dan lafadz nikahnya bersamaan dengan menyebut waktu tertentu.⁹⁹
3. Menurut pendapat Mazhab Sha@fi'i@, H}ambali dan Ma@liki bahwa diantara syarat-syarat nikah ada yang syaratnya batal dan akadnya sah.
 - a. Batasan syarat yang membatalkan adalah apabila merusak pada tujuan akad, seperti suami memberi syarat cerai di dalam akad atau tidak bersenggama, juga syarat memberi waktu dan memilih atau sesamanya di dalam akad nikah. Pendapat Ma@liki mengatakan bahwa diantara beberapa syarat yang membatalkan akad adalah seorang perempuan memberi syarat pada mempelai lelaki bahwa urusan dirinya berada pada kekuasaannya dan dia bisa menalak dirinya sendiri kapan saja dia mau kecuali bila suaminya menggantungkan urusan talaq kepada kekuasaan istrinya atas suatu sebab, demikian ini

⁹⁸ Ghawthi@ ibn Mulh}ah}, *Qa@nu@n al-Usrah 'alá D}au'i al-fiqhi wa al-Qad}a'*, (Jaza@ir: Di@wan al-Mat}bu@ah al-Ja>mi@'iyah, 1998), hlm. 46.

⁹⁹ Muh}ammad Abu@ Zahrah, *al-Ah}wa@l al-Shakhs}iyyah*, hlm. 157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak membatalkan akad bahkan syaratnya boleh dan lazim. Seperti halnya suami memberi syarat jika dirinya memukul istrinya atau pergi meninggalkan istrinya maka urusan istri ada pada kekuasaannya sendiri.¹⁰⁰

- b. Adapun maksud syarat yang kedua yaitu syarat yang batal namun akadnya sah adalah syarat-syarat yang tidak merusak tujuan dasar nikah, seperti syarat seorang perempuan keluar rumah sesuka hatinya atau dia memberi syarat madunya diceraikan atau suami memberi syarat tidak ada bagian gilir bagi istrinya dan tidak ada nafkah. Dari sini kita melihat bahwa perbedaan ulama berada pada hukum akad yang telah sempurna mengandung syarat-syarat yang disepakati oleh ulama atas rusak dan batalnya. Maka ada yang mewajibkan membatalkan syarat-syarat ini dan menetapkan akadnya sah serta mereka mengecualikan syarat memberi batas waktu seperti yang disampaikan Mazhab H}anafi. Sedangkan Syaikh Ibnu Taimiyah langsung membatalkan akad tanpa berfikir syarat-syarat ini apakah berpengaruh pada tujuan akad atau tidak.

Dengan begitu kita dapat mengetahui pendapat yang unggul adalah yang mengatakan wajib melaksanakan beberapa syarat, dengan alasan kedua pihak telah saling ridha atas syarat-syarat yang dimaksud dengan catatan bisa mendatangkan maslahat dan tidak bertentangan dengan syara'.

¹⁰⁰ Muh}ammad Khadra Qa@dir, *Dauru Ira>dah fi ah}ka>m*, hlm. 164.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Bentuk-Bentuk Penerapan Syarat di dalam Akad Nikah

Adapun bentuk-bentuk syarat dalam akad nikah terbagi menjadi dua diantara: 1) Bentuk akad nikah yang dilarang seperti mensyaratkan seorang istri menceraikan madunya, nikah *shigha@r*, *Mut'ah*, *tah}li@l* dan *misyar*; dan 2) Bentuk akad nikah yang diperbolehkan seperti mensyaratkan poligami, dan seorang istri mensyaratkan berkerja dll.

a. Bentuk Persyarat Nikah yang Dilarang

Hukum Islam telah melarang praktik terhadap pembuatan syarat-syarat yang rusak dan hukum Islam juga mengharamkan nikah-nikah yang rusak ini seperti mensyaratkan seorang istri menceraikan madunya, nikah *shigha@r*, *Mut'ah*, *tahl}i@l* dan *Misya@r* yang merupakan kawin modern dewasa ini. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Mensyaratkan Seorang Istri Menceraikan Madunya

Sesungguhnya persyaratan seorang istri agar menceraikan madunya merupakan persyaratan yang merusak tuntutan akad dan merupakan syarat yang dilarang oleh Shar'i@ dan haram dipenuhi.¹⁰¹ Maka tidak sah memberi syarat agar saudara diceraikan karena hal demikian itu akan menimbulkan bahaya baginya dan melampaui batas atasnya, sehingga tidak sah dipenuhi karena merupakan syarat yang diharamkan. Syarat yang wajib dipenuhi disyaratkan tidak bertentangan dengan nash Shar'i@ dan tidak menghalalkan yang diharamkan serta memiliki masalah bagi yang disyaratkan.¹⁰²

¹⁰¹ Must}afa@ Al-Adawi@, *Ja@mi' Ah}ka@m Al-Nisa@*, (Arab Saudi: Da@r al-Sunnah, Vol 3, 1995), hlm. 361.

¹⁰² S}a@lih} Gha@nim al-Sadla@n, *al-Shuru@t} fi al-Nika@h}*, hlm. 150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Menurut Jawa@d Mughniyah, jika istriya menysaratkan agar dia tidak memadunya, atau tidak menceraikannya, atau tidak mengumpuli madunya, atau tidak bersilaturahmi dengan keluarganya. Penulis al-Jawa@hir berkata, ‘Akad tersebut sah dan syarat batal, menurut kesepakatan fuqaha’, berdasarkan sabda Rasulullah Saw, ‘*Barang siapa menysaratkan sesuatu selain (yakni yang bertentang dengan) Kitabullah (Al-Qur’an)*’,¹⁰³ maka ia tidak berlaku untuknya dan tidak pula atasnya. Imam al-S}iddi@qi@ as pernah ditanya tentang seseorang laki-laki yang menikahi perempuan, sementara perempuan itu mensyaratkan bahwa dialah yang menentukan jimak dan talaqnya. Imam as menjawab, Dia (perempuan ini) telah menyalahi sunnah dan meminta hak yang bukan miliknya. Kemudian beliau memutuskan bahwa laki-laki itu harus membayar mahar, dan dia ditangan laki-laki itulah masalah *jimak* dan *talaq*.¹⁰⁴

Adapun hadits yang menunjukan pelarangan persyaratan seorang istri menceraikan madunya, seperti dalam hadits bahwa Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا تَنَاجِشُوا، وَلَا يَبِيعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَخْطُبُ الْمَرْءُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الْأُخْرَى لِتَكْتَفِيَ مَا فِي إِنْاءِهَا

¹⁰³ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Nasa@i Ah}mad Ibnu Ali@@ Ibnu Shu’aib, *Sunan Al-Nasa@i@*, Juz. VI, hlm. 476. (Hadits No: 3451) dan Abi@ Abdulla@h Muh}ammad Ibnu Yazid al-Qazawi@ni@, *Sunan Ibnu Ma@jah*, Juz. VI, hlm. 145. (Hadits No: 2521). Abi@ Bakr Ahmad Ibnu al-Husain Ibnu Ali@ al-Baihaqi@, *Sunan al-Kubra*, Juz. VII, hlm. 213-214. Abi@ Qa@sim Sulaima@n Ibnu Ah}mad Ibnu Ayu@b li al-Khami@ al-T}a@bra@ni@, *al-Mu’jam S}agi@r al- T}abra@ni@*, Juz. I, hlm. 177. Dia menyebutkan bahwa dia tidak meriwayatkannya dari Shu’bah, tapi dari Ibnu Abi Sirri dia juga meriwayatkannya di dalam Abi@ Qa@sim Sulaima@n Ibnu Ah}mad al- T}a@bra@ni@, *al-Mu’jam al-Kabi@r*, Jilid XI, hlm. 11. (Hadits No. 10869), dan Zawa@id Bazzar Jilid I hlm. 111. Dia juga mengatakan bahwa Bazzar meriwayatkannya dengan sanad yang berbeda-beda salah satu diantaranya adalah perawi thiqah. Riwayat Bazzar adalah mursal yang berasal dari para perawi hadits shahih.

¹⁰⁴ Muh}ammad Jawa@d Mughniyah, *Fiqh al-Ima@m Ja’far al-S}a@diq ‘Ardh wa Istidla@l* (Beirut: Da@r al-Jawa@d, 1984), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dari Abi Hurairah radiallahu ‘anhu berkata: Rasulullah SAW melarang meninggalkan penawaran barang (yang sedang ditawarkan orang lain dengan maksud menipu), dan melarang seorang pembeli apa yang dibeli (sedang ditawarkan) oleh saudaranya, dan melarang orang kota menjual untuk orang desa, melarang pula seseorang meminang (wanita) pinangan saudaranya dan melarang seorang wanita meminta suaminya agar menceraikan istri lainnya (madunya) dengan maksud periuknya sajalah yang dipenuhi (agar belanja dirinya lebih banyak)”.¹⁰⁵

لَا يَحِلُّ أَنْ تَنْكِحَ امْرَأَةً بَطْلَاقٍ أُخْرَى

“Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang mau menikah memberikan syarat mentalaq perempuan lain”.¹⁰⁶

Perlu diketahui bahwa wanita Arab sebelum Islam berhak menceraikan suaminya, atau menceraikan dirinya sendiri dari suaminya.¹⁰⁷ Adapun praktiknya ketika ada seorang perempuan memindah pintu perkemahan ke arah terbalik, seperti pintu kemah berada di arah timur maka dia mengubahnya ke arah barat, sehingga suaminya tidak bisa masuk. Ini menandakan bahwa istrinya telah menceraikan dirinya atau menceraikan dirinya sendiri dari suaminya. Sehingga persyaratan semacam ini sudah diharamkan dengan dalam Islam

2) Nikah Shigha@r

¹⁰⁵ Muslim, *S}ah}i}h}a Muslim Bish}arah} al-Nawawi@*, Juz. IX, , hlm. 288.

¹⁰⁶ *Musnad al-Imam Ah}mad Ibnu H}anbal*, Juz. II, hlm. 178

¹⁰⁷ Ahmad al-Shami, *al-Tat}owwur al-Ta@rikhi@ Li ‘uqu@d al-Zawa@j fi Isla@m*, (Mesir: Du@na Da@r, 1982, hlm. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian *shigha@r* menurut etimologi: *rafa'a ih}dai rijlaihi, ba@la aw lam yabul, shaghara al-kalbu* artinya: anjing mengangkat salah satu kakinya baik kencing atau tidak kencing *wa al-Rajulu wa al-Mar'atu shaghara@* : lelaki mengangkat kaki perempuan untuk dinikahi. *wa al-shigha@ru* adalah engkau mengawinkan laki-laki pada seorang perempuan dengan syarat dia mengawinkan kamu dengan perempuan lain tanpa ada mas kawin, masing-masing perempuan tadi imbalan atas yang lain.¹⁰⁸

Sedangkan secara terminologi nikah *shigha@r* adalah seorang lelaki menikahkan anak perempuan atau saudara perempuannya pada orang lain dengan syarat orang itu menikahkan anak perempuan atau saudara perempuannya dengan lelaki pertama. Demikian ini disebut tukar menukar, ada dua perempuan dinikahkan dengan dua lelaki dengan syarat mas kawin masing-masing berarti pernikahan yang lain.¹⁰⁹ Hukum nikah *shigha@r* menurut para ulama sepakat bahwa nikah tidak boleh, karena terdapat larangan dari menikah dengan macam ini.

3) Nikah *Muh}allil*

Secara etimologi: *H}allala, al-yami@n tah}li@lan, wa al-muh}allil: al-farasu al-tha@lithu fi al-riha@n*, sedangkan secara terminologi: *Mutazawwij al-mut}laqoh thala@than li tah}ulla li al-zauji al-awwal* :orang yang mengawini perempuan yang di talaq tiga tujuannya menghalalkan

¹⁰⁸ Al-Fairuzi@ Abadi, *al-Qamu@s al-Muhi@d*, (Beirut: Muassasah al-Risa@lah, 1996), hlm. 535.

¹⁰⁹ Muh}ammad ibn Fankhur al-'Abdali@, *al-Ankihah al-Mustahdisah wa hukmu al-shar'i fi ha@*, (al Ma'had al-'Ilmi , t.t), hlm, 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirinya untuk suami yang pertama, seorang perempuan ditalaq tiga maka haram bagi suami yang pertama lalu dia dikawin suami yang lain dengan tujuan menghalalkannya bagi suami yang pertama.¹¹⁰ Seperti dalam hadits Nabi Muhammad SAW.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ رِفَاعَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي فَبِتَ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقُ عُسَيْلَتَكَ.

*“Diriwayatkan dari Siti Aisyah beliau bersabda: Pernah istri Sahabat Rifa’ah datang kepada Rasulullah SAW. Lalu berkata: Dulu saya berada di sisi Rifa’ah lalu dia menceraiku dan membuat aku resah kemudian aku kawin dengan Abdurrahman Bin Zubair namun dia tidak memiliki rumbai kain sedikitpun”. Lalu Rasulullah SAW. Tersenyum seraya bersabda: apakah kamu ingin kembali kepelukan Rifa’ah? Tidak boleh, sebelum kamu merasakan madu kecil (jima’) Abdurrohman dan dia merasakan madu kecil (jima’) mu”.*¹¹¹

Maka ketika suami kedua menikahi perempuan tadi dengan pernikahan bahagia, lalu melakukan senggama dengan sesungguhnya sehingga masing-masing dapat merasakan madu pihak lawannya, kemudian dia bercerai atau meninggal dunia, maka halal bagi suami pertama menikahinya lagi setelah selesai masa iddah. Adapun hukum dari pernikahan muhallil adalah merupakan macam dosa besar dan perbuatan keji, Allah mengharamkan dan melaknat pelakunya.

¹¹⁰ Al-Fairuzi@ Abadi, al-Qamu@s al-Muhi@d, hlm. 249.

¹¹¹ Abu@ Zakariya Yahya al-Nawawi, Shahih Muslim ma’ Sharah} al-Nawawi, hlm. 652.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4) Nikah Mut'ah

Mutah berasal dari kata *mata'a*, *yamta'u*, *mat'an*, artinya kenikmatan atau kesenangan.¹¹² yaitu sesuatu yang dinikmati atau diberikan untuk dinikmati.¹¹³ Nikah mutah disebut juga kawin sementara (*mu'qqat*) atau kawin terputus (*munqati'*) yaitu akad pernikahan yang dibatasi dengan adanya waktu tertentu, sebab laki-laki yang mengawini perempuan itu hanya satu sehari, atau satu minggu atau satu bulan dan seterusnya.¹¹⁴

Menurut Ulama dari kalangan Suni Seperti Sayyid Sa'biq beliau menyatakan nikah mutah disebut juga nikah sementara atau nikah terputus, karena laki-laki menikahi seorang perempuan hanya untuk sehari atau seminggu atau sebulan. Dinamakan nikah mutah karena laki-laknya bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja.¹¹⁵

Adapun menurut Yu'suf Qardawi@ mendefinisikan nikah mutah dengan ikatan nikah antara seorang laki-laki dan perempuan, untuk suatu masa yang mereka sepakati bersama, dengan upah tertentu.¹¹⁶ Menurut 'Ali@ al-Sabuni@ beliau mengatakan bahwa nikah mutah adalah seorang laki-laki yang menyewa seorang wanita dengan memberikan mahar sampai waktu yang telah ditentukan atas kesepakatan bersama, yang telah dibatasi waktunya

¹¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 1344.

¹¹³ A.Syarafuddin al-Musawiy, *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syi'ah*, (terj.) Mukhlis (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 87.

¹¹⁴ 'Abd al-Rahman al-Jazi@ri@, *Kitab al-Fiqh 'alá Madhahib al-Arba'ah*, Juz IV, hlm. 90.

¹¹⁵ Sayyid Sa'biq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 35

¹¹⁶ Yusuf al Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, alih bahasa Wahid Ahmadi, Jasiman, Khozin Abu Faqih, Kamal Fauzi (Solo: Era Inter Media, 2003), hlm. 268.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik sebulan atau dua bulan, sehari atau dua hari kemudian dia ditinggalkan setelah batas waktunya habis.¹¹⁷ Sedangkan hukum terkait nikah Mut'ah menurut ulama ahlu sunnah pada saat ini hukumnya dilarang.

5) Nikah Misyar

Secara bahasa, *misyar* berasal dari kata *al-sairu* yang artinya pergi atau perjalanan. Kata ini menurut pakar bahasa mengandung pengertian *kathrah*, yakni terjadi dengan intensitas tinggi.¹¹⁸ Nama *al-misyar* adalah sebuah nama bagi pernikahan, dimana suami pergi ke tempat istrinya, bukan sebaliknya. Kata ini terambil dari ungkapan *yasi@ru al-shakhs}u 'ala@ fula@n* yang artinya seseorang pergi ke fulan untuk mengunjunginya dari waktu ke waktu. Pernikahan ini disebut misyar dikarenakan suamilah yang bertolak menuju tempat istri di waktu-waktu yang terpisah lagi sempit. Ia tidak berlama-lama tinggal bersama istrinya, bahkan seringkali suami tersebut tidak bermalam dan tidak menetap.

Menurut Abdullah bin Sulayma@n ibn Ma@ni', sisi perbedaan pernikahan ini dengan pernikahan umumnya adalah sang istri merelakan lepasnya hak pribadinya dalam pembagian hari dan nafkah. Ia juga merelakan sang suami mengunjungi dirinya di waktu-waktu yang longgar saja, kapan saja, siang atau malam.¹¹⁹

¹¹⁷ Muh}ammad 'Ali@ al-Sa@buni@, *Rawa@'i' al-Baya@n fi Tafsir @Aya@t al-Ahka@m min al-Qur'an*, (Beirut: Da@r al-Fikr), 1996), hlm. 361.

¹¹⁸ Ibnu Manz}ur, *Lisa@n al Arab*, hlm. 389.

¹¹⁹ Abdullah bin Sulayman bin Ma@ni', *al-Hukm al-Zawaj*, fatwa beliau yang dimuat dalam *majalah al-Dakwah*, edisi 1843, 11 Rabi'ul Awwal 1423 H, hlm. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum nikah misyar. Dalam hal ini setidaknya terdapat dua kelompok ulama yang memiliki pandangan hukum yang berbeda, yaitu: Pertama, kelompok yang membolehkan nikah misyar. Mayoritas ulama kontemporer yang telah mengeluarkan fatwa tentang masalah nikah misyar memandang bahwa nikah misyar merupakan pernikahan shar'i yang sah hukumnya. Kendatipun sebagian mereka yang membolehkan nikah misyar menegaskan bukan sebagai penganjur pernikahan seperti ini, sedangkan sebagian lagi menyatakan bahwa hukumnya makruh, meskipun sah. Dengan demikian hukum-hukum sebagai konsekwensi pernikahan tersebut berlaku, begitu pula dampak-dampaknya. Karena pencabutan istri terhadap sebagian haknya dan pengajuan hal itu sebagai syarat dalam pernikahan tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan, selama pernikahan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan persyaratan-persyaratannya.

Pertama, di antara ulama yang membolehkan nikah misyar adalah Shaykh 'Abd al-'Aziz ibn Ba@z, Shaykh 'Abd al-'Aziz Alu al-Shaykh (Mufti Kerajaan Arab Saudi saat ini), Yu@suf al-Qard}awi@, Syeikh'A Wahbah Zuhayli,¹²⁰ Ah}mad al-H}ajj al-Kurdi, Shaykh Su'ud al-Shuraym (imam dan khatib Masjid al- Haram), Shaykh Yu@suf al-Duraywish, dan beberapa ulama lainnya.¹²¹

Menurut al-Qard}awi, pernikahan misyar dibolehkan karena sebagaimana pernikahan *da'im* (pernikahan konvensional), nikah misyar juga

¹²⁰ Wahbah Zuhayl@i, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, hlm. 134-135.

¹²¹ Yu@suf al-Duraywish, *al-Zawa@j al- 'Urf*, (Riyad}: Da@r al-Asimah, t.t.), hlm.138-139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewujudkan mas}lah}at syari'at, dimana pasangan suami istri mendapatkan kepuasan batin. Juga adanya kehidupan keluarga yang dibangun atas dasar kemuliaan. Secara hukum, nikah misyar sah adanya, karena memenuhi semua rukun dan syarat nikah yang sah. Di mana ada ijab dan qabul, saling meridhai antara kedua mempelai, wali, saksi, kedua mempelai sepadan, ada mahar yang disepakati. Setelah akad nikah keduanya resmi menjadi suami istri. Suami istri yang di kemudian hari punya hak. Hak keturunan, hak waris, hak iddah, hak talaq, hak meniduri, hak tempat tinggal, hak biaya hidup, dan lain sebagainya. Yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri. Hanya saja, keduanya saling meridhai dan sepakat, bahwa tidak ada tuntutan bagi istri terhadap suami untuk tinggal bersama istrinya, juga hak berbagi hari giliran. Sebab semuanya tergantung kepada suami. Kapan saja suami mau menziarahi istrinya, maka dia akan menjumpainya disembarang jam, siang maupun malam.¹²²

Al-Qard}awi menyatakan bahwa nikah misyar menjadi solusi bagi perempuan-perempuan yang tidak bersuami, perawan-perawan yang telah lewat masa nikahnya, tentunya dengan memilih laki-laki yang benar-benar baik budi pekertinya, dan antara kedua pihak telah sama-sama ridha. Maka tidak sepatutnya orang menghalangi jalan yang dihalalkan oleh shara'. Namun demikian, al-Qard}awi menegaskan bahwa dirinya bukanlah sebagai orang yang menyukai dan menganjurkan pernikahan misyar.

¹²² Yu@suf al-Qard}awi@, *Ha@dy al-Isla@m Fata@wi Mu 'a@sirah*, (t.kt: Da@r al-Qalam, 1421 H), hlm. 401.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, kelompok yang mengharamkan nikah misyar. Sejumlah ulama kontemporer mengharamkan pernikahan misyar, di antara nama-nama mereka adalah Na@shir al-Di@n al-Alba@ni@, Muh}ammad al-Zuhayli, ‘Ahim Fa@dhil. Di antara argumen mereka adalah lantaran menonjolnya upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan semacam ini. Karena itu ia merupakan jalan kerusakan dan perbuatan kemunkaran. Orang-orang yang sudah rusak pribadinya bisa saja menjadikannya sebagai tunggangan untuk merealisasikan tujuan mereka. Sebab segala sesuatu yang menyeret kepada perkara haram, maka hukumnya juga diharamkan. Larangan ini juga ditunjukkan untuk kepentingan mengatur umat manusia. Dampak-dampak buruk ini dapat dipastikan timbul, dan biasanya menjadi kenyataan, bukan sekedar dalam batas prediksi prediksi, khayalan belaka, maupun kejadian-kejadian yang bersifat dadakan maupun jarang terjadi.¹²³

Selain itu para ulama di atas juga berpendapat bahwa pernikahan misyar tidak mewujudkan orientasi-orientasi pernikahan, seperti hidup bersama, meretas jalinan kasih sayang, cita-cita memiliki keturunan dan perhatian terhadap istri dan anak-anak, serta tidak adanya keadilan di hadapan istri-istri. Terlebih lagi, adanya unsur penghinaan terhadap kaum wanita dan terkadang mengandung muatan untuk menggugurkan hak istri atas pemenuhan kebutuhan biologis, nafkah, dan lain-lain.¹²⁴

Adapun ulama kontemporer yang termasuk kelompok yang mengharamkan nikah misyar adalah Syeikh Na@shir al-Di@n al-Alba@ni.

¹²³ Usa@mah al-Asyqar, *Mustajida@t al-Fiqihiyah fi Qad}a@ya@ al-Zawa@j wa al-T}ala@q*, (Damaskus: Da@r al-‘Ilmiyah, 1422 H), hlm. 125.

¹²⁴ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama lain yang juga mengharamkan nikah misyar adalah Syeikh ‘Abd al-Satta@r al-Juba@li@. Beliau berargumen bahwa nikah misyar menyebabkan suami tidak punya rasa tanggung jawab keluarga. Akibatnya, suami akan dengan mudah menceraikan istrinya, semudah dia menikah. Belum lagi praktek nikah misyar yang lebih banyak dilakukan secara diam-diam, tanpa wali. Semua ini akan menjadikan akad nikah menjadi bahan permainan oleh orang-orang pengagum seks dan pecinta wanita. Karena tak ada tujuan lain, selain agar nafsu seks-nya terpenuhi tanpa ada tanggung jawab sedikitpun. Belum lagi anak-anak yang terlahir nantinya, akan merasa asing dengan bapaknya, karena jarang dikunjungi. Dan hal ini akan memperburuk pendidikan dan akhlak anak-anak. Juga, salah satu pendapat dalam mazhab Sha@fi’i@ mengatakan tidak sahnya akad nikah bila disyaratkan gugur nafkah dan tempat tinggal.¹²⁵

b. Bentuk Syarat yang diperbolehkan dalam Akad Nikah

Seorang istri boleh memberi syarat kepada laki-laki yang akan menikahinya dengan beberapa persyaratan untuk pernikahannya. Apabila persyaratan yang dibuat mendukung dan menguatkan pernikahannya, seperti istri memberi syarat pemberian nafkah kepadanya dan bersenggama (jima’). Syarat seperti ini menjadi asas akad dan tidak terdapat perselisihan. Namun apabila syaratnya merupakan perkara yang merusak akad, seperti si istri tidak memberi keluasan suami untuk menggaulinya.

¹²⁵ Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari’ah*, Jurnal Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November 2013, hlm. 207-232.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga persyaratan yang dibuat bertentangan dengan tujuan pernikahannya maka tidak wajib dipenuhi. Sebagaimana ketika istri memberi syarat yang tidak mengharamkan perkara halal dan tidak menghalalkan perkara haram, seperti syarat berkunjung pada keluarganya atau tidak boleh dibawa keluar dari negaranya, maka baginya syarat tersebut dan wajib dipenuhi oleh suaminya, bila tidak dipenuhi, maka istri berhak mengajukan *fasakh*. Dengan demikian pada pembahasan ini akan dijelaskan dua macam syarat, *pertama* syarat tidak poligami, dan *kedua* syarat istri bekerja.

b. Syarat Tidak Berpoligami

Poligami merupakan salah satu hak dari beberapa hak seorang laki-laki yang diberi Allah SWT. Sehingga ada pepatah mengatakan:

تَعْدُدُ الزَّوْجَاتِ هُوَ كَالْتَّاجِ عَلَى قُلُوبِ الرِّجَالِ وَكَالْتَّارِ عَلَى قُلُوبِ النِّسَاءِ

“Poligami itu bagaikan salju di atas hati para lelaki dan ibarat api dalam hati perempuan”.

Karena poligami ibarat api dalam hati perempuan, maka diberikan kebebasan bagi perempuan untuk memberi syarat tidak dipoligami dalam akad nikah. Ada dua alasan yang menjadikan dasar perempuan untuk tidak dipoligami penolakan perempuan untuk dipoligami diantaranya faktor pendidikan dan Psikokogis. Pendapat ulama mengenai syarat tidak di poligami diantaranya:

Maka ulama berpendapat bahwa akad nikahnya tetap sah tetapi syarat-syarat tersebut tidak berlaku dan suaminya tidak harus memenuhinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat ini dianut oleh mazhab Sha@fi'i@.¹²⁶ Adapun dasar yang digunakan adalah “*al muslimu@na ‘ala@ shuru@t}ihim illa Shart} an ah{alla h}ara@man aw h}arrama h{ala@la*”.¹²⁷ Mereka berpendapat syarat-syarat di atas dianggap mengharamkan yang halal seperti syarat tidak boleh kawin (poligami) atau tidak boleh berpergian bersama isteri, padahal kedua hal tersebut adalah halal.

Kemudian segolongan ulama lain berpendapat bahwa syarat di atas, wajib dipenuhi oleh suami, jika tidak dipenuhi maka isteri berhak minta *fasakh*. Adapun dasar hadits yang digunakan “*Inna ah}aqqa al Shuru@t} an tuwaffá ma istah{laltum bihi al furu@j*”.¹²⁸ Ibnu Taimiyah berpendapat wajibnya bagi suami untuk syarat tidak dimadu yang diajukan oleh istri. Ibnu Taimiyah memandang bahwa syarat tersebut sah dan harus dipenuhi oleh suami selama pasangan tersebut tidak membatalkan persyaratan tersebut.

مَسْأَلَةٌ: فِي شُرُوطِ النِّكَاحِ مَنْ شَرَطَ أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ عَلَى الرَّوْجَةِ وَلَا يَخْرُجُهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا، فَإِذَا شَرَطَتْ عَلَى الزَّوْجِ قَبْلَ الْعَقْدِ وَاتَّفَقَا عَلَيْهَا وَخَلَا الْعَقْدُ عَنْ ذِكْرِهَا، هَلْ تَكُونُ صَحِيحَةً

¹²⁶ Wahbah al-Zuhaili>, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, hlm. 46-47.

¹²⁷ Hadits ini diriwayatkan oleh Abi@ ‘Abdullah Muh{ammad bin Isma@il al-Bukha@ri@, *al-Ja@mi’ al-S{ah{i@h*, Juz. II, hlm. 135. Abi@ Da@wud Sulaiman Ibnu al-ush’ath al-Sijista@ni@ al-uzdi@, *Sunan Abi@ Da@wud*, Juz. IV, hlm. 16, (Hadits No: 3594), Sunan al-Tirmidhi@ Abi I@sa@ Muh{ammad ibnu I@sa@ Ibnu Su@rah, *Al-Ja@mi Al-S{ah{i@h*, Sunan al-Tirmidzi@, Juz. III, hlm. 626. (Hadits No: 1352), Hadits ini menurut Abu Isa Hasan Shahih. Abi@ Bakr Ahmad Ibnu al-Husain Ibnu Ali@ al-Baihaqi@, *Sunan al-Kubra*, Juz. VIII, hlm. 131 dan 275. (Hadits No: 11429 dan 11929).

¹²⁸ Hadits ini diriwayatkan oleh Abi@ ‘Abdullah Muh{ammad bin Isma@il al-Bukha@ri@, *al-Ja@mi’ al-S{ah{i@h*, Juz. II, hlm. 276. Abu@ Zakariya Yahya al-Nawawi, *S{ah{i@h}a Muslim Bish}arah{ al-Nawawi@*, Juz. IX, , hlm. 288. *Musnad al-Imam Ah}mad Ibnu H}anbal*, Juz. IV, hlm. 144, 150 dan 151. Abdulla@h Ibnu Abdurah}ma@n al-Dara@mi@ al-Samarqandi@, *Sunan al-Dara@mi*, Juz. II, hlm. 191, Abi@ Da@wud Sulaiman Ibnu al-ush’ath al-Sijista@ni@ al-uzdi@, *Sunan Abi@ Da@wud*, Juz. II, hlm. 417, Sunan al-Tirmidhi@ Abi I@sa@ Muh{ammad ibnu I@sa@ Ibnu Su@rah, *Al-Ja@mi Al-S{ah{i@h*, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz. III, hlm. 425. Imam Nasa@i Ah}mad Ibnu Ali Ibnu Shu’aib, *Sunan Al-Nasa@i@*, Juz. VI, hlm. 400-401. dan Abi@ Abdulla@h Muh{ammad Ibnu Yazid al-Qazawi@ni@, *Sunan Ibnu Ma@jah*, Juz. III, hlm. 375.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

لَا زِمَةَ لَا زِمَةَ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا كَالْمُقَارَنَةِ أَوْ لَا؟ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَعَمْ تَكُونُ صَحِيحَةً لَا زِمَةَ إِذَا لَمْ يُبْطَلْهَا
حَتَّى لَوْ قَارَنْتَ عَقْدَ الْعَقْدِ

“Masalah: mengenai syarat dalam pernikahanm bahwasanya seorang istri mensyaratkan agar suami tidak boleh poligami atau tidak boleh mengeluarkan dari rumahnya atau negaranya, maka apabila suami mensyaratkan seperti itu sebelum akad dan mereka berdua sepakat terhadap syarat tersebut, namun tidak disebutkan dalam akad nikah, apakah syarat tersebut sah dan wajib dipenuhi oleh suami? Jawab: segala puji bagi Allah. Syarat tersebut sah dan wajib dipenuhi selam keduanya tida membatalkannya walaupun disertakan lagi dalam akad nikah”.¹²⁹

Dalam hal syarat tidak dimadu yang diajukan oleh pihak istri dalam perjanjian perkawinan ini merupakan syarat yang mengikat kemerdekaan suami. Pendapat ini diambil dari pendapat Umar, Mua'wiyah, Sa'ad ibn Abi@ Waqsh dan Amr ibn al- Ash dari kalangan para sahabat dan tidak diketahui ada yang menentangnya pada zaman mereka, maka hal ini merupakan Ijma'. Sedangkan Ibn Quda@mah berpendapat:

وَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَلَهَا فِرَاقُهُ إِذَا تَزَوَّجَ عَلَيْهَا

“Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dan disyaratkan dalam akad oleh laki-laki (suami) kepada perempuan (istri) untuk tidak memadunya maka hak perempuan tersebut meminta cerai (fasakh) bila suami menikah lagi”.¹³⁰

Mereka berpendapat bahwa syarat-syarat di atas dianggap mengharamkan yang halal, seperti kawin lagi (poligami) dan bepergian kedua

¹²⁹ Ibid,

¹³⁰ Ibnu Quda@mah, *al-Mughni@*, Juz. VII, hlm. 447.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

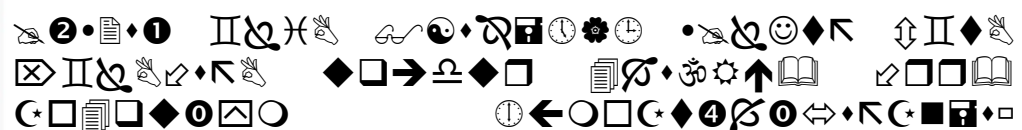
hal itu adalah halal.¹³¹ Sebagian ulama lainnya. H}ambaliyah mewajibkan dipenuhinya syara-syarat terhadap wanita. Apabila tidak dipenuhi maka perkawinannya dapat difasakhkan.¹³²

Pendapat yang mengatakan syarat tidak berpoligami dalam akad nikah dianggap mengharamkan yang halal terbantah, sebab syarat itu tidak mengharamkan yang halal tetapi memberikan pilihan bagi si perempuan untuk minta *fasakh* apabila syarat itu tidak dipenuhi.

Di dalam kitab *al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah, disebutkan bahwa ada syarat yang manfaatnya kembali kepada isteri, maka syarat itu harus dipenuhi oleh suami, misalnya isteri tidak akan diusir dari kampungnya atau negaranya, tidak bepergian bersama isteri, tidak akan kawin lagi dan tidak akan menyakitinya. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi suami, maka perempuan (isteri) dapat minta *fasakh* terhadap suaminya.

c. Syarat Istri Bekerja

Syarat ini dianggap dari bagian syarat yang cocok pada tuntutan akad nikah dan tidak bertentangan, artinya syarat ini menyatakan mas}lah}ah bagi istri. Syari'at Islam telah melegalkan seorang perempuan bekerja bila didorong oleh kebutuhan. Diantara penjelasan al-Qur'an terkait seorang istri memiliki hak dalam bekerja, seperti dalam Surat An-Nahl: 97:



¹³¹ Sayyid Sa@biq, *Fiqh al-Sunnah*, Cet. Ke 4, him. 206.

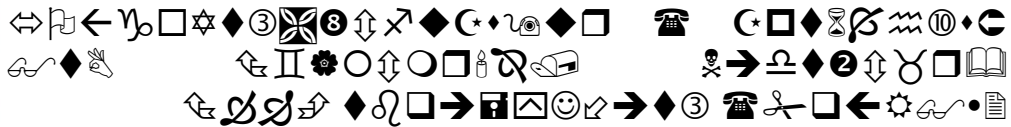
¹³² Ibnu Quda@mah, *al-Mughni@*, Juz. VII, hlm. 448.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.¹³³ (QS. An-Nahl: 97)

Maka bila seorang istri memberi syarat atas suaminya ketika akad agar tidak dicegah untuk tetap bekerja, atau agar dirinya bekerja dan suaminya diam, maka Ulama fiqih berbeda pendapat tentang sah memenuhi syarat ini, atas beberapa pendapat:

- Maka Mazhab H}anafi menilai bahwa syarat ini rusak, sia-sia namun akadnya sah, dan bagi suaminya boleh mencegahnya bekerja. Bila istrinya tetap tidak mau dilarang maka dia *nusyuz* (durhaka);
- Menurut Mazhab Ma@liki memandang syarat ini sah, akan tetapi makruh dan tidak wajib dipenuhi bahkan sunnah. Selanjutnya bagi suami boleh mencegah istrinya dari bekerja, sehingga bila dia tetap tidak mau dicegah maka dia durhaka;¹³⁴
- Pendapat Mazhab Sha@fi'i@ syarat seperti ini tidak ada harganya, karena bekerja dapat menyebabkan seorang istri keluar rumah tanpa seizin suaminya sehingga mengakibatkan istri durhaka;
- Mazhab H}ambali berpendapat bahwa syarat ini menetap pada suami dan wajib dipenuhi, dan tidak berhak mencegahnya bekerja. Apabila suami

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 917.

¹³⁴Ali@ Muh}ammad 'Ali@ Qa@sim, *Nushuz al-Zaujah*, (Iskandariyah: Da@r al-Ja@mi'ah al-Jadi@dah, 2004), hlm 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ingin mencegahnya dan istri tetap menolak maka dia tidak durhaka, karena syarat ini tidak merusak ketaatan yang wajib atas istri.¹³⁵

Sesungguhnya yang unggul dari beberapa pendapat ini bahwa syarat ini tidak wajib dipenuhi. Karena syari'at Islam telah memberi hak keadilan bagi suami dan istri wajib taat pada suami. Seperti wajibnya nafkah wajib atas suami bukan istri. sebagaimana bila Syari'at telah memperbolehkan bagi istri bekerja maka wajib pekerjaannya diatur dan tidak besebrangan dengan dasar-dasar Syari'at Islam.

Peraturan Negara Al-Jazair mengatakan dalam pasal 19 Undang-Undang Rumah Tangga; seorang istri diperbolehkan memberi syarat atas suaminya ketika menetapkan akad nikah untuk keluar rumah guna bekerja, apabila pihak suami merusak syarat ini dapat menjadikan seorang istri berhak menuntut cerai, sesuai keterangan pasal 53 nomor 09.¹³⁶

Hanya saja disana terdapat pengecualian, seorang suami boleh mencegah istrinya bekerja dalam dua keadaan:

- a) Istri sewenang-wenang dalam menggunakan haknya keluar rumah untuk bekerja, seperti menpertontonkan perhiasan atau berdandan yang bisa menimbulkan fitnah atau sering keluar rumah tanpa alasan yang nyata;
- b) Bertentangan antara keluarnya istri untuk bekerja dengan kepentingan keluarga.¹³⁷

¹³⁵ Mah}fu@z} ibn Shaghi@r, *al-Ijtiha@d al-Qad}a@'i fi al-Fiqh al-Isla@mi@ wa Tat}bi@qa@tihi@ fi Qa@nu@n al-Usrah al-Jaza@ir Risa@lah Duku@roh*, (Kuliyah al-'Ulu@m al-Ijtima@'iyah wa al-'Ulu@m al-Isla@miyah, al-Ja@miah al-H}ajj li H}ud}u@r, Ba@t}inah, 2009, hlm. 467-468.

¹³⁶ ibid

¹³⁷ Yu@suf Mas'u@di@, *al-Isht}ira@t fi al-'Aqd al-Zawa@j fi Qa@nun*, hlm. 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ini sesungguhnya syarat ini sah selama pekerjaannya sesuai peraturan atau hak ini tidak bertentangan dengan tugas istri dalam berumah tangga, karena pada dasarnya istri harus menetap di rumah dan melaksanakan tugas-tugas di rumahnya.

d. Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Ulama Kontemporer

Istilah perjanjian perkawinan (*al-mi@tha@@q al-zauji@yah*) menurut ulama kontemporer dapat kita temukan dalam kitab *Nah}w Us}u@l Jadi@dah Li al-Fiqih al-Isl@mi@ al-Mar'ah* karya Shahr@r, yang diambil dalam pemahaman ijtihad dari surat An-Nisa ayat: 20-21: yang dikaji dengan menggunakan pendekatan teori hudud.¹³⁸

Teori hudud merupakan teori baru dalam hukum Islam yang memandang bahwa syari'at Allah sesungguhnya hanyalah syari'at yang berupa batasan-batasan (*h}udud*) dan bukan syari'at yang kongkret (*'ayni*).¹³⁹ Oleh karena itu, manusia bertugas menemukan *h}udud* Allah dalam ayat-ayat *Umm al-Kita@b*,¹⁴⁰ kemudia *h}udud* Allah itu ditemukan, ia harus membentuk hukumnya sendiri sesuai dengan realitas, namun tidak

¹³⁸ Menurut Syahrur sebuah paradigma hukum yang meyakini bahwa hukum yang tertera dalam wahyu itu adalah hukum yang bersifat batasan (limitatif). Dengan demikian, manusia dipersilahkan untuk berijtihad menciptakan hukumnya sendiri adal tidak menyalahi batasan itu.

¹³⁹ Sebuah paradigma hukum yang meyakini bahwa hukum yang tertera dalam wahyu adalah hukum yang menyatakan definitive, bukan hukum yang bersifat batasan (limitatif).

¹⁴⁰ Bagian dari Al-Kitab yang berisi tentang persoalan ibadah, prilaku moral, dan hukum. Shahrur juga menyebut Umm Al-Kitab ini dengan nama ayat muhkamāt atau risālāh. Ayat ini sifatnya dinamis, historis, dan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, serta subjektif dan terkait dengan ilmu-ilmu kemasyarakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

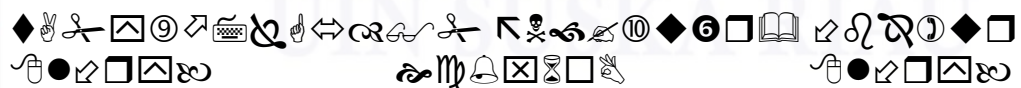
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperkenankan menyalahi atau melampaui h}udud Allah tersebut. Teori h}udud merupakan perangkat ijtihad baru yang dicetuskan Shahrur guna mewujudkan hukum Islam modern yang dinamis, fleksibel, dan relevan dengan tuntutan realitas.¹⁴¹

Teori Shahrur ini, menurut Wael B. Hallaq, merupakan pemikiran yang amat kontroversial di Timur Tengah masa sekarang. Teorinya itu sangat dipengaruhi oleh pendidikannya sebagai sarjana teknik. Dalam membaca kembali al-Qur'an dan as-Sunnah ia menggunakan teori-teori sains, khususnya matematika dan fisika. Pemikirannya itu merupakan sebuah kontribusi unik bagi penafsir kembali al-Qur'an dan as-Sunnah khususnya,¹⁴² dan hukum sebagai sebuah sistem komprehensif pada umumnya.¹⁴³

Terlepas dari pertentangan di atas, h}udud adalah sebuah paradigma hukum yang meyakini bahwa hukum yang tertera dalam wahyu adalah hukum yang bersifat batasan (*limitatif*). Dengan demikian, manusia dipersilahkan untuk berijtihad menciptakan hukumnya sendiri dengan tanpa meyalahi batasan yang telah ditentukan.¹⁴⁴

Perjanjian perkawinan (*al-mi@tha@q al-zauji@yah*) terdapat firman Allah dalam al-Qur'an Surat An-Nisa: 20-21.¹⁴⁵



¹⁴¹ Muh}ammad Shahrur, *al-Kita@b wa al-Qur'an Qira@'ah*,

¹⁴² Hasil kreativitas mujtahid pertama (Muhammad Saw) dalam mengaplikasikan Islam mutlak untuk zamannya, bukan untuk semua zaman.

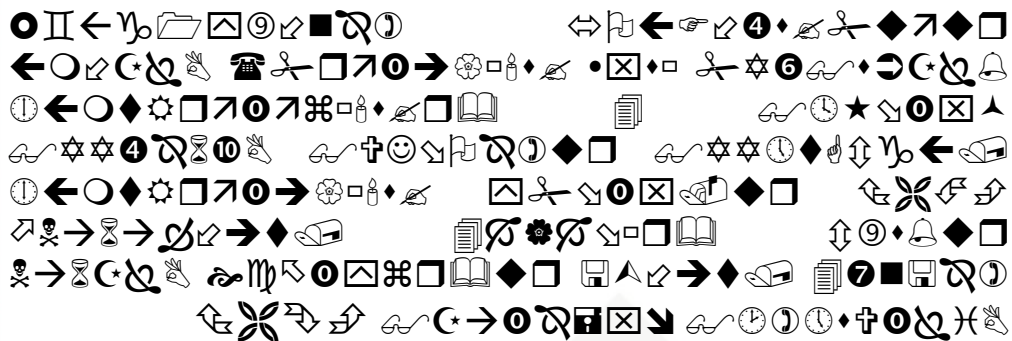
¹⁴³ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theorie,s* (Cambridge University Press) terj A. Malthuf Siroj, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 73.

¹⁴⁴ Muh}ammad Shahrur, *Nah}w Us}u@l Jadi@dah Li al-Fiqih*, hlm. 309

¹⁴⁵ Ibid, hlm. 309

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”. (QS. An-Nisa: 20-21)¹⁴⁶

Dalam ayat diatas tampak, bahwa dalam perkawinan terdapat perjanjian yang kuat diambil oleh para istri dan suami mereka, dan tidak terdapat dalam posisi *milk al-yami@n*. Dari firman *istibda@la zawjin ma@ka@na zawjin* pada potongan ayat di atas, kami memahami bahwa isteri hanyalah seorang saja dan bahwa perkawinan yang kedua hanya terwujud setelah menceraikan yang pertama, sejalan dengan ayat pologami dalam surat An-Nisa ayat 3 yang memerintahkan untuk menikahi para janda karena anak-anak yatim mereka, sehingga dalam kondisi demikian, janda tersebut menjadi isteri kedua karena keberadaan anak-anak dan keluarga. Lalu apakah perjanjian yang kuat (*al-Mi@tha@q al-Ghali@z}a*) itu.

¹⁴⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata *al-mi@tha@q* dalam Al-Qur'an surat An-nisa: 20-21 diatas berasal dari kata dasar *watha@q*. Dalam kata dasar ini juga muncul kata *al-thiqah*, *al-watha@qah*, *al-watha@q*, dan *al-tauthiq*. Ketika terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak atas dasar kepercayaan, maka itulah disebut dengan *al-mi@tha@q*, akan tetapi jika terjadi kesepakatan atas dasar keterpaksaan dan pemaksaan, maka itu disebut dengan *al-watha@q*, seperti terdapat dalam al-Qur'an surat al-Fajr: 25-26.



“Maka pada hari itu tiada seorangpun yang menyiksa seperti siksa-Nya. Dan tiada seorangpun yang mengikat seperti ikatan-Nya (*wathaqahu*)”.¹⁴⁷ (Q.S. al-Fajr: 25-26)

Perjanjian tersebut telah membingkai kehidupan sosial-kemasyarakatan bersama bagi seorang suami istri secara khusus, dan keluarga secara umum. *al-mi@tha@q* adalah perjanjian dengan Allah melalui sumpah, seperti dalam al-Qur'an surat Ar-Ra'd: 20:



“(yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian (*al-mithaq*)”.¹⁴⁸ (Q.S. Ar Ra'd: 20)¹⁴⁹

¹⁴⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 372.

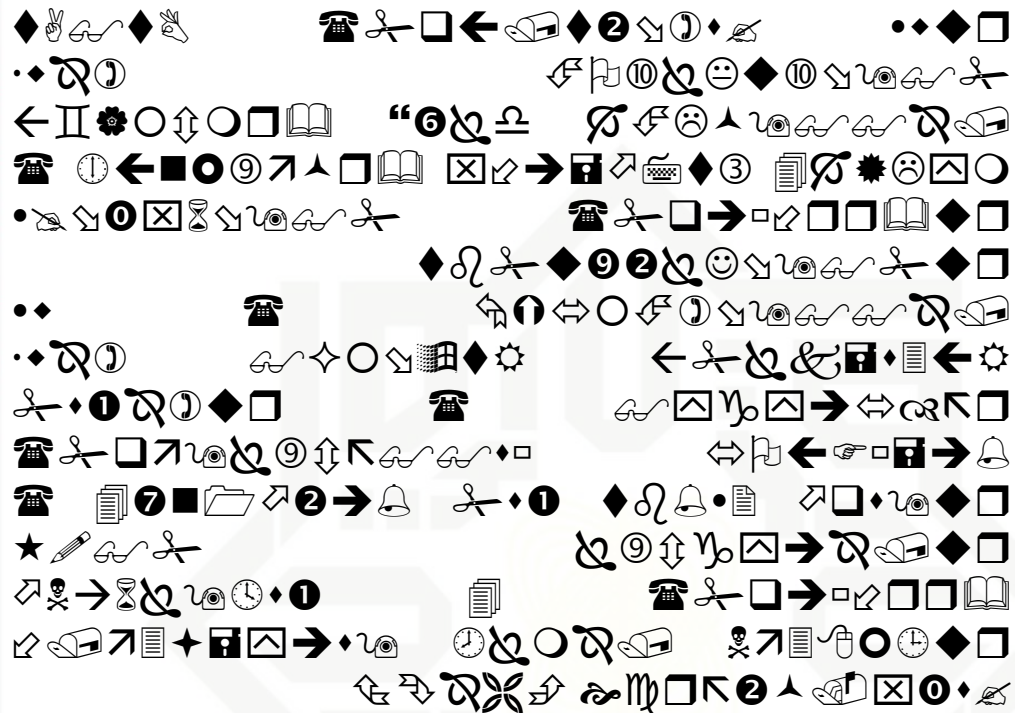
¹⁴⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah* hlm. 1059.

¹⁴⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah* hlm. 372.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari sudut pandang demikian, maka *al-mi@tha@q* adalah termasuk salah satu wasiat sepuluh yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-An'am: 152:



“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.¹⁵⁰ (Q.S. al-An'am: 152)¹⁵¹

Sehingga *al-Mi@tha@q al-Ghali@z}a* yang diambil oleh kedua belah pihak suami istri tersebut adalah janji kepada Allah untuk menunaikannya, dan ia telah membingkai 98% dalam kehidupannya bersama diantara kedua suami istri, dan mengandung aspek-aspek kemanusiaan dan kemasyarakatan selama menempuh kehidupan bersama.

¹⁵⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 214.

¹⁵¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 214.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam aqad nikah terdapat orang tua (*wali, asil*) dan seorang wakil, salah satu kebudayaan Arab yang telah berubah menjadi sunnah nabi adalah adanya wali bagi seorang perempuan. Adapun dalam *al-mi@tha@q*, maka tidaklah terdapat orang tua (*asil*) atau seorang wakil, dan seorang perempuan dan laki-laki mengambil *al-mi@tha@q* dengan diri mereka masing-masing. Hal ini menggugurkan pemahaman perwakilan dan perwalian yang merupakan kebudayaan historis yang bisa diabaikan.¹⁵²

Dari penjelasan diatas terkait perjanjian perkawinan dalam Islam yang dijelaskan menurut ulama mazhab maupun ulama kontemporer, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perjanjian perkawinan dalam Islam adalah seorang istri atau suami boleh memberi persyaratan kepada pasangannya persyaratan dengan catatan persyaratan yang dibuat oleh kedua belah pihak memiliki tujuan untuk menguatkan ikatan perkawinan dan ada kemaslahatan didalamnya.

Adanya kebebasan mengenai materi yang diperjanjikan, tapi dengan batas-batas tidak bertentangan dengan aturan syariat. Kebebasan yang dimaksud disini adalah sesuai dengan kebutuhan pasangan dalam rangka membangun keluarga *saki@nah, mawaddah, dan rah}mah* kedepannya dengan menggunakan prinsip *al-Mi@tha@q al-Ghali@z}a*. Sehingga bisa dikatakan perjanjian perkawinan dalam Islam memiliki unsur penguatan perkawinan dalam membangun keluarga. Namun apabila salah satu pasangan

¹⁵² Muh}ammad Shahru@r, *Nah}w Us}u@l Jadi@dah Li al-Fiqih al-Isl@ami@ al-Mar'ah, hlm. 311.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada yang tidak menepati janji, akibat hukum yang adalah salah satu pasangan boleh mengajukan *fasakh nikah*.

c. Hukum Perjanjian perkawinan dalam hukum Positif Indonesia

1. Perjanjian Perkawinan dalam Legislasi di Indonesia

Secara etimologi, *legislasi* diambil dari bahasa Inggris, yaitu *legislation* yang berarti perundang-undangan. Sedangkan lembaganya disebut *legislatif*, yaitu lembaga yang diberikan wewenang oleh negara dalam membuat undang-undang. Bila dilihat dari struktur orignal bahasa Inggris, maka *legislation* berasal dari kata kerja *to legislate*, yang berarti *to make law* atau membauat undang-undang.¹⁵³ Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *legislasi* berarti pembuat undang-undang.¹⁵⁴

Dilihat dari fungsinya, *legislasi* terdiri dari empat bentuk kegiatan. *Pertama*, prakarsa pembuat undang-undang (*legislative initation*), *kedua*, pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*), *ketiga*, persetujuan atas pengesahanan rancangan undang-undang (*law enactment approval*), dan *keempat*, pemberian persetujuan pengikat atau ratifikasi atas mengikat lainnya (*biding decision documents*).¹⁵⁵

Prisnsipnya, fungsi parlemen dengan program legislasinya zaman modern kini berkaitan dengan fungsi perwakilan, yaitu pertama untuk mewakili kepentingan rakyat. Selanjutnya adalah fungsi permusyawaratan, untuk

¹⁵³ Jonnthan Crowter (Ed), *Oxford Advanced Learners Dictionary*, (Oxford: Oxford University Press, 1995), hlm. 213.

¹⁵⁴ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 314.

¹⁵⁵ Jimly Asshiddqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2011), hlm. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan dan mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. Berdasarkan terminologi hukum di Indonesia, parlemen sering disebut dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).¹⁵⁶

Dari produk legislasi di Indonesia, terdapat 3 (tiga) produk peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka di negara Indonesia telah terjadi unifikasi¹⁵⁷ dalam bidang Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan.¹⁵⁸

Perjanjian perkawinan telah diatur secara eksplisit dalam Hukum perkawinan di Indonesia. Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata “*huwelijksvoorwaarden*” yang ada dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW).¹⁵⁹ Istilah ini terdapat dalam KUHPerdata,¹⁶⁰ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan¹⁶¹ dan Kompilasi Hukum Islam

¹⁵⁶ Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1986), hlm. 173.

¹⁵⁷ Suatu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa disuatu wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional di negara tersebut.

¹⁵⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hlm. 3.

¹⁵⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum*, hlm. 37.

¹⁶⁰ KUHPerdata, BAB VII dan BAB VIII Pasal 139-185.

¹⁶¹ Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, BAB V Pasal 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(KHI).¹⁶² *Huwlijk* sendiri menurut bahasa berarti perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan *voorwaard* berarti syarat.¹⁶³

Meskipun sudah diatur oleh undang-undang perkawinan di Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia masih menganggap tabu terhadap praktik pembuatan perjanjian perkawinan. Karena banyak masyarakat menganggap inti dari pada perjanjian perkawinan ialah perjanjian mengenai harta perkawinan mereka kelak setelah menikah.

a) Perjanjian Perkawinan dalam kitab *Burgerlijk Wetboek* (BW)

Sebelum terlalu luas membahas mengenai perjanjian perkawinan, terlebih dahulu kita pahami konsep perjanjian dalam KHUPerdata di Indonesia. Definisi perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ada beberapa pendapat menurut para ahli hukum mengenai definisi perjanjian yang berkembang di Indonesia.

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu *peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal*.¹⁶⁴

R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah *suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*.¹⁶⁵

¹⁶² Kompilasi Hukum Islam (KHI), BAB VII Pasal 45-52.

¹⁶³ Martias Gelar Imam Radjo Mulono, *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1982), hlm. 107.

¹⁶⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum*, hlm. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sudikno Martokusumo, mengartikan perjanjian, yaitu *suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang*.¹⁶⁶

Sedangkan Wierjono Rodjodikoro, mengartikan perjanjian yaitu *suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut*.¹⁶⁷

Dari pendapat-pendapat di atas, maka pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak. Sehingga perbuatan yang dapat dikatakan perjanjian ini harus mengandung unsur :

- a. Perbuatan, penggunaan kata “*Perbuatan*” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;
- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling

¹⁶⁵ R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hlm. 49.

¹⁶⁶ Wirjono Rodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mazdar Madju, 2000), hlm. 4.

¹⁶⁷ Ibid, hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok atau pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum;

- c. Mengikatkan dirinya, di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat.¹⁶⁸

Setelah subjek hukum dalam perjanjian telah jelas, termasuk mengenai kewenangan hukum masing-masing pihak, maka pembuat perjanjian harus menguasai materi atas perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak. Dua hal paling penting dalam perjanjian adalah objek dan hakikat daripada perjanjian serta syarat-syarat atau ketentuan yang disepakati.

Sedangkan mengenai perjanjian perkawinan dalam pembahasan KUHPerdara tidak didapati definisi tentang perjanjian perkawinan yang baku. Namun dari pengertian yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa perjanjian perkawinan hanyalah mengatur mengenai harta kekayaan suami istri dalam perkawinan saja, dimana dalam perjanjian perkawinan tersebut calon suami atau calon istri dapat menyatakan kehendak mereka terhadap harta perkawinan, apakah mereka akan bersepakat untuk menyatukan harta mereka atau mereka melakukan penyatuan harta hanya secara terbatas atau

¹⁶⁸ Salim H.S dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar grafika, 2007), hlm. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mereka memutuskan untuk tidak melakukan penyatuan harta sama sekali dalam perkawinan berlangsung.

Perjanjian perkawinan bagian dari lapangan hukum keluarga yang harus patuh pada ketentuan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetbook*). Perjanjian perkawinan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya, seperti yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetbook*). Namun pada prinsipnya Buku III BW juga berlaku terhadap perjanjian perkawinan.

Keabsahan suatu perjanjian perkawinan juga tunduk pada ketentuan syarat sah perjanjian pada umumnya. Adapun syarat-syarat dalam membuat perjanjian perkawinan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan sebagai berikut:

- a. Kata sepakat. Kata sepakat berarti persesuaian kehendak, maksudnya memberikan persetujuan atau kesepakatan. Jadi sepakat merupakan pertemuan dua kehendak dimana kehendak pihak yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain dan kehendak tersebut saling bertemu.

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak ke satu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dan dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan hanya disebutkannya "sepakat" saja tanpa tuntutan sesuatu bentuk cara (*formalitas*) apapun seperti tulisan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberian tanda atau panjer dan lain sebagainya, dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁶⁹

J. Satrio, menyatakan, kata sepakat sebagai persesuaian kehendak antara dua orang di mana dua kehendak saling bertemu dan kehendak tersebut harus dinyatakan. Pernyataan kehendak harus merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum. Dengan demikian adanya kehendak saja belum melahirkan suatu perjanjian karena kehendak tersebut harus diutarakan, harus nyata bagi yang lain dan harus dimengerti oleh pihak lain.¹⁷⁰

Di dalam KUHPdata tidak dijelaskan mengenai kata sepakat ini, tetapi di dalam Pasal 1321 ditentukan syarat bahwa tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya karena dengan paksaan atau penipuan. Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya kata sepakat antara masing-masing pihak harus diberikan secara bebas atau tidak boleh ada paksaan, kekhilafan dan penipuan. Menurut Soebekti,¹⁷¹ yang dimaksud paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (*psychis*) jadi bukan paksaan badan (*fisik*). Selanjutnya kekhilafan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting

¹⁶⁹ Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 4.

¹⁷⁰ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 129.

¹⁷¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1996), hlm. 23-24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari barang yang menjadi objek perjanjian. Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa sehingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut ia tidak akan memberikan persetujuan. Kemudian penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Dengan demikian suatu perjanjian yang kata sepakatnya didasarkan paksaan, kekhilafan, penipuan maka perjanjian itu di kemudian hari dapat dimintakan pembatalannya oleh salah satu pihak.

- b. Cakap untuk membuat perjanjian (bertindak). Dalam Pasal 1329 KUHPdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian dengan ketentuan oleh Undang-Undang tidak ditentukan lain yaitu ditentukan sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Selanjutnya Pasal 1330 KUHPdata menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian:

- 1) Orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang berada di bawah pengampuan atau perwalian dan;
- 3) Orang perempuan atau isteri dalam hal telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Mengenai orang yang belum dewasa diatur dalam Pasal 1330 KUHPdata, dinyatakan bahwa "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum kawin". Apabila perkawinan itu dibubarkannya sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.¹⁷² Namun dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 39 dan 40 dinyatakan untuk penghadap dan saksi paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah. Dalam hal ini cakap bertindak untuk keperluan khusus. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan cukup umur untuk kawin adalah 18 tahun. Sehingga apabila seseorang belum berusia genap 21 tahun tetapi telah kawin menimbulkan konsekuensi menjadi cakap bertindak. Dengan demikian dasar usia cakap untuk bertindak, jika tidak untuk keperluan khusus (telah diatur dalam undang-undang tertentu) maka usia yang dipakai adalah dua puluh satu tahun atau telah menikah berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara.

c. Adanya suatu hal tertentu

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian ialah objek perjanjian. Objek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi itu sendiri bisa berupa perbuatan untuk memberikan suatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Di dalam KUHPerdara Pasal 1333 ayat (1) menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai suatu hal tertentu sebagai pokok perjanjian yaitu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Mengenai

¹⁷² Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlahnya tidak menjadi masalah asalkan di kemudian hari ditentukan (Pasal 1333 ayat 2).

d. Adanya suatu sebab atau kausa yang halal

Yang dimaksud dengan sebab atau kausa di sini bukanlah sebab yang mendorong orang tersebut melakukan perjanjian.¹⁷³ Sebab atau kausa suatu perjanjian adalah tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak, sedangkan sebagaimana yang telah dikemukakan Soebekti, adanya suatu sebab yang dimaksud tiada lain daripada isi perjanjian.

Pada Pasal 1337 KUHPdata menentukan bahwa suatu sebab atau kausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang tidak mempunyai sebab yang tidak halal akan berakibat perjanjian itu batal demi hukum.

Pembebanan mengenai syarat subyektif dan syarat obyektif itu penting artinya berkenaan dengan akibat yang terjadi apabila persyaratan itu tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya syarat subyektif mengakibatkan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya. Pihak di sini yang dimaksud adalah pihak yang tidak cakap menurut hukum dan pihak yang memberikan perizinannya atau menyetujui perjanjian itu secara tidak bebas. Misalkan orang yang belum dewasa yang memintakan pembatalan orang tua atau walinya ataupun ia sendiri apabila ia sudah menjadi cakap dan orang yang ditaruh di bawah

¹⁷³ Sri Soedewi Masjchon, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hlm. 319.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengampuan yang menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya diwakili oleh pengampu atau kuratornya. Dan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Perjanjian seperti itu disebut *null and void*. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat obyektif mengakibatkan suatu perjanjian batal demi hukum.

Pengertian dari suatu sebab yang halal sebagai syarat sahnya perjanjian adalah perjanjian harus ada sebab-sebab yang mendahuluinya dan dianggap sah oleh Undang-Undang.¹⁷⁴ Apabila dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.¹⁷⁵

Sedangkan asas-asas dalam membuat perjanjian perkawinan diantaranya adalah:

- a. Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1)

¹⁷⁴ Arief Masdoeki, M.H. Tirtamidjaja, *Asas dan Dasar Hukum Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 1963), hlm.131.

¹⁷⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUHPPerdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUHPPerdata yang menerangkan tentang syarat-syarat sah nya perjanjian. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, sebagaimana yang dikemukakan Ahmadi Miru, di antaranya:¹⁷⁶

- 1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- 2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- 3) Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- 4) Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
- 5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak menyatakan para pihak menurut kehendak bebas dalam membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikat diri dengan siapapun yang ia kehendaki serta perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya memaksa.¹⁷⁷ Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III KUHPPerdata yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya

¹⁷⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 4.

¹⁷⁷ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.¹⁷⁸

b. Asas konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara penyebutnya tugas sedangkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara ditemukan dalam istilah "semua". Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.¹⁷⁹

Perjanjian yang telah terbentuk dengan tercapainya kata sepakat (*consensus*) di antara para pihak. Perjanjian ini tidak memerlukan formalitas lain lagi sehingga dikatakan juga perjanjian ini sebagai perjanjian bebas bentuk. Jika perjanjian ini dituangkan dalam bentuk tertulis, maka tulisan itu hanya merupakan alat bukti saja dan bukan syarat untuk terjadinya perjanjian. Perjanjian tersebut dinamakan perjanjian *konsensuil*.

Ada kalanya menetapkan perjanjian itu harus diadakan secara tertulis atau dengan akta Notaris, akan tetapi hal ini ada pengecualiannya yaitu undang-undang menetapkan formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian karena adanya ancaman batal apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksud Pasal

¹⁷⁸ Ibid, 4.

¹⁷⁹ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum*, hlm. 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1320 KUHPerdara, seperti perjanjian hibah harus dengan akta notaris, perjanjian perdamaian harus secara tertulis. Perjanjian yang ditetapkan dengan suatu formalitas tertentu tersebut dengan perjanjian formil.

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan tersimpul dalam kalimat "berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" pada akhir Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Jadi, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pembuatannya sebagai Undang-Undang. Dan kalimat ini pula tersimpul larangan bagi semua pihak termasuk di dalamnya "hakim" untuk mencampuri isi perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak tersebut. Oleh karenanya asas ini disebut juga asas kepastian hukum.

Asas ini dapat dipertahankan sepenuhnya dalam hal:

- 1) Kedudukan para pihak dalam perjanjian itu seimbang;
- 2) Para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian dan berlaku bagi debitur maupun bagi kreditur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Subekti, pengertian itikad baik dapat ditemui dalam hukum benda (pengertian subyektif) maupun dalam hukum perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) (pengertian obyektif).¹⁸⁰

Dalam hukum benda, itikad baik, artinya kejujuran atau bersih. Seorang pembeli beritikad baik adalah orang jujur, orang bersih. Ia tidak mengetahui tentang adanya cacat-cacat yang melekat pada barang yang dibelinya, dalam arti cacat mengenai asal-usulnya. Sedangkan pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara juga memberikan kekuasaan pada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan dan keadilan.

e. Asas kepribadian

Asas kepribadian ini sebenarnya menerangkan pihak-pihak mana yang terikat pada perjanjian. Asas ini terkandung pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pada Pasal 1315 disebutkan bahwa pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya. Selanjutnya Pasal 1340 menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat membawa rugi atau manfaat kepada pihak ketiga, selain dalam hal yang diatur klaim Pasal

¹⁸⁰ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), hlm. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1317. Oleh karena perjanjian itu hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat mengikat pihak lain. Maka asas ini dinamakan asas kepribadian.

Secara garis besar perjanjian perkawinan berlaku mengikat para pihak atau mempelai apabila terjadi perkawinan. Perjanjian perkawinan ini lebih sempit dari pada perjanjian secara umum karena bersumber pada persetujuan saja dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, tidak termasuk pada perikatan (perjanjian) yang bersumber pada Undang-Undang.

Tidak ada definisi yang jelas tentang perjanjian perkawinan ini namun dapat diberikan batasan bahwa hubungan hukum tentang harta kekayaan antara kedua belah pihak, yang mana dalam satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan dipihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.¹⁸¹

Perjanjian perkawinan dilakukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggar perjanjian tersebut, seperti tertuang dalam pasal 1313 KUHPerdara (BW). Para pihak harus menaati perjanjian ini sebagaimana diatur dalam KUHPerdara (BW).

Sebagai sebuah perjanjian maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran (inkar janji) dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi. Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan atau perikatan antara

¹⁸¹ Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publising, 2002), hlm. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

calon suami istri itu pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, sebab satu sama lain terikat pada Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian-perjanjian. Perjanjian Perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tentang sahnya perjanjian-perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara harus dipandang berlaku sesuai dengan Undang-Undang bagi pihak yang berjanji.

Dalam pasal 1338 KUHPerdara yang menegaskan bahwa: “ *Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*”.¹⁸²

Berdasarkan Pasal 139 KUHPerdara (BW), keberadaan perjanjian perkawinan adalah sebagai pengecualian ketentuan Pasal 119 KUHPerdara yaitu ketika perkawinan berlangsung maka secara hukum berlaku persatuan bulat antara kekayaan suami maupun kekayaan isteri atau dengan kata lain sebatas mengatur. Adapun tujuan pokok diadakannya perjanjian perkawinan adalah mengatur antara suami isteri apa yang akan terjadi mengenai harta kekayaan yang mereka bawa dan atau yang akan mereka peroleh masing-masing.¹⁸³

¹⁸² Abdulkadir Muhammad, *Hukum perdata Indonesia*, (Bandung: Penerbit: PT.Citra AdityaBakti), hlm. 99.

¹⁸³ Mochammad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2003), hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 139 KUHPdata mengandung suatu asas bahwa calon suami istri bebas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan yang dibuatnya. Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh beberapa larangan yang harus diperhatikan oleh calon suami isteri yang akan membuat perjanjian perkawinan.

Subtansi perjanjian perkawinan diserahkan pada pihak calon pasangan yang akan menikah dengan syarat isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama. Mengenai isi yang dapat diperjanjikan,¹⁸⁴ dapat memuat apa saja, yang berhubungan dengan baik dan kewajiban suami istri maupun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Mengenai batasan-batasan yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan. Hal ini merupakan tugas hakim untuk mengaturnya. Serta isi perjanjian perkawinan sepanjang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat ditafsirkan lain, maka lebih baik ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya hanya meliputi hak-hak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 139 KUHPdata, bahwa dalam perjanjian perkawinan itu kedua calon suami istri dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam harta bersama, asal saja penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban

¹⁸⁴ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 80-81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum (*openbare orde*) dengan mengindahkan pula isi ketentuan yang disebutkan setelah pasal 139 KUHPdata itu.¹⁸⁵

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pasangan yang mengikatkan diri dalam perjanjian perkawinan tersebut akan memperoleh jaminan selama perkawinan berlangsung maupun sesudahnya sehingga untuk memutuskan perkawinan berarti pula melanggar perjanjian maka merupakan hal yang sangat jarang terjadi mengingat akiba-takibat hukum yang akan ditanggung (resiko) bila salah satu pihak ingkar terhadap perjanjian perkawinan tersebut, biasanya ada sanksi yang harus diberlakukan terhadap pihak yang melanggar perjanjian perkawinan tersebut.

Adapun materi Perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHPdata termasuk terdapat pada Bab VII Pasal 139 sampai dengan Pasal 167. Adapun substansi Perjanjian kawin yang diatur dalam KHUPdata dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Perjanjian perkawinan harus dibuat secara notarial, begitu pula perubahannya, apabila tidak maka diancam batal demi hukum;
- 2) Perjanjian perkawinan boleh terdapat beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar pesatuan harta kekayaan tetapi tidak boleh melanggar hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- 3) Perjanjian perkawinan tidak boleh berisikan ketentuan yang mengurangi segala hak yang disandarkan pada suami sebagai suami dan kepala keluarga;

¹⁸⁵ R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), hlm. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Perjanjian perkawinan tidak boleh mengurangi kekuasaan suami terhadap anak pada saat perpisahan meja dan ranjang;
- 5) Perjanjian perkawinan tidak boleh mengurangi hak yang diberikan undang-undang kepada suami atau istri yang hidup terlama;
- 6) Perjanjian perkawinan tidak boleh berisikan hal untuk melepas hak-hak yang diberikan undang-undang kepada suami atau istri atas harta peninggalan keluarga;
- 7) Perjanjian perkawinan tidak boleh memperjanjikan bahwa suatu pihak harus membayar sebagian utang yang lain yang lebih besar daripada bagian keuntungannya.¹⁸⁶

Ketentuan yang terdapat dalam KUHPdata tidak menetapkan adanya penyimpangan yang dapat dilakukan oleh calon suami istri yang akan melakukan perjanjian perkawinan. Ketentuan tersebut hanya mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi dan syarat yang dilarang dalam pembuatan perjanjian perkawinan.¹⁸⁷

Sedangkan syarat-syarat suatu perjanjian perkawinan, ketentuan KUHPdata Pasal 147, menetapkan atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, sebelum perkawinan berlangsung. Pembuatan perjanjian perkawinan dibutuhkan suatu keahlian khusus dalam merumuskan isi akta perjanjian. Dengan demikian orang yang membuat perjanjian perkawinan harus benar-benar orang yang paham dan

¹⁸⁶ Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 121.

¹⁸⁷ H.F.A.Vollmar, *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui hukum harta perkawinan serta dapat merumuskan semua syarat yang ada dalam akta dengan teliti. Orang yang mempunyai keahlian tersebut adalah Notaris. Akta notaris dalam perjanjian perkawinan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai alat pembuktian saja akan tetapi lebih dari itu akta notariil dimaksudkan agar:

- 1) Perjanjian perkawinan tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat;
- 2) Memiliki kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban suami istri atas harta benda mereka;
- 3) Mencegah kemungkinan adanya penyelundupan hukum atas ketentuan KUHPdata Pasal 144 yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh diubah dengan cara apapun setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Untuk mencegah perbuatan tergesa-gesa dari para pihak, serta untuk memikirkan perbuatan hukum yang dilakukannya. Hal ini mengingat perjanjian perkawinan mempunyai akibat atas harta kekayaan suami istri dalam jangka waktu yang lama atau sepanjang perkawinan.¹⁸⁸

b) Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan ditandatangani Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Soeharto di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974, dan hari ini

¹⁸⁸ R, Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Perikatan*, hlm. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga diundangkan yang ditandatangani Menteri atau Sekretaris negara RI, Mayor Jenderal TNI Sudarmono, S.H, serta dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia tahun 1974 No. 1 dan penjelasannya dimuat dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019. Undang-undang ini berisi 14 bab dan 67 pasal. Didalamnya diatur tentang dasar perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian dan ketentuan-ketentuan lainnya.¹⁸⁹

Untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974. PP No 9 Tahun 1975 tersebut dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1975 Nomor 12 dan penjelasannya dalam Lembaran Negara nomor 3050. PP No 9 Tahun 1975 itu memuat 10 bab dan 49 pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum Pencatatan Perkawinan, tatacara perkawinan, akta perkawinan, tata cara perceraian, pembatalan perkawinan, waktu tunggu, beristri lebih dari seorang, ketentuan pidana dan penutup.

Salah satu aspek penting dalam perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian tertulis yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Banyak anggapan bahwa

¹⁸⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adata dan Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat perjanjian perkawinan bagi para calon suami istri yang ingin melangsungkan perkawinan berkesan sangat tidak romantis, tidak saling percaya, materialistis, bertentangan dengan adat istiadat orang Timur dan juga egois karena kelihatannya layaknya memproteksi aset pribadi.

Perjanjian perkawinan merupakan istilah yang diambilkan dari judul Bab V Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang yang berisi satu pasal, yaitu pasal 29. Sedangkan mengenai pengertian perjanjian perkawinan ini tidak diperoleh penjelasan, hanya mengatur tentang kapan perjanjian kawin itu dibuat, hanya mengatur tentang keabsahannya, tentang saat berlakunya dan tentang dapat diubahnya perjanjian itu. Jadi sama sekali tidak mengatur tentang materi perjanjian seperti yang diatur dalam KUH Perdata.

Salah satu azas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terkait dengan perjanjian perkawinan adalah hak dan kedudukan suami istri yang seimbang (*azas equalitas*) yang terlihat dalam pasal 31 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974. Menurut azas ini masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri begitu pula terhadap harta bendanya.¹⁹⁰

Sebenarnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur secara tegas tentang perjanjian perkawinan, hanya dinyatakan bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yaitu perjanjian perkawinan. Dalam ketentuan ini tidak disebutkan batasan yang jelas, bahwa perjanjian perkawinan itu mengenai hal apa. Disamping itu Undang-Undang Nomor 1

¹⁹⁰ Abdul Manaf, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2006), hlm. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1974 tidak mengatur lebih lanjut tentang bagaimana hukum perjanjian perkawinan yang dimaksud.¹⁹¹

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur lebih lanjut bagaimana tentang Perjanjian Perkawinan dimaksud, hanya disebutkan bahwa kalau ada perjanjian perkawinan harus dimuat di dalam akta perkawinan (Pasal 12).¹⁹²

Ketentuan tentang perjanjian perkawinan juga diatur dalam KUHPdata Pasal 139, yang menetapkan bahwa dalam perjanjian kawin itu kedua calon suami isteri dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam harta bersama, asal saja penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan ke-susilaan dan ketertiban umum.

Secara umum, perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri.¹⁹³ Pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pengawai pencatat nikah.¹⁹⁴

Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang No 1 1974 tentang perkawinan, diatur dalam Bab V Pasal 29 yang terdiri dari empat ayat. Pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan

¹⁹¹ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm. 67.

¹⁹² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hlm. 32.

¹⁹³ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, Cet. II, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 78.

¹⁹⁴ Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan*, hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan uji materi terhadap ketentuan mengenai Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun amar putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yaitu:

- 1) Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ‘ Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian perkawinan tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut’.¹⁹⁵
- 2) Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ‘Pejanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan’.¹⁹⁶
- 3) Pasal 29 (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan’ Selama perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat dibubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga’.¹⁹⁷

Sedangkan menurut Martiman Prodjohamidjodjo, perjanjian dalam pasal 29 ini jauh lebih sempit karena hanya meliputi ‘*verbintenissen*’ yang bersumber pada persetujuan saja (*overenkomsten*), dan perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi tidak meliputi ‘*verbintensissen uit de wet allen*’ (perikatan yang bersumber pada Undang-Undang).¹⁹⁸

Kendatipun tidak ada definisi yang jelas yang dapat menjelaskan perjanjian perkawinan namun dapat diberikan batasan, sebagai suatu

¹⁹⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Salinan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 156.

¹⁹⁶ Ibid, 157.

¹⁹⁷ Ibid, 158.

¹⁹⁸ Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, Cet I, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hubungan hukum mengenai harta kekayaan mengenai kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan di pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.

Lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian dibuat oleh calon suami dengan calon istri pada waktu, sebelum perkawinan dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah atau notaris dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan. Mengenai isi yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, dalam ilmu hukum dapat dikemukakan pendapat antara lain sebagai berikut :¹⁹⁹

- a) Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian perkawinan dapat memuat apa saja, yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami-isteri maupun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Mengenai batasan-batasan yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, hal ini merupakan tugas hakim untuk mengaturnya;
- b) R. Sardjono berpendapat bahwa sepanjang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat ditafsirkan lain, maka lebih baik ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya hanya meliputi hak-hak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan;

¹⁹⁹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 80-81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Nurnazly Soetarno berpendapat bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, dan hal itu hanya menyangkut mengenai harta yang benar-benar merupakan harta pribadi suami isteri yang bersangkutan, yang dibawa ke dalam perkawinan. Secara umum, perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami isteri.²⁰⁰

Pada prinsipnya perjanjian perkawinan ini yang menjadi sumber dari berbagai bentuk harta benda dalam perkawinan.²⁰¹ Pengaturan perjanjian perkawinan ini seharusnya diletakkan setelah pengaturan hak dan kewajiban suami isteri dan pengaturan mengenai harta benda dalam perkawinan. Keterbatasan peng aturan perjanjian perkawinan ini membuat para pihak memiliki kebebasan untuk menyusun isinya serinci dan selengkap mungkin.

Klausula perjanjian perkawinan yang mengatur hal selain harta perkawinan tidak boleh melanggar hak dan membatasi kewajiban para pihak (suami isteri), misalnya dalam perjanjian perkawinan diatur bahwa suami tidak menjadi kepala keluarga dan tidak berkewajiban menafkahi isteri. Klausula semacam ini bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor Tahun 1974. Klausula perjanjian perkawinan yang melanggar hukum, kesusilaan, dan agama adalah batal demi hukum.

Perjanjian yang melanggar norma-norma tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak ketiga, bahkan yang tidak terkait sekalipun. Pada

²⁰⁰ Happy susanto, *Pembagian Harta*, hlm. 78.

²⁰¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundangundangan*, hlm. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsipnya, substansi perjanjian perkawinan terbatas mengenai kedudukan harta benda perkawinan. Meskipun suami atau istri tidak mengatur secara tegas hal-hal di luar harta benda perkawinan, norma agama, kepatutan, kebiasaan dan Undang-undang juga mengikat pihak-pihak yang membuatnya.

Namun dengan catatan, bahwa pihak ketiga juga terikat dengan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri sebatas hanya mengenai harta benda. Hal-hal lain di luar pengaturan mengenai harta benda perkawinan, pihak ketiga tidak terikat terhadap segala akibat yang ditimbulkannya.

Pihak ketiga juga dapat mengajukan pembatalan perjanjian perkawinan tersebut, terhadap seluruh isi atau sebagian klausula yang merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan dapat diubah selama perkawinan berlangsung dengan syarat atas dasar kesepakatan antara suami istri dan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Apabila perubahan perjanjian perkawinan itu merugikan pihak ketiga maka pihak ketiga tidak terikat terhadap perubahan perjanjian perkawinan tersebut.

Adapun mengenai Waktu pembuatan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1974 berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu setelah putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 29 ayat (1), menentukan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, pada saat perkawinan dilangsungkan atau selama perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlangsung. Dengan demikian mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan lebih luas dengan memberikan tiga macam waktu untuk membuat perjanjian perkawinan.

Dilihat dari penjelasan diatas pada dasarnya, Substansi perjanjian perkawinan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 mengatur secara tegas bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya terbatas pada harta perkawinan dapat juga perjanjian lain, sehingga secara implisit dapat ditafsirkan perjanjian perkawinan tersebut tidak terbatas hanya mengatur mengenai harta perkawinan saja, sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama, ketertiban umum dan kesusilaan. Dapat dilihat juga esensi perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor Tahun 1974 lebih luas dari pada makna perjanjian perkawinan yang terdapat dalam KUHPerdara (BW).

c) Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di Indonesia perjanjian perkawinan untuk orang Islam diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kata “*Kompilasi*” berasal dari bahasa Latin *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana. Dalam bahasa Inggris “*compilation*” (himpunan Undang-Undang).²⁰² Dalam bahasa belanda ditulis “*compilatie*” (kumpulan dari lain-lain

²⁰² John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), hlm. 132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karangan).²⁰³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).²⁰⁴

Berdasarkan keterangan tersebut dapatlah diketahui bahwa ditinjau dari sudut bahasa kompilasi dapat diartikan sebagai usaha untuk mengumpulkan sumber-sumber (informasi, karangan dsb) dari berbagai literatur dan dijadikan satu untuk mempermudah pencarian. Hal ini dipertegas oleh Abdurrahman dalam bukunya *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*:

Kompilasi dari persepektif bahasa adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku atau tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.²⁰⁵

a. Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ide Kompilasi Hukum Islam muncul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang justisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini didasarkan pada Undang- Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa Organisasi, Administrasi dan Keuangan Pengadilan dilakukan oleh Departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis

²⁰³ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992), hlm. 123.

²⁰⁴ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 584.

²⁰⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hlm. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung. Meskipun Undang-Undang tersebut ditetapkan tahun 1970, namun pelaksanaannya dilingkungan Peradilan Agama baru pada tahun 1983 setelah penandatanganan SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI No. 01, 02, 03 dan 04/SK/1-1983 dan No. 1, 2, 3 dan 4 Tahun 1983. Keempat SKB ini merupakan jalan pintas sambil menunggu keluarnya Undang-Undang tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara pada Peradilan Agama yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 bagi lingkungan Peradilan Agama yang pada saat itu sedang dalam proses penyusunan secara intensif.²⁰⁶

Selama pembinaan teknis yustisial Peradilan Agama oleh Mahkamah Agung, terasa adanya beberapa kelemahan, antara lain soal hukum Islam yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama, yang cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat Ulama dalam hampir setiap persoalan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan peradilan agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.

Sebagaimana dikemukakan oleh Bustanul Arifin, selaku pencetus gagasan ini, bahwa:

1. Untuk dapat berlakunya Hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat;

²⁰⁶ Bustanul Arifin, *Pemahaman Hukum Islam dalam Konteks Perundang-undangan*, Wahyu, No. 108 Th. VII Mei 1985, hlm. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Persepsi yang tidak seragam tentang shar'iyah akan dan sudah menyebabkan hal-hal: *Pertama*, ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut Hukum Islam itu; *Kedua*, tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at; *Ketiga*, akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang telah tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan perundang-undangan lainnya;
3. Di dalam sejarah Islam pernah dua kali di tiga negara, Hukum Islam diperlukan sebagai Perundang-undangan negara.²⁰⁷ Sesuai dengan Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Shar'iah diluar Jawa dan Madura. Dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara maka para Hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Shar'iyah membatasi 13²⁰⁸ buah kitab kuning dari kitab kuning yang selama ini dipergunakan di Peradilan Agama, adalah merupakan upaya kearah kesatuan dan kepastian hukum yang sejalan dengan apa yang dilakukan negara-negara tersebut, dan dari itulah kemusian muncul gagasan untuk

²⁰⁷ (1) Di India masa Raja An Rijeab yang membuat dan memberlakukan Perundang-undangan Islam yang terkenal dengan fatwa Alamfiri. (2) Di kerajaan Turki Utsmani yang terkenal dengan nama *Majallah Al-Ah}ka@m Al-Adliyah*. (3) Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Sudan. Lihat Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1995. Hlm. 135.

²⁰⁸ Kitab-kitab yang digunakan diantaranya: *Al-Baju@ri@*, *Fath}ul Mu'i@n* dengan Syarahnya, *Sharqawi@ 'alá al-Tah}ri@r*, *Qulyubi* atau *Muh}alli@*, *Fath}ul Waha@b* dengan Syarahnya, *Tuh}fah*, *Targhib al-Mushtaq*, *Qawa@nin al-Shar'iyah Li al-sayyid Uthma@n ibn Yahya*, *Qawani@n al-Shar'iyah Li al-sayyid* sudaqah *Dah}la@n.*, *Shamsuri Li al-Fara@'id*, *Al-Fiqh 'alá al-Mu'adhahibi al-Arba'ah*, *Mughni@ al-Muhta@j* dan *Bughyah al-musta@r al-shari'ah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum bagi Pengadilan Agama;

4. Landasan Yuridis, Landasan Yuridis tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat ialah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Dan di dalam fiqh ada kaidah yang mengatakan bahwa: “Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan”. Keadaan masyarakat itu sendiri selalu berkembang karena menggunakan metode-metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Diantara metode-metode itu ialah *mas{lah}ah mursalah, istih{sa}@n, istish{a}@b* dan *‘urf*;
5. Landasan Fungsional, Kompilasi Hukum Islam adalah fiqh Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fiqh Indonesia sebagaimana pernah dicetuskan oleh Hazairin, dan T.M Hasby Ash Shiddiqy sebelumnya mempunyai tipe Fiqh lokal semacam Fiqh Hijazi, Fiqh Mishry, Fiqh Hindy, Fiqh lain-lain yang memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, yang bukan berupa mazhab baru tetapi ia mempersatukan berbagai fiqh dalam menjawab suatu persoalan fiqh. Ia mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Di dalam sistem hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum Nasional Indonesia.²⁰⁹

b. Proses Pembentukan KHI

Gagasan Kompilasi Hukum Islam berasal dari MA RI yang kemudian didukung penuh oleh Depag RI. Sebagai realisasi dari gagasan tersebut, MA RI bersama Depag RI memprakarsai adanya proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, suatu proyek yang akan bertanggung jawab atas pembentukan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, pembentuk-pembentukan Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan oleh sebuah tim pelaksana proyek yang ditunjuk dengan SKB ketua MA dan Menag RI,²¹⁰ No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985, pada tanggal 25 Maret 1985.

Pembentukan tim ini seperti tersebut dalam konsideran SKB, didasarkan pada fungsi pengaturan MA RI terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya terhadap lingkungan Peradilan Agama. Penjabaran dari fungsi itu salah satunya adalah mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi hukum materiil di Pengadilan Agama.²¹¹ Selain itu juga didasarkan pada UU No. 13

²⁰⁹ Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 1997), hlm. 20-22.

²¹⁰ Ketua MA RI saat itu adalah Ali Said, S.H. dan menteri Agamanya adalah H. Munawwir Sadzali, M.A

²¹¹ Konsideran menimbang pada SKB Ketua MA RI dan Menteri Agama NO. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1965 dan UU No. 14 Tahun 1970. Atas dasar itu, SKB menunjuk dan mengangkat para pejabat MA dan Depag RI sebagai pelaksana proyek.²¹²

Berdasarkan susunan pelaksanaan proyek seperti termaktub dalam SKB tersebut, tampak bahwa penempatan personil didasarkan pada jabatan struktural yang bertanggung jawab terhadap pembinaan Peradilan Agama, dengan menggunakan asas perimbangan (equilibrium) dari dua instansi pemrakarsa, yakni keseimbangan personil di Depag dan MA RI. Dari 16 personil yang menduduki 11 jabatan, 8 personil dari MA RI dan 7 personil dari Depag RI. Sedangkan 1 personil sisanya, dari MUI, yakni KH. Ibrahim Hosein, LML.

c. Pihak-pihak yang Dilibatkan dan Intensitas Keterlibatannya

Selain para birokrat dari Depag dan Hakim Agung dari MA RI yang turut terlibat dalam proses penyusunan KHI adalah para Ulama, dan para cendikiawan/intelektual muslim. Kedua pihak yang disebut terakhir masuk dalam lingkaran proses penyusunan, karena sengaja dilibatkan oleh tim Pelaksana proyek atau kedua pihak yang disebut pertama. Dari sini, maka intensitas keterlibatan mereka dalam proses pembentukan Kompilasi Hukum Islam mempunyai nilai yang berbeda-beda. Peran dan fungsi dan intensitas keterlibatan masing-masing.

²¹² Susunan pelaksana Proyek tercantum dalam dictum pertama pada SKB Ketua MA RI dan menteri Agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Birokrat Depag dan Hakim Agung MA RI

Kedua pihak ini selain sebagai penggagas pemrakarsa pembentukan KHI, peran yang terpenting adalah sebagai penentu kebijaksanaan (*decision marker*) , walaupun menurut M. Yahya Harahap final rumusan KHI ada di tangan ulama pula.²¹³ karena posisis mereka sebagai tim pelaksana proyek, maka segala kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan KHI ditanganinya.²¹⁴ Peluang-pelung strategis dalam proses penyusunan KHI dikuasainya. Dengan demikian, kedua pihak inilah tim inti pembentukan KHI, pemeran paling dominan dan pihak yang terlibat paling intensif. Sedangkan pihak-pihak lain yang turut terlibat hanya bersifat menunjang, membantu, dan melengkapi, terutama dalam memberikan input data.

2. Ulama

Ulama yang dimaksud dalam pengertian ini adalah mereka yang mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan²¹⁵ di bidang agama baik secara personal maupun kolektif. Mereka ini biasanya berbeda dalam naungan organisasi sosil keagamaan seperti MUI, NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan Al Wasliyah, atau diluar organisasi formal tetapi karena kapasitas keilmuan dan integritas moralnya diakui masyarakat sebagai ulama. Ulama dalam klasifikasi ini lebih diartikan bukan mereka yang menjadi

²¹³ M. Yahya Harahap, finalnya rumusan KHI bukan ditentukan secara mutlak di tangan panitia. Sebab, untuk menetapkan dimintakan justifikasi dari para ulama melalui seminar yang bersifat Nasional. Lihat M Yahya harahap, *kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU NO. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hlm. 95.

²¹⁴ Seperti penyelenggaraan wawancara, perumusan dari hasil penelitian dan pengkajian kitab, loka karya, study banding, dll. Adapun pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan tersebut bersifat membantu.

²¹⁵ Maksudnya adalah semacam mengeluarkan fatwa, mengeluarkan hasil ijtihad, dll

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pegawai Negri (Birokrat) atau Hakim (Pemegang Kekuasaan Yudikatif), bukan pula yang bekerja di Perguruan Tinggi.²¹⁶

Dari pihak Ulama yang masuk dalam tim pelaksana proyek hanya satu yakni KH. Ibrahim Hosen, LML (dari MUI). Ia duduk dalam pelaksana bidang kitab-kitab atau yurisprudensi. KH. Ibahim Husein, selain lebih disebut ulama karena wakil MUI, ia juga dalam sisi yang lain adalah pegawai negri (dari Depag RI) dan intelektual (karena Rektor IIQ Jakarta).

Keterlibatan lain dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam, pihak ulama dijadikan sebagai responden²¹⁷ dan diundang sebagai peserta lokakarya Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi. Menurut catatan pelaksana proyek, wawancara terhadap para ulama dilakukan di sepuluh lokasi wilayah PTA, dengan melibatkan 185 ulama.²¹⁸

Wawancara dilakukan oleh tim pelaksana Proyek ditambah dengan wakil dari PTA wilayah responden. Sedangkan dalam lokakarya selain sebagai peserta, ulama terlibat dalam tim perumus komisi.²¹⁹

²¹⁶ Artinya, dalam proses ini KHI, Ulama yang dilibatkan selain dari unsur organisasi Islam juga diutamakan mereka yang mengasuh Pondok Pesantren, atau yang sering dikenal dengan istilah “kiai”.

²¹⁷ Kulifikasi Ulama yang masuk dalam daftar responden adalah ulama-ulama pilihan yang benar-benar diperkirakan berpengetahuan cukup dan beribawa. Selain itu, dipertimbangkan juga kelengkapan geografis dari jangkauan wibawanya.

²¹⁸ Wilayah banda Aceh 20 Ulama; wilayah Medan 19 ulama; wilayah Padang 20 Ulama; wilayah Palembang 20 ulama; wilayah Bandung 16 ulama; wilayah Surakarta 18 ulama; wilayah Surabaya 18 ulama; wilayah Banjarmasin 15 ulama; wilayah Ujung Pandang 19 Ulama; wilayah Mataram 20 ulama.

²¹⁹ (1) Komisi A tentang Hukum Perkawinan adalah KH. Ali yafie dan KH. Nahji Ahyad.

(2) Komisi B tentang Hukum kewarisan adalah KH. Azhar Basyir

(3) Komisi C tentang Hukum wakaf adalah KH. Ibrahim Husein dan KH. Aziz Mayhuri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Intlektual (Cendikiawan Muslim)

Intlektual atau cendikiawan Muslim yang dimaksud dalam klasifikasi ini adalah mereka yang diakui karena kepakaran ilmunya, terutama dibidang Hukum Islam. Mereka ini biasanya mengajar disebuah Perguruan Tinggi (Islam). Semisal IAN atau sejenisnya. Dalam proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam, pihak intlektual atau cendikiawan muslim mempunyai peran sebagai peneliti kitab-kitab kuning dan peserta lokakarya Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi. Kitab-kitab yang diteliti sebanyak 38 kitab dengan 160 rincian masalah pokok hukum materiil dalam bidang hukum keluarga (perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah). Penelitian kitab-kitab yang dimaksud dilakukan oleh 10 IAIN se Indonesia.²²⁰ Penelitian tersebut memakan waktu 3 bulan, mulai tanggal 7 Maret sampai dengan 21 Juni 1985.

²²⁰ (1) IAIN Arraniri Banda Aceh meneliti 6 kitab, yaitu Al-Bajuri@, Fath al-Mu'i@n al-Sharqawi@ 'ala al- Tahri@r, Mughni@ al-Muh}ta@j, Niha@yat al-Muh}ta@j, dan al-Sharqawi@. (2) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta meneliti 6 kitab, yaitu l'a@nat al-T}a@libi@n Tuhfah, Targhi@b al-Mushtaq, Bulghah al-Sa@lik, Shamsuri fi al-faraid}, Al- Muda@wana. (3) IAIN Antasari Banjarmasin meneliti 6 kitab, yaitu Qalyubi@ atau Mahalli@, fath al-Wahha@b, dengan syarahnya, Al-Umm, Bughyah al- Mustarsyidin, Bida@yah al-Mujtahid, 'Aqidah wa al-Shari'ah. (4) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta meneliti 5 kitab, yaitu Al-Muh}alla, Al-wa@jiz, fath} al-Qa@dir, Al-Fiqh 'alá Madhahib al- Arba'ah, Fiqh as-Sunah. (5) IAIN Sunan Ampel Surabaya meneliti 5 kitab, yaitu Kashf al-Qina@', Majmu' Fata@wa@ Ibn Taimiyah, Qawa@nin al-Shar'iyah Li al-Sayyid Uthma@n ibn yah}yá, Al-Mughni@, Al-Hida@yah Sharh} al-Bidayah Taimiyah al-Mubtadi'. (6) IAIN Alauddin Ujung pandang meneliti 5 kitab yaitu Qawa@nin al-Shar'iyah Li al-Sayyid sudaqah Dah}la@n, Nawa@b al-Jali@l, Sharh} ibn 'A@bidi@n, Al-Muwat}t}a', Hashiyah Shams al-di@n Muh.'Irfá@n Dasuqi@. (7) IAIN Imam Bonjol Padang meneliti 5 kitab, yaitu Bada@'i' al-Shana'i@, Tabyi@n al-Haqa@iq, Al-Fatwá al-Hindiyah Fath al-Qa@dir, Niha@yah. Lihat Ditbinbapera, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Ditbinbapera, 1991/1992, hlm. 166-168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dalam lokakarya, disamping sebagai peserta para intelektual atau cendekiawan muslim terlibat dalam tim perumus, yakni tim perumus komisi C tentang hukum wakaf yang terlibat adalah H. Rahmat Djatnika.²²¹

4. Metode Perumusan perjanjian perkawinan dalam KHI

Dalam tata kerja “Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurispudensi” dijelaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam dibentuk dengan cara-cara:

- a. Pengumpulan data
- b. Wawancara
- c. Studi Pbandingan
- d. Lokakarya

Keempat karya tersebut sekaligus merupakan tugas pokok yang harus direalisasikan oleh tim pelaksana proyek. Artinya, cara-cara tersebut adalah cara minimal yang harus dilakukan oleh tim dalam upaya menyusun Kompilasi Hukum Islam. Tujuannya tidak lain adalah merumuskan hukum materiil bagi Pengadilan Agama.

Dengan demikian boleh dikatakan bahwa metode pendekatan yang dilakukan dalam menyusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah dengan empat jalur tersebut. Secara lebih jelas metodologi yang digunakan adalah sebagai berikut:

²²¹ Rahmat Djatnika, Guru Besar Bidang Studi *Wakaf* pada IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelitian Kitab-Kitab Kuning;

Karena Kompulasi Hukum Islam (KHI) bukan proyek yang al-historis maka salah satu sumber pencarian data-data materi hukum Islam yang dianggap *akurat, acceptable dan konstektual* adalah kitab-kitab tersebut diatas. Pencarian data dilakukan dengan menggunakan penelitian, penelaahan dan pengkajian.

Jumlah total kitab yang teliti sebanyak 38 kitab. Pokok hukum materiil yang diteliti terbatas pada bidang hukum keluarga (perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan waqaf, serta sadaqah), dengan rincian sebanyak 160 masalah, suatu bidang hukum yang selama ini wiliyah kewenangan materiil Peradilan Agama. Kemudian, hasil penelitiannya diolah lebih lanjut oleh tim proyek bagian pelaksana bidang kitab dan yurisprudensi.

Selain itu, sasaran kitab-kitab yang dijadikan objek penelitian adalah kitab-kitab kuning yang langsung dikumpulkan dari imam-imam mazhab dan syarah-syarahnya yang dianggap mempunyai otoritas (*mu'tabarah*), terutama di Indonesia. Hal yang dicari adalah kaidah-kaidah hukum dari imam mazhab tersebut beserta dalil-dalil dan argumentasinya, untuk kemudian disesuaikan dengan klasifikasi bidang-bidang hukum menurut ilmu hukum umum.

2. Penelitian Yurisprudensi Peradilan Agama;

Selain meneliti kitab-kitab kuning yang dahulu di"sakral"kan sebagai referensi formal-normatif, juga objek lain yang diteliti adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yurisprudensi²²² yang tidak lain adalah produk-produk putusan Peradilan Agama yang empiris. Karena, antara dua dimensi yang normatif dan empiris terkandung makna psikologis tersendiri dan bisa dijadikan indikator sosiologis dalam penegakkan hukum-hukum tersebut.

Penelitian terhadap yurisprudensi putusan Peradilan Agama ini dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Depag RI. Ada 16 buku himpunan yurisprudensi yang menjadi bahan dalam penelitian ini.²²³

3. Wawancara (Interview);

Untuk membuktikan secara realitas dari norma hukum yang hidup di masyarakat, maka selain meneliti teks-teks kitab juga dilakukan wawancara kepada 185 ulama di 10 lokasi PTA se-Indonesia. Sepuluh lokasi dan 185 ulama dalam wilayah tersebut dipandang sebagai representasi atau mewakili Indonesia baik dari segi responden maupun geografisnya. 185 ulama yang dijadikan responden adalah ulama-ulama pilihan yang dipandang mempunyai kapabilitas yang memadai dan karena karismanya yang mampu mempengaruhi masyarakat sekitarnya (dalam mengikuti fatwa-fatwanya).

²²² Yurisprudensi yang dimaksud adalah *jurisprudentie* (Belanda), bukan *jurisprudence* (Inggris), yakni putusan-putusan pengadilan yang dapat dianggap sebagai satu sumber hukum. Karena bila sudah ada suatu *jurisprudentie* yang tetap, maka hal ini akan selalu diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam soal yang serupa.

²²³ Empat buah buku Himpunan Putusan PA/PTA, yaitu terbitan tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, dan 1980/1981; Tiga buah buku Himpunan Fatwa, yaitu buku terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980, dan 1980/1981; Lima buah buku yurisprudensi PA, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983, dan 1983/1984; Empat buah hukum *Law Report*, yaitu buku terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, dan 1983/1984. Lihat, Ditbinbapera, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara ini dilakukan dengan dua cara: dengan mengajukan pokok-pokok masalah kepada responden secara bersama-sama dalam satu tempat atau dengan mewawancarai mereka secara terpisah.²²⁴ Pokok masalah yang dimaksud disusun dan disajikan dalam sebuah buku *guid questioner* yang berisi 102 masalah dalam bidang hukum keluarga (perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan wakaf).²²⁵

4. Studi Perbandingan;

Karena rencana pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) semacam ini bukan yang pertama kali dilakukan dalam sejarah peradaban Islam, maka proses pembentukan (KHI) di Indonesia tidak bisa menyampingkan begitu saja sejarah yang ada. Keberadaannya adalah mata rantai dari sejarah perkembangan hukum Islam secara positif di dalam suatu bentuk negara modern. Studi perbandingan terhadap produk-produk hukum Islam di negara lain, dengan demikian menjadi penting untuk dilakukan sebagai bahan pertimbangan.

Studi perbandingan dalam rangka pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dilaksanakan ke Timur Tengah, yaitu ke negara-negara:

1. Maroko, dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 Oktober 1986;
2. Turki, dilaksanakan pada tanggal 1 dan 2 November 1986;
3. Mesir, dilaksanakan pada tanggal 3 dan 4 November 1986.

²²⁴ Bustanul Arifin, *Kompilasi: Fiqh dalam Bahasa Undang-undang*, Pesantren, No. 2 Vol. II Tahun 1985, hlm. 29.

²²⁵ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh sistem atau kaidah-kaidah hukum satu dengan yang lain, terutama yang paling tepat (*applicable dan acceptable*) untuk konteks Indonesia.²²⁶ Paling tidak ada 3 materi perbandingan yang diperoleh sebagai input bagi penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari studi tersebut. Ketiga materi itu adalah mengenai:

- a) Sistem Peradilan;
- b) Masuknya syari'ah law dalam arus tata hukum nasional;
- c) Sumber-sumber hukum dan hukum materiil yang menjadi pegangan atau terapan hukum di bidang *ah}wa@l al-shakhs}{iyyah* yang menyangkut kepentingan muslim.²²⁷

Studi perbandingan ini dilaksanakan oleh dua orang, yaitu H. Masrani Basra, Hakim Agung MA RI, selaku pimpinan Pelaksana Proyek, dan H. Muchtar Zarkasyi, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam

²²⁶ Pihak-pihak yang dihubungi di negara Maroko adalah: (1) Direktur Institut Kehakiman Nasional; (2) Sekretaris Jendral Kementrian Wakaf dan Urusan Islam ; (3) Penasehat Menteri Wakaf dan Urusan Islam; (4) Ketua Supreme Court; (5) Ketua Badan Kerja Sama UNESCO-ALESCO. Dinegara Turki hanya dua negara yang dihubungi adalah: (1) Supreme Court, yang diwakili oleh Attorney General; (2) Ketua Islamic Centre. Sedangkan di Mesir yang dihubungi lebih luas lagi, selain pihak pengadilan dan pemerintah yang berwenang terhadap Hukum Islam, juga dihubungi pihak-pihak Perguruan Tinggi Islam terbesar di negeri itu. Yakni, selain ketua Supreme Court, Mufti Negeri dan Menteri Wakaf Mesir, pihak lain seperti Rektor Al-Azhar, Majelis Tinggi Al-Azhar, Grand Syekh Al-Azhar, dan Dekan Fakultas Dakwah Al-Azhar adalah partner studi yang tak ditinggalkan dalam menggali dan mengkaji materi-materi perbandingan (*matters of comparative*). Lihat, *Ibid*, hlm.158-159.

²²⁷ Materi-materi masukan yang didapat dari 4 jalur informasi di atas di dapat juga dari masukanmasukan spontan dari: (1) Syuriah NU Jawa Timur yang mengadakan 3 kali *bah}{thul masa}@il* di tiga Pondok Pesantren, yaitu: Tambak Beras, Lumajang dan Sidoarjo; (2) Majelis Tarjih PP Muhammadiyah melalui suatu seminar tentang Kompilasi Hukum Islam yang dilaksanakan di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tanggal 8-9 April 1986. Dihadiri oleh Menteri Agama dan Ketua MUI, KH. Hasan Basri. Lihat, Saekan dan Ernati Effendi, *sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 29. Lihat juga, Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqih Mazhab*, hlm. 159.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Depag RI, dalam tim pelaksana proyek berkedudukan sebagai Wakil Pimpinan Proyek.

5. Lokakarya;

Pada upacara penyerahan naskah Rancangan Kompilasi Hukum Islam dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Mahkamah Agung RI, H. Ali Said, S.H. dan Menteri Agama, H. Munawir Sjadzali, MA. Tentang pelaksanaan Lokakarya Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi pada tanggal 2-6 Pebruari 1988 dimaksudkan untuk mendengarkan komentar akhir dari para ulama dan cendikiawan muslim. Ulama dan cendikiawan muslim yang diundang pada lokakarya tersebut adalah wakilwakil yang representatif dari daerah penelitian dan wawancara dengan mempertimbangkan luas jangkauan dan pengaruhnya dalam bidang keahliannya. Mereka yang ikut menghadiri adalah sebanyak 124 orang. Lokakarya tersebut diselenggarakan di Hotel Kartika Chandra Jakarta yang dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung RI, H. Ali Said, S.H. dan ditutup oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, H. Purwoto Ganda Subroto, S.H.

Pelaksanaan pembahasan naskah Rancangan Kompilasi Hukum Islam pada Lokakarya tersebut dibagi dalam dua instansi yaitu sidang Pleno dan sidang Komisi. Masing-masing komisi kemudian membentuk tim perumusny. Pada akhir sidang pleno, wakil dari MUI (KH. Hasan Basri), wakil dari NU (KH. Ali Yafie), dan wakil dari muhammadiyah (KH. A. R.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fachruddin) masing-masing menyampaikan kata akhir justifikasi, sebagai legalitas rumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Lokakarya ini memang mempunyai peranan penting dalam penetapan Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya lokakarya ini, maka seperti apa yang dikemukakan oleh Yahya Harahap bahwa finalnya rumusan Kompilasi bukan ditentukan secara mutlak ditangan panitia. Akan tetapi untuk memperoleh rumusan finalnya, dimintakan lagi persetujuan pendapat dari para ulama, “*ijma*” dari para ulama terkemuka melalui seminar yang bersifat nasional.²²⁸

Proses selanjutnya setelah naskah akhir Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Buku 1 tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang Perwakafan mengalami penghalusan redaksi yang intensif di Ciawi Bogor yang dilakukan oleh Tim Besar Proyek untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden oleh Menteri Agama dengan surat tanggal 14 maret 1988 Nomor : MA/123/1988 Hal : Kompilasi Hukum Islam dengan maksud untuk memperoleh bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktik di lingkungan Peradilan Agama kemudian lahirlah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 22 Juli 1991 Menteri Agama telah mengeluarkan Keputusan No. 154 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991. Selanjutnya Kompilasi ini disebarluaskan Kepada Ketua Pengadilan Tinggi

²²⁸ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hlm. 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama dan Ketua Pengadilan Agama melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Islam tanggal 25 Juli 1991 No. 3694/EV/HK.003/AZ/91. Dengan adanya berbagai landasan hukum dimaksud Kompilasi Hukum Islam ini telah mempunyai tempat yang kokoh dalam sistem hukum Indonesia.

d. Sistemika Perjanjian Perkawinan dalam KHI

Sebagaimana telah disinggung diatas bahwa Kompilasi Hukum Islam ini hanya memuat tiga ketentuan hukum materiil Islam, yakni ketentuan-ketentuan hukum perkawinan, (*munakah}a@r*), hukum kewarisan (*faraid*), dan hukum perwakafan (*waqaf*). Ketiga pengelompokan bidang hukum tersebut ditulis dalam Kompilasi Hukum Islam secara terpisah, masing-masing dalam buku tersendiri. Dalam setiap buku, ketentuan spesifikasi bidang hukum terbagi kedalam bab-bab, dan masing-masing bab dirinci lagi kedalam bagianbagian diurutkan sesuai dengan pengelompokan buku. Sedangkan penomoran pasal diurutkan secara keseluruhan dari buku pertama hingga buku ketiga.

Menurut sebagian pakar hukum permusan-perumusan semacam ini termasuk salah satu poin reformasi hukum Islam yang telah tertuang dalam KHI, sebab dalam fiqh lama tidak merumuskan dengan pola-pola semacam ini.²²⁹ Walaupun ada beberapa pandangan yang kurang setuju dengan gagasan

²²⁹ Salah satunya adalah H. Busthanul Arifin yang mengatakan bahwa KHI bukan saja sebagai bentuk *Reaktualisasi*, melainkan pula sebagai *reformasi* dalam bidang hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perumusan semacam ini, khususnya penempatan posisi peraturan- peraturan tertentu yang kurang sesuai.²³⁰

Sistematika Kompilasi Hukum Islam dimaksud adalah:

- b. Tiga buku, dan 229 pasal, yaitu
 - 1) Buku I: **Hukum Perkawinan**, yang terbagi dalam:
 - a) XIX (Sembilan belas) bab
 - b) 170 pasal (dari pasal 1-170)
 - c. Buku II: **Hukum Kewarisan**, yang terbagi dalam:
 - a) VI (enam) bab
 - b) 44 pasal (dari pasal 171- 214).
 - d. Buku III: **Hukum Perwakafan**, yang terbagi dalam:
 - a) V (lima) bab
 - b) 15 pasal (dari pasal 215- 229)

Berdasarkan sistematika tersebut diatas, tampak dengan jelas bahwa posisi terbesar dan muatan terbanyak ada pada buku pertama hukum perkawinan, kemudian hukum kewarisan dan yang paling sedikit adalah hukum perwakafan. Perbedaan ini timbul bukan karena ruang lingkup materi yang berbeda, tetapi hanya tingkat intensitas dan uraian masing-masing ketentuan tersebut.

²³⁰ Diantaranya H. Abdurrahman, hal ini disebutnya sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang tidak menggambarkan sebuah sistematika yang “baik”. Selain itu, KHI tidak mencantumkan ketentuan umum yang berlaku untuk semua bidang hukum yang diaturnya. Ketentuan umum hanya ada pada masing-masing buku. Itupun isinya lebih banyak berupa keterangan mengenai beberapa istilah saja yang terkadang tidak lengkap, seperti pasal 229 yang seharusnya tergolong pada ketentuan umum justru dimasukkan kedalam ketentuan penutup. Lihat Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqih Mazhab*, hlm. 162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk bidang hukum perkawinan tidak sekedar pada dimensi hukum substantif saja yang diatur, tetapi teknis prosedural yang berkenaan dengan tata cara pelaksanaan pun diatur secara gamblang.²³¹ Namun pada kedua buku yang lainnya, tidak demikian rinci dalam pengaturannya. Materi Perjanjian Perkawinan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat dalam Bab VII terdiri dari Pasal-Pasal (45 sampai dengan 52).

Pada pasal 45 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan “ kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam dua bentuk: 1 taklik talaq dan, 2 perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

a. Konsep Taklik Talaq KHI dan Fiqih

Taklik talaq di Indonesia diatur dalam KHI Pasal 1 'Urf taklik talaq ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talaq yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Kata taklik talaq terdiri dari dua kata, yakni taklik dan talaq. Kata taklik dari kata arab *'allaqa*, *yu'alliqu*, *ta'li@qa@n* yang berarti menggantungkan sesuatu dengan sesuatu atau menjadikannya tergantung dengan sesuatu.²³² Sedangkan para ulama memberikan definisi dengan:

رَبَطَ حُصُولَ مَضْمُونِ جُمْلَةٍ بِحُصُولِ مَضْمُونِ جُمْلَةٍ أُخْرَى وَتَكُونُ الْجُمْلَةُ الْأُولَى جُمْلَةً الْجَزَاءِ وَالثَّانِيَّةُ جُمْلَةً الشَّرْطِ

²³¹ Namun disini tampak terjadi” pembengkakan “ dan terasa tumpang tindih antara aturan-aturan hukum pada UU No. 1 tahun 1974 dan PP.No. 9 tahun 1975 di satu pihak dengan KHI di pihak yang lain, suatu bentuk pengulangan yang dipandang kurang baik.

²³² Louis Ma'lu@f, *Al-Munji@d*, hlm. 549.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Menggantungkan hasil kandungan jumlah yang dinamakan jaza’ (akibat) dengan kandungan jumlah ang lain yang dinamakan syarat”.²³³

Sedangkan kata Talaq berasal dari kata: *t}a@laqa, yut}aliqu, t}ala@qan* yang berarti meninggalkan, memisahkan, melepaskan ikatan.²³⁴ Atau para ulama membeikan definisi talaq secara bahasa adalah:

تَحْرِيرٌ مِنْ قَيْدِهِ وَنَحْوِهِ

“Melepaskan dari ikatan dan semisalnya”.²³⁵

Abd al-rah}man@ al-Jaziri@ dalam kitabnya al-Fiqh ‘Alá al-Madhahib al-Arba’ah, mengatakan bahwa pengertian talaq menurut bahasa:

حَلَّ الْقَيْدِ سَوَاءً كَانَ حِسِّيًّا كَقَيْدِ الْفَرَسِ وَقَيْدِ الْأَسِيرِ أَوْ مَعْنَوِيًّا كَقَيْدِ النِّكَاحِ

Melepaskan ikatan, baik secara indrawi (hakiki) seperti melepaskan kuda atau tahanan, maupun secara maknawi seperti melepaskan perkawinan”.²³⁶

Al-Kahlani dalam kitabnya Subul al-Sala@m mengatakan bahwa talaq menurut bahasa adalah:

الْإِزْسَالُ وَالتَّرُكُ

“Melepaskan perjanjian atau meninggalkannya”.²³⁷

Adapun taklik talaq menurut Wahbah al-Zuhaili@ adalah sebagai berikut:

مَا رَتَّبَ وَقُوعُهُ عَلَى حُصُولِ أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِأَدَاةٍ مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ أَيْ التَّعْلِيلِ مِثْلُ: إِنْ،

²³³ Muh}ammad Shalt}ut dan ‘Ali@ Al-Sayis, *Muqa@ranah al-Madhahib fi al-Fiqhi*, Terj. Zakiy al-Kaaf, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 210.

²³⁴ Louis Ma’lu@f, *Al-Munji@d*, hlm. 488.

²³⁵ Ibra@him Anith, et. Al, *Al-Mu’jam al-Washit}*, Jilid. II, (Mesir: Da@r Ma’arif, 1976), hlm. 567.

²³⁶ Abd al-rah}ma@n al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Alá Madhahib al-Arba’ah*, Jilid. IV, hlm. 274.

²³⁷ Al-Kahlani, *Subul al-Sala@m*, Jilid. III, hlm. 168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِذَا, وَمَتَى, وَلَوْ وَنَحْوَهَا, كَأَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِرَوْجَةٍ: إِنْ دَخَلْتُ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ

“Sesuatu rangkaian pernyataan yang membuktikannya dimungkinkan terjadi diwaktu yang akan datang dengan memakai kata-kata syarat, seperti jika, ketika kapanpun, dan sebagainya, seperti perkataan suami pada istrinya “jika kamu memasuki rumah si fulan maka kamu tertalaq”.²³⁸

Sedangkan menurut Sayyid Sa@biq dalam fiqih sunnahnya dijelaskan mengenai taklik talaq yaitu:

مَا جَعَلَ الرَّوْجُ فِيهِ حُصُولَ الطَّلَاقِ مُعَلَّقًا عَلَى شَرْطٍ, مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِرَوْجَتِهِ: إِنْ ذَهَبْتُ إِلَى مَكَانٍ كَذَا, فَأَنْتِ طَالِقٌ

“Suami dalam menjatuhkan talaq digantungkan kepada suatu syarat, umpamanya suami berkata: Jika engkau pergi kesuatu tempat, maka kamu tertalaq”.²³⁹

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan mengenai pengertian dari taklik talaq yaitu suatu pernyataan talaq yang disampaikan oleh suami, dimana persyaratan tersebut digantungkan pada suatu syarat yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi pada waktu yang akan datang.

Menurut catatan, praktil taklik talaq di mulai dari perintah Sultan Agung Hanyakrakusuma, raja Mataram 1630 Masehi, dalam upaya memberi kemudahan bagi wanita untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan pergi dalam jangka waktu tertentu, disamping jaminan bagi suami bila kepergian itu adalah dalam rangka tugas negara.²⁴⁰ Serta ada juga yang mengatakan bahwa pada saat itu sultan mengeluarkan perintah untuk

²³⁸ Wahbah al-Zuhayli@, *al-Fiqh al-Islami@mi@ Wa Adillatuhu*, Jilid. IX, hlm. 6869.

²³⁹ Sayyid Sa@biq, *Fiqih Sunnah*, Cet. IV, hlm. 222.

²⁴⁰ Khoiruddin Nasution, *Kekuatan Spiritual Perempuan Dalam Taklik Talaq Dan Perjanjian Perkawinan*, hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan taklik talaq setiap pria yang melakukan perkawinan.²⁴¹

Taklik talaq itu dikenal dengan ‘taklik janji dalem’ atau ‘taklik janji ning ratu’, yang berarti taklik talaq dalam kaitan dengan tugas negara.²⁴² Perintah talik talaq itu bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi seorang wanita (istri) untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang telah meninggalkan pergi dalam jangka waktu tertentu, artinya hak istri diperteguh, dan sekaligus memberikan kemudahan bagi sang hakim dalam menjatuhkan talaq yang digantungkan.

Taklik talaq yang terjadi pada masa kerajaan Mataram merupakan pengembangan dari pemikiran dan pemahaman ulama terhadap hukum Islam. Menurut Ahmad Rofiq, taklik talaq bermula dari pendapat Imam Maliki²⁴³ yang mengatakan jika seorang suami pergi jauh tidak ada kabar yang jelas, tidak ada nafkah yang ditinggalkan, serta tidak menunjuk wakil untuk memberi nafkah kepada istri. Istri berhak mengajukan permohonan pada hakim, dan jika hal itu terbukti hakim akan menjatuhkan talaq satu kepada keduanya.²⁴⁴ Demikian juga istri dapat mengajukan syarat, agar dirinya tidak dimadu, syarat ini dibenarkan oleh mazhab Hanbali.

Adapun bunyi taklik talaqnya sebagai berikut yang diberlakukan di

²⁴¹ Zaini Ahmad Noeh, *Pembacaan Sighat Taklik Talaq Susudah Akad Nikah*, *Mimbar Hukum* (Jakarta: Ditbinbapera, No. 30 Vol. VII, 1997), hlm. 64.

²⁴² Peunoh Dally, *Rujuk, Hadhonah, dan Nafkah Kerabat Dalam Naskah Mir'at al Thullab: Suatu Studi Perbandingan Hukum Istri Menurut Ahlussunnah*, Disertasi tidak diterbitkan (Jakarta: Perpustakaan Syari'ah UIN Syahid, 1983), hlm 85.

²⁴³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.127.

²⁴⁴ Muh}ammad Bashir al-Shuqfah, *al-Fiqih al-Maliki fi Thaubihi al-Jadi@d*, (Damaskus: Da@r al-Qalam 1420 H/2000 M), hlm. 665-668.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerajaan Mataram.²⁴⁵

“Mas penganten, pakenira tompo taklik janji dalem, samongso pakenira nambang (ninggal) rabi pakenira...lawase pitung saso lakon daratan, hutawa nyabrang sagoro rong tahun, saliyane ngelakoni hayahan dalem, tantaimane rabi pakenira nganti darbe hatur rapak (sawan) hing pengadilan hukum, sawuse terang papriksane runtuh talaq paprikane sawiji’

(Wahai Pengantin pria, engkau menerima taklik janji dalem, sewaktu –waktu engkau menambang (meninggalkan pergi) istrimu bersama...selama tujuh perjalanan darat, atau menyebrangi lautan selama dua tahun, kecuali dalam perjalanlan tugas negara, dan istrimu tidak rela sehigga mengajukan rapak (menghadap) ke pengadilan hukum, setelah pemeriksaanya, maka jatuhlah talaq satu untukmu)

Pada waktu itu, shigat taklik talaq diucapkan oleh penghulu naib, bukan oleh mempelai pria. Mempelai pria hanya cukup menjawab ‘hinggi sandika’ (ya, saya bersedia). Bentuk taklik talaq semacam ini pada waktu itu berlaku di daerah surakarta dan berjalan sangat lama hingga menjelang kemerdekaan.

Melihat bahwa format taklik talaq di Jawa itu bermanfaat dalam menyelesaikan perselisihan antara suami istri, maka banyak penguasa dari luar Jawa dan Madura memberlakukannya di daerahnya masing-masing. Ini terjadi lebih merata dengan belakunya Ordinasi pencatatan nikah untuk luar Jawa dan Madura, yakni melalui Stbl 1932 No. 482. Ini terbukti dengan berlakunya taklik talaq di daerah Minang Kabau (1925) bahkan di Muara Tembusi (1910), begitu pula di daerah Sumatra Selatan, Kalimantan Barat dan Selatan, serta Sulawesi

²⁴⁵ Moh. Adnan dan Mardi Kintoko, *Buku tata cara Islam*, (Surakarta: tpn, 1924), hlm. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selatan.²⁴⁶

Para ulama kemudian menyarankan agar dalam sighat taklik talaq ditambah dengan *iwad*} (uang pengganti). Ini untuk menjamin agar jatuhnya talaq akibat taklik talaq menjadi *t}alaq ba'in* atau *t}alaq khul'i* sehingga seorang suami yang mempunyai niat buruk tidak serta merta dapat merujuk kembali terhadap bekas istrinya yang selama itu menderita akibat perbuatan suaminya.

Adapun bunyi shigat taklik talaq yang berkembang saat ini sesuai dengan Ketetapan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 adalah sebagai berikut:

Sesudah akad nikah, saya : bin ... berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama :.. binti .. dengan baik (mu'a@sharah bi al-ma'ru@f) menurut ajaran Islam.

*Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik sebagai berikut :
Apabila saya :*

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri sayamembayar uang sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwad} (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talaq saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang 'iwad} (pengganti) tersebut untuk keperluan ibadah sosial.²⁴⁷

²⁴⁶ Ibid, hlm 66.

²⁴⁷ Departemen Agama RI, Akta Nikah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari urian tentang poin-poin taklik talaq diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut;

Dalam hal ini meninggalkan dua tahun berturut-turut, KHI tidak mengaturnya secara sepihak, namun dapat dikorelasikan hal itu dengan Pasal 116 (b) yang berbunyi 'perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau bukan hal lain di luar kemampuannya'. Berdasarkan ketentuan pasal ini, maka kepergian suami selama dua tahun berturut-turut tidak begitu saja dikategorikan melanggar taklik talaq apabila kepergiannya itu atas persetujuan istri atau karena suatu hal yang tidak dapat ditolak dan harus dilaksanakan.

Kemudian sesuai dengan Pasal 133 ayat 1 KHI, perhitungan waktu kepergian suami dimulai pertama kali meninggalkan rumah. Dan hal ini dapat dibuktikan dengan surat pernyataan Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Camat.

Meskipun telah terbukti kepergian suami lewat dua tahun dan dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala desa, namun hal ini belum cukup, karena harus ditambah pula dengan pernyataan suami yang menunukan sifat tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 133 ayat 2).

2. Tidak memberikan nafkah wajib selama tiga bulan;

Ketika terjadi perkawinan, maka suami sebagai kepala rumah tangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai tugas dan kewajiban untuk melindungi dan memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Sesuai dengan Pasal 80 ayat 4 KHI, yang menyatakan:

- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Apabila suami melalaikan kewajibannya memberikan nafkah selama tiga bulan berturut-turut, maka istri berhak mengambil tindakan hukum melalui pengadilan agama, dan apabila suami terbukti bersalah, maka istri bukan saja berhak mengajukan perceraian, namun juga berhak mendapatkan kembali nafkah yang belum dibayar oleh suami sebagai hutang yang harus dilunasi oleh suami.

3. Menyakiti badan atau jasmani;

Dalam Peraturan Menteri Agama Ri No 2 Tahun 1990 merumuskan kata menyakiti terbatas pada menyakiti badan atau jasmani saja. Akan tetapi PP No 9 Tahun 1975 mengatakan bahwa penganiayaan mental bisa dijadikan alasan untuk perceraian. Dengan demikian antara PP No 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara menentukan suatu perbuatan bisa dikatakan menyakiti atau membahayakan istri. Standar obyektif yang digunakan untuk menilai hal itu sangat sulit ditentukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi hakim dapat menggunakan hasil visum dokter untuk menentukan ada tidaknya perbuatan yang menyakiti istri yang dapat digunakan sebagai alasan perceraian.

4. Membiarkan (tidak memperdulikan istri) selama enam bulan berturut-turut
Sebagai hakim pengadilan agama mengartikan kata 'membiarkan' dengan pengertian alamat suami diketahui dan dihubungi, tetapi suami tidak mau ketempat istrinya dan tidak memperdulikannya sama sekali.

Jadi kata membiarkan dapat diidentifikasi pada Pasal 34 ayat 4 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat diajukan ke pengadilan dengan alasan salah satu pihak (dalam hal ini suami) telah melalaikan kewajibannya sebagai suami.

Pada saat ini menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pengucapan sighat taklik talaq, yang menurut sejarah untuk melindungi hak-hak wanita (istri) yang ketika itu belum ada peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut, untuk sekarang ini pengucapan sighat taklik talaq tidak diperlukan lagi.²⁴⁸ Adapun alasan keputusan ini adalah;

Pertama, menurut KHI Pasal 46 ayat (3), perjajian taklik talaq bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan.

Kedua, bahwa konteks mengucapkan shigat taklik talaq menurut sejarahnya adalah untuk melindungi hak-hak wanita, dimana waktu itu taklik talaq belum ada dalam peraturan perundang-undangan perkawinan. Karena itu,

²⁴⁸ Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta; Erlangga, 2011), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

setelah adanya aturan tentang itu dalam peraturan perundang-undangan perkawinan, maka mengucapkan shigatnya tidak diperlukan lagi.²⁴⁹

b. Konsep Perjanjian Perkawinan dalam KHI

Sementara perjanjian perkawinan yang disebutkan pada poin kedua pasal 43 ayat (1) KHI adalah perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian lain yang dimaksud antara lain adalah perjanjian tentang harta perkawinan. Terkait dengan hal ini, KHI mengatur lain dua jenis substansi perjanjian perkawinan terkait harta, antara lain meliputi percampurn harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing.

Ketentuan pertama menyatakan bahwa KHI memperbolehkan perjanjian perkawinan terkait percampuran harta pribadi masing-masing pihak baik suami dan isteri. Pasal 47 ayat (3) KHI menegaskan bahwa penggabungan harta pribadi menjadi harta bersama antara suami dan istri adalah sesuai dengan menurut hukum Islam.²⁵⁰ Pendapat ini mengakui bahwa apa yang diatur oleh pasal 35, 36, dan 37 Undang-undang No.1 tahun 1974 terkait harta bersama adalah sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam.

Adanya kesingkronan antara pasal 35 ayat (1) dengan pasal 47 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama. Sementara pada pasal 47 ayat (2) KHI menegaskan bahwa harta pribadi dapat

²⁴⁹ Ibid, hlm. 364.

²⁵⁰ Idris Ramuyo, *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bercampur apabila diadakannya perjanjian perkawinan. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjadi penegas dari pasal 57 ayat (2) KHI terkait perjanjian perkawinan. Bahwa perjanjian perkawinan memang diperbolehkan berisi tentang pencampuran harta pribadi menjadi harta bersama.

Ketentuan lain yang kedua menyatakan bahwa dalam KHI juga memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan yang berisi tentang pemisahan harta pencaharian masing-masing. Pasal 48 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagaimana berikut:

- 1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- 2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal tersebut menyatakan bahwa diperbolehkan perjanjian perkawinan untuk berkenaan dengan pemisahan harta bersama. Hal itu berarti sejalan dengan bunyi pasal 86 ayat (1) dan (2) KHI.

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan;
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa “perjanjian perkawinan” menurut KHI bukan hanya terbatas pada harta yang didapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama perkawinan, akan tetapi mencakup harta bawaan masing-masing suami istri. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan terhadap harta bersama yaitu perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah, perjanjian tersebut dibuat oleh calon suami istri untuk mempersatukan atau memisahkan harta kekayaan pribadi masing-masing selama perkawinan berlangsung, tergantung dari apa yang disepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Isi perjanjian tersebut berlaku pula bagi pihak ketiga sejauh pihak ketiga tersangkut.

Perjanjian perkawinan yang dibuat antara calon suami istri tentang pemisahan harta bersama atau harta syarikat tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila setelah dibuat, perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, menurut Pasal 48 ayat (2) KHI dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami tetap menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

2 Bentuk Perjanjian Perkawinan

Perjanjian pada umumnya dapat berbentuk perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis (lisan). Perjanjian tertulis kerap kali disamakan dengan istilah kontrak dalam dunia bisnis. Akta merupakan salah satu jenis perjanjian tertulis. Pengertian akta itu sendiri adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani dibuat oleh seorang atau lebih pihak-pihak dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Akta dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

a. Akta Otentik

Pengertian akta otentik dapat dilihat dalam Pasal 1886 KUHPerdara, dimana disebutkan bahwa akta otentik adalah “suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya”. Akta otentik memiliki keistimewaan tersendiri sebagai suatu alat bukti yang sempurna. Artinya, apabila seseorang yang tengah menjalani proses hukum dan mengajukan akta otentik sebagai salah satu alat bukti di persidangan, maka hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis di dalam akta merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi, dan hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian.

Pada negara yang menganut sistem hukum *common law* dikenal 2 (dua) bentuk dasar dari akta sebagaimana diuraikan dalam buku karangan Ros Macdonald dan Denise McGill, yaitu:

“Deeds are two basic types-indentures and deed polls. An indenture is a deed made between two or more parties representing different interests and a deed poll is a deed made by one person or, if made by two or more persons, made by them all with the same intention and representing the same interest”.²⁵¹

(Akta terbagi menjadi dua bentuk dasar perjanjian ganda adalah sebuah akta yang dibuat antara dua orang atau lebih yang mewakili kepentingan yang berbeda-beda dan akta pemilihan adalah akta yang dibuat oleh satu

²⁵¹ Ros Macdonald and Denise McGill, *Lexis Nexis Skills Series Drafting*, Second Edition, (Australia: Lexis Nexis Butterworths, 2008), hml. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang atau, apabila dibuat oleh dua orang atau lebih, dibuat oleh semua pihak dengan tujuan yang sama dan mewakili kepentingan yang sama).

b. Akta di Bawah Tangan;

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak boleh atau tanpa perantaraan seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila para pihak yang membuat dan menandatangani akta di bawah tangan tersebut tidak menyangkal isi dan mengakui tanda tangannya, maka akta di bawah tangan dapat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik.

Hal ini tertuang dalam Pasal 1875 KUHPerdara.²⁵²

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terdapat beberapa perbedaan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan, antara lain:

- 1) Dilihat dari segi bentuk: Akta otentik dibuat sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sedangkan akta di bawah tangan tidak terikat dalam bentuk formal;
- 2) Dilihat dari segi pihak yang membuat: Akta otentik harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, sedangkan akta di bawah tangan dapat dibuat bebas oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan;
- 3) Dilihat dari segi kekuatan hukum: Akta otentik memiliki kekuatan hukum sempurna, sedangkan akta di bawah tangan baru akan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik apabila para pihak yang

²⁵² Ibid, hlm 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menandatangani akta di bawah tangan tersebut tidak menyangkal mengenai isi dan mengakui tanda tangannya;

- 4) Dilihat dari segi beban pembuktian: Akta otentik apabila ada seseorang yang menyangkal kebenarannya, maka orang itulah yang harus membuktikan ketidakbenaran tersebut, sedangkan akta di bawah tangan apabila kebenarannya disangkal maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan tersebut sebagai buktilah yang harus membuktikan kebenaran dari isi maupun tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut.

Bentuk perjanjian perkawinan telah diatur dalam Pasal 147 KUHPerdara yang mana disebutkan bahwa “Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung”. Pasal ini telah dengan tegas menyatakan bahwa pembuatan perjanjian perkawinan harus dalam bentuk akta Notaris dan hal ini bermaksud agar:

- a) Perjanjian perkawinan tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat;
- b) Memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami-Istri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian perkawinan mempunyai akibat yang luas.

Untuk membuat perjanjian perkawinan dibutuhkan seseorang yang benar-benar menguasai hukum harta perkawinan dan dapat merumuskan semua syarat dengan teliti. Hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa bentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta perkawinan harus tetap sepanjang perkawinan tersebut. Suatu kekeliruan dalam merumuskan syarat dalam perjanjian perkawinan tidak dapat diperbaiki lagi sepanjang perkawinan.²⁵³

Lain halnya dengan pengaturan mengenai bentuk perjanjian perkawinan yang tercantum dalam Pasal 147 KUHPerdara tersebut di atas, dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya disyaratkan bahwa calon suami-istri dapat membuat suatu persetujuan dalam bentuk tertulis sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, dengan demikian dapat diartikan bahwa para calon suami-istri dapat membuat Perjanjian Perkawinan sendiri tanpa harus datang dan membuat Perjanjian Perkawinan di hadapan Notaris.

Masalah bentuk perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29 ini adalah lebih sederhana dan kuat karena harus dibuat secara tertulis kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perjanjian perkawinan diucapkan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan mana yang dibuat oleh kedua belah pihak secara tertulis dapat juga dibuat dalam bentuk akta dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan.

Dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur ketentuan-ketentuan perjanjian perkawinan secara terperinci, oleh karena ketentuan-ketentuan

²⁵³Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cet. II, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian perkawinan itu merupakan hukum tambahan (*anvullend recht*) yang berarti para pihak dapat mengadakan perjanjian menurut keinginan mereka dengan ketentuan bahwa kehendak mereka yang dicantumkan dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Dengan adanya kebebasan untuk memilih bentuk perjanjian perkawinan ini membawa konsekuensi bagi calon suami istri yang mengadakan perjanjian perkawinan untuk memilih bentuk selain perjanjian perkawinan seperti tersebut diatas (persatuan untung rugi atau persatuan hasil dan pendapatan). Oleh karenanya jika calon suami istri mengadakan perjanjian perkawinan dengan tujuan untuk mengadakan perpisahan harta kekayaan perkawinan di antara mereka, diperbolehkan.²⁵⁴

Pengaturan bentuk perjanjian perkawinan sebagaimana dituangkan dalam KUHPdata dimaksudkan agar calon suami istri pada saat membuat perjanjian perkawinan dapat memilih bentuk perjanjian yang disepakati cukup dengan merujuk pada salah satu dari ketiga macam bentuk perjanjian perkawinan tersebut.²⁵⁵

2. Isi Perjanjian Perkawinan

KUHPdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perjanjian Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai isi Perjanjian

²⁵⁴Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat, Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek*, (Bandung: Tarsito, 1988), hlm. 99.

²⁵⁵H.M. Ridhan Indra, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1994), hlm. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan itu sendiri. Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Sementara dalam Pasal 139 KUHPerdata disebutkan bahwa Perjanjian Perkawinan dapat dibuat asal Perjanjian Perkawinan itu sendiri tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum. Meskipun tidak diatur secara tegas mengenai isi dari Perjanjian Perkawinan pada kedua perundang-undangan tersebut, apabila dilihat dari penjabaran pasal-pasal yang ada, terutama dalam KUHPerdata, isi dari Perjanjian Perkawinan berkaitan dengan harta benda perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 139 KUHPerdata calon suami-istri berhak mengadakan penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai kebersamaan harta perkawinan dengan membuat Perjanjian Perkawinan.

Penyimpangan terhadap ketentuan mengenai kebersamaan harta perkawinan tersebut memiliki konsekuensi mengenai isi Perjanjian Perkawinan itu sendiri, menurut Abdul Kadir Muhammad dapat mengenai segala hal, asal saja tidak melanggar batas-batas, agama dan kesusilaan.²⁵⁶

Adapun isi perjanjian perkawinan yang berkembang dimasyarakat antara lain:

- a. Pemisahan harta perkawinan, Perkawinan akan berdampak pada terjadinya persatuan harta benda perkawinan suami-istri. Namun apabila suami-istri tidak menginginkan tercampurnya harta masing-masing pihak ke dalam harta benda perkawinan, maka pasangan suami-istri harus menuangkannya

²⁵⁶ Abdul Kadir Muahmmad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara jelas dalam Perjanjian Perkawinan. Para pihak harus dengan tegas menyatakan bahwa diantara mereka tidak terdapat percampuran harta dan selain tidak terjadinya percampuran harta, para pihak juga harus dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak menghendaki terjadinya percampuran harta dalam bentuk lain, misalnya persatuan untung dan rugi atau persatuan hasil pendapatan dan dengan terjadinya pemisahan harta maka dalam perkawinan tersebut terdapat dua macam harta perkawinan, yaitu harta pribadi suami dan harta pribadi istri;

- b. Persatuan untung rugi, Perjanjian Perkawinan dengan persatuan untung rugi dimaksudkan adalah antara suami istri tidak terdapat persatuan bulat, namun mereka memperjanjikan persatuan secara terbatas, yaitu persatuan untung rugi saja. Keuntungan dan kerugian menjadi hak dan kewajiban suami-istri secara bersama-sama. Melalui Perjanjian Perkawinan untung rugi ini terdapat 3 (tiga) jenis harta kekayaan, yaitu: harta persatuan yang terbatas, yakni harta persatuan untung dan rugi, harta pribadi suami dan harta pribadi istri. Dengan adanya persatuan untung dan rugi maka semua keuntungan yang diperoleh dan semua kerugian yang diderita sepanjang perkawinan akan menjadi bagian dan beban suami-istri menurut perbandingan yang sama besarnya. Apabila dalam suatu Perjanjian Perkawinan ditentukan adanya persatuan untung dan rugi, maka terhadap harta yang berupa barang bergerak harus dicatat dalam akta Perjanjian Perkawinan tersebut. Pembagian dari untung dan rugi biasanya dilaksanakan dalam dua bagian yang sama besarnya, kecuali mengenai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembagian tersebut ditentukan lain di dalam Perjanjian Perkawinan (Pasal 156 KUHPerdara);

- c. Persatuan hasil dan pendapatan, Pengaturan mengenai persatuan hasil dan pendapatan hanya terdapat dalam Pasal 164 KUHPerdara yang menyatakan “Perjanjian, bahwa antara suami-isteri hanya akan berlaku persatuan hasil dan pendapatan, berarti secara diam-diam suatu ketiadaan persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, dan ketiadaan persatuan untung dan rugi”. Pasal tersebut menerangkan bahwa persatuan hasil dan pendapatan adalah bentuk lain dari macam harta kekayaan yang tidak berupa pemisahan harta secara keseluruhan dan bukan pula persatuan untung dan rugi. Jadi, di samping dapat memuat atau mengatur tentang persatuan untung dan rugi, para pihak dalam Perjanjian Perkawinan juga dapat membuat pengaturan tentang persatuan hasil dan pendapatan. Persatuan hasil dan pendapatan ini pada dasarnya hampir sama dengan persatuan untung dan rugi, hanya saja bentuk persatuan ini dilakukan dengan pembatasan bahwa semua hutang yang melebihi aktiva persatuan hasil dan pendapatan akan menjadi tanggungan pihak yang memiliki hutang tersebut. Hutang-hutang yang ada di luar persatuan atau dengan kata lain hutang-hutang tersebut akan menjadi kewajiban atau tanggungan pribadi dari pihak yang berhutang tersebut kepada pihak ketiga (kreditur);²⁵⁷

²⁵⁷ J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*, Cet. II, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012), hlm. 28-32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga Bagi pihak ketiga yang menjadi kreditor, adalah penting untuk mengetahui bagaimana kedudukan harta kekayaan suami-istri. Hal ini berkait dengan kepastian terlunasinya piutang. Jika suamiistri kawin dengan persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, maka utang yang dibuat oleh suami-istri dapat dituntut pelunasannya dari harta persatuan. Sebaliknya jika suami-istri kawin dengan pisah mutlak harta suami, demikian pula utang yang dibuat oleh istri;

Menurut Undang-undang Perkawinan, sebuah perjanjian kawin dapat mengikat pihak ketiga, dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi : “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 50 ayat (1) yang berbunyi : “ Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

- e. Tidak terbatas pada masalah keuangan saja, isi perjanjian kawin bisa meliputi hal-hal yang kira-kira dapat berpotensi menimbulkan masalah selama perkawinan, antara lain hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, tentang pekerjaan, tentang para pihak tidak boleh melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal-hal sebagaimana diatur dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian ataupun kematian, juga tentang warisan dan hibah;

- f. Pada perjanjian kawin juga dapat menyebutkan tentang tanggung jawab terhadap anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan, baik dari segi pengeluaran sehari-hari, maupun dari segi pendidikan. Walaupun pada prinsipnya semua orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan dan tumbuh kembang anak, sehingga istri juga ikut bertanggung jawab dalam hal ini, itu semua bisa disepakati bersama demi kepentingan anak;
- g. Bahkan dalam perjanjian kawin dapat diperjanjikan bagi pihak yang melakukan poligami diperjanjikan mengenai tempat kediaman, Waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya (pasal 52 KHI). Bahkan dalam perjanjian kawin dapat diperjanjikan bagi pihak yang melakukan poligami diperjanjikan mengenai tempat kediaman, Waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya (pasal 52 KHI).

“Perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan *goeden zeden* (tata susila), *openbare orde* (ketertiban umum) dan tidak boleh bertentangan dengan dasar-dasar hukum perkawinan”.²⁵⁸ Secara lebih khusus

²⁵⁸R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Perikatan*, hlm. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lagi isi perjanjian perkawinan harus memperhatikan syarat syarat sebagaimana tertuang di KUHPerdara Pasal 139 -142 yaitu:

1. Perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan tata susila yang baik atau ketertiban umum (Pasal 139 KUHPerdara);
2. Perjanjian yang dibuat tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh KUHPerdara diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga (Pasal 140 KUHPerdara);
3. Calon suami-istri tidak boleh melepaskan hak-hak yang diberikan oleh undang-undang untuk mewarisi harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis ke bawah (Pasal 141 KUHPerdara);
4. Perjanjian yang dibuat tidak boleh mengatur tentang kewajiban salah satu pihak dalam perjanjian untuk menanggung hutang yang lebih besar daripada pihak lain dalam perjanjian tersebut (Pasal 142 KUHPerdara);
5. Dalam perjanjian yang dibuat tidak boleh memperjanjikan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut diaur oleh suatu undang-undang tertentu, adat istiadat, kitab undang-undang, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang dulu pernah berlaku di Indonesia (Pasal 143 KUHPerdara);
6. Tidak boleh membuat perjanjian-perjanjian yang bersifat kalimat yang umum, bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh Undang-Undang negara lain atau oleh adat kebiasaan yang pernah berlaku di Indonesia.²⁵⁹

²⁵⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975*, (Medan: CV. Zahi Trading Co, 1975), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perubahan Perjanjian Perkawinan

Pasal 149 KUHPerdara mengatur dengan tegas bahwa “Setelah Perkawinan berlangsung, Perjanjian Perkawinan dengan cara bagaimanapun, tidak boleh diubah”. Bunyi pasal tersebut berarti menurut ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdara, pasangan suami-istri yang membuat Perjanjian Perkawinan tidak diijinkan atau dilarang untuk melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Perkawinan tersebut setelah perkawinan mereka berlangsung. Apabila para pihak dalam Perjanjian Perkawinan ingin melakukan perubahan atas isi Perjanjian Perkawinannya, maka segala perubahan yang dikehendaki harus dilakukan sebelum perkawinan berlangsung dan perubahan-perubahan tersebut harus dituangkan dalam bentuk akta dan tidak diperkenankan untuk menuangkan perubahan tersebut dalam bentuk lainnya.

Pengaturan mengenai larangan perubahan Perjanjian Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 149 KUHPerdara berbeda dengan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”. Hal ini berarti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih memberikan peluang bagi pasangan suami-istri sebagai para pihak dalam Perjanjian Perkawinan untuk melakukan perubahan terhadap isi dari Perjanjian Perkawinan yang mereka buat bahkan setelah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlangsungnya perkawinan. Perubahan yang dibuat oleh para pihak dapat dilakukan apabila sebelumnya telah diperjanjikan terlebih dahulu dan perubahan yang akan dibuat nantinya tidak akan merugikan pihak ketiga yang terkait dalam Perjanjian Perkawinan tersebut. Apabila perubahan yang dilakukan membawa kerugian bagi para pihak maupun pihak ketiga maka Perjanjian Perkawinan tersebut dapat dibatalkan atau bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum.

4. Masa Berlaku Perjanjian Perkawinan

Berkenaan dengan masa berlakunya Perjanjian Perkawinan, baik KUHPerdata maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat pengaturan yang sama, yakni Perjanjian Perkawinan berlaku semenjak perkawinan dilangsungkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 147 KUHPerdata yang berbunyi: “Perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan; lain saat untuk itu tak boleh ditetapkan”, kemudian pengaturan yang sama dapat dilihat dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: “Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan”. Kedua ketentuan tersebut berlaku secara intern atau antara para pihak yang membuat Perjanjian Perkawinan (pasangan suami-istri) dan tidak berlaku bagi pihak ketiga yang terkait dalam Perjanjian Perkawinan tersebut. Dalam Pasal 152 KUHPerdata disebutkan bahwa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan tercantum dalam Perjanjian Perkawinan, yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut undang-undang seluruhnya atau untuk sebagian, tak akan berlaku terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuan-ketentuan itu dibukukan dalam suatu register umum, yang harus diselenggarakan untuk itu di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu telah dilangsungkan, atau, jika perkawinan berlangsung di luar negeri, dikepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukannya.

Perjanjian Perkawinan akan secara langsung berlaku bagi pasangan suami-istri yang membuat Perjanjian Perkawinan sejak perkawinan mereka berlangsung namun Perjanjian Perkawinan tidak serta merta berlaku bagi pihak ketiga ketika Perjanjian Perkawinan itu dibuat. Perjanjian Perkawinan akan berlaku bagi pihak ketiga apabila Perjanjian Perkawinan tersebut telah didaftarkan di buku register umum di Pengadilan Negeri.

Pendaftaran tersebut harus dilakukan pada saat pihak ketiga berhubungan dengan suami-istri yang membuat Perjanjian Perkawinan tersebut. Jika pendaftaran tersebut baru dilakukan setelah pihak ketiga mempunyai hubungan hukum dengan suami-istri itu, maka suami-istri tidak dapat menempatkan pihak ketiga pada posisi yang dapat merugikan pihak ketiga itu. Sedangkan bagi mereka yang mengadakan hubungan hukum sesudah terjadinya pendaftaran, maka mereka terikat terhadap Perjanjian Perkawinan yang telah didaftarkan tersebut.²⁶⁰

²⁶⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *hukum...*, hlm. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan yang telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan berlaku mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak calon suami istri. Jika perjanjian perkawinan yang telah dibuat suami istri tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat maka secara otomatis memberikan hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan perceraian. Upaya hendak mempertahankan perjanjian perkawinan yang telah disahkan merupakan hak bagi semua pihak yang berjanji. Perkara tentang sengketa perjanjian perkawinan harus diselesaikan oleh penegak hukum yang berwenang.

Perjanjian perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tentang sahnya perjanjian-perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara dan syarat-syarat khusus mengenai pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan) harus dipandang berlaku sesuai dengan Undang-Undang bagi pihak yang berjanji, seperti dalam pasal 1338 KUHPerdara: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Oleh karena itu, apabila suatu perjanjian yang telah disepakati itu dilanggar oleh salah satu pihak yang turut menyepakatinya, maka secara hukum, tidak ada sanksi yang dapat diterapkan kepada pelanggar sebagai kosekuensi atas pelanggaran perjanjian yang telah dilakukan olehnya. Akan tetapi pelanggaran tersebut hanya dapat dijadikan sebagai alasan²⁶¹ untuk

²⁶¹ Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan*, hlm. 20-22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Hal ini sebagai mana diatur dalam KHI Pasal 51. Namun pasal ini hanya berlaku ketika perjanjian perkawinan yang disepakati didaftarkan secara legal yang didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga dapat dijadikan sebagai alasan dalam pengajuan perceraian di Pengadilan Agama.

Perikatan dapat terjadi karena dua hal, yaitu karena perjanjian dan karena undang-undang, sebagaimana ketentuan pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perikatan yang lahir karena undang-undang berbeda dengan perikatan yang lahir dari perjanjian, oleh karenanya diatur secara khusus dalam Bab III Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di bawah judul besar “Tentang Perikatan-Perikatan Yang Dilahirkan Demi Undang-Undang”.

Perikatan yang lahir karena undang-undang dapat timbul dari undang-undang semata-mata atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia, sebagaimana rumusan pasal 1352 KUH Perdata. Digolongkan lebih lanjut dalam pasal 1353 KUH Perdata bahwa perikatan yang lahir karena undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia timbul karena perbuatan halal atau perbuatan melanggar hukum.

Perjanjian perkawinan dalam KUHPerdata dalam Pasal 139-154 di Indonesia merupakan perikatan yang lahir dari Undang-undang bukan lahir dari perjanjian. Sehingga pengembangan mengenai bentuk perjanjian perkawinan tidak dapat dibuat semaunya sendiri oleh pasangan suami istri. Adapun bentuk perjanjiannya seperti pemisahan harta sama sekali, perjanjian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

percampuran laba rugi (*gemeenschap van winst en verlies*), dan perjanjian pencampuran penghasilan (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*).

Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran perjanjian perkawinan ini adalah salah satu pasangan dapat mengajukan gugat ke pengadilan dalam hal gugatan perceraian. Perjanjian perkawinan dalam hukum positif di Indonesia ini lebih menekankan kepada antisipasi terhadap masalah harta perkawinan yang dibawah sebelum perkawinan ataupun yang diperoleh semasa perkawinanketika terjadi perceraian.

Sedangkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29 perjanjian perkawinan memiliki konsep yang luas yaitu dapat dibuat dengan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Serta dalam penjelas pasal 29 ini menyatakan perjanjian perkawinan tidak termasuk taklik talaq seperti yang di atur dalam KHI pasal 45-52. Karena taklik talaq di Indonesia tidak bersifat bilateral tetapi unilatera, oleh karena itu bukan saja mengikat yang mengucapkan tetapi juga menjadi sumber hak bagi pihak-pihak lain yang disebut dalam pernyataan itu.²⁶²

²⁶² Hazairin, *Tinjauan Perundang-Undangan Perkawinan...*, hlm. 28-29.



3. Konstruksi Perjanjian Perkawinan Sebagai Model dalam Membangun Keluarga Sakinah di Indonesia

a) Konstruksi Perjanjian Perkawinan dengan Pendekatan Fiqih Keluarga Progresif

Pada masa saat ini situasi transisi dan perubahan sangat cepat terjadi, seperti halnya hukum keluarga Indonesia memiliki banyak catatan untuk dikaji. Selain itu pengembangan hukum keluarga ini tengah membutuhkan cara pandang berbeda atau menelisik kembali sehingga dapat memberikan nuansa baru bagi perkembangan hukum keluarga yang lebih akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal seperti keadilan, hak asasi manusia, pluralitas, demokratis dan lain-lain.

Hukum Islam dalam berbagai bidang termasuk hukum keluarga adalah tatanan (hukum ada dalam sebuah tatanan yang paling tidak di bagi kedalam tiga yaitu: tatanan transendental, tatanan sosial dan tatanan politik) yang untuh (holistik) selalu bergerak, baik secara *evolutif* maupun *revolusioner*. Sifat pegerak ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari atau dielakkan. Keping pemikiran demikian akan dijumpai dalam banyak gagasan tentang hukum bukan sekedar logika semata, lebih dari itu hukum merupakan ilmu sebenarnya (*genuine science*).

Pandangan diatas melihat hukum sebagai objek ilmu yang selalu berusaha untuk memahami atau melihat kaitan dengan hal-hal di belakang hukum, keinginan untuk melihat logika sosial dari hukum lebih besar daripada logika hukum atau perundang-undangan, yang harus selalu dimaknai sehingga selalu *up to date*. Pemikiran konvensional hukum keluarga yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama ini mendominasi karakteristik berfikir ilmuwan hukum dalam pandang demikian ini merupakan tragedi pemikiran. Salah satu dari sekian banyak ide tentang hukum keluarga adalah apa yang disebutkan sebagai ‘*pemikiran hukum progresif*’.

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*²⁶³ (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.²⁶⁴

Ada empat persoalan mendasar yang menjadi tantangan dan tuntutan dalam hidup dan kehidupan keluarga pada umumnya dan kehidupan keluarga muslim pada khususnya yang memasuki era modern sekarang ini. Empat persoalan yang dimaksud adalah tantangan dan tuntutan Hak Asasi Manusia (HAM), adanya tuntutan dan kesadaran tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (*gender equality and gender justice*) sebagaimana disebutkan diatas, legislasi modern (*modern legislation*) dan budaya (*culture*) keluarga.

Dalam merespon berbagai persoalan kemanusiaan kontemporer, sebagaimana dijelaskan di muka bahwa salah satu tren pemikiran Islam adalah Islam progresif dan dalam bidang hukum Islam (fiqih) muncul pula

²⁶³ *Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)*, Edisi ketiga; (Oxford: Oxford University Press), hlm. 342.

²⁶⁴ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 628.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fiqih Islam progresif. Fiqih Islam progresif dengan demikian merupakan fiqih Islam yang dibangun di atas landasan Islam progresif. Secara umum Islam Progresif dapat dimaksudkan untuk memberi penekanan utama kepada pengembangan ilmu pengetahuan, wacana keadilan, keterbukaan, sikap toleransi, dan perlunya membangun integrasi moral kaum muslimin dalam membangun negara dan bangsa. Di samping itu Islam progresif bukan hanya memahami Islam sebagai hanya agama, tetapi lebih jauh Islam juga sebagai peradaban.

Islam progresif merupakan pengembangan lebih mendalam dan lanjut dari pemikiran dan posisi Islam moderat yang sering diperhadapkan dengan Islam radikal di satu pihak, dan Islam liberal yang dianggap lebih sekular di pihak lain. Akan tetapi meskipun demikian dalam beberapa sisi antara pemikiran Islam progresif dan Islam liberal dapat dipertukarkan dan dipertemukan.²⁶⁵ Pakar muslim selain memiliki persamaan dan sekaligus perbedaan pendapat dalam mendefinisikan Islam progresif ini. Perbedaan ini berimplikasi pula pada perbedaan para pemikir kontemporer dalam menjelaskan definisi dan kerangka metodologi Islam progresif.

Syed Hussein Alatas misalnya menjelaskan bahwa term Islam progresif tidak menyiratkan adanya abstraksi ataupun reduksi dari totalitas Islam, melainkan sebuah istilah yang mengindikasikan bahwa Islam itu memang sejatinya bersifat progresif. Karakter dan watak orisinal Islam seperti inilah sesungguhnya yang diangkat dan dimunculkan ke permukaan.

²⁶⁵ Rachman, Budhy Munawar, *Reorientasi Pembaruan Islam Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia*, (Jakarta: LSAF dan Paramadina, 2010), hlm. 156-158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, pemikir lain seperti Alparsalan Acikgenc, menyatakan bahwa Islam progresif adalah Islam yang menawarkan keseimbangan antara *mysterious and the rational aspects of human nature*.²⁶⁶

Islam progresif adalah sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah Saeed yang menguraikan bahwa Islam progresif merupakan salah satu dari sekian banyak aliran pemikiran Islam kontemporer yang berupaya untuk *incorporate the contexts and the needs of modern Muslims* yang pada akhirnya sesungguhnya menuju “*want to act to preserve the vibrancy and variety of the Islamic tradition*.”²⁶⁷ Pandangan dan penjelasan Abdullah Saeed ini, menegaskan prinsip dasar Islam progresif yang menjadi dasar kerangka kerja fiqih Islam progresif, yaitu di satu pihak memahami konteks, tantangan dan kebutuhan hidup umat manusia di era kontemporer sedangkan di lain pihak jawaban atas tantangan tersebut harus didasarkan pada khazanah (*warisan-tradisi*) Islam itu sendiri.

Sedangkan pemikir muslim lain yang kurang setuju tentang terma Islam progresif, seperti Mudzaffar yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap dan dengan labelisasi Islam dengan label *progresif, konservatif* atau *liberal* karena menurutnya label-label seperti ini cenderung membatasi kemampuan seorang pembicara untuk berhubungan dengan audiennya yang disebabkan oleh pembedaan dan penggolongan masyarakat muslim.

²⁶⁶ IDSS, *Progressive Islam and The State in Contemporary Muslim Societies*, Laporan Seminar yang diadakan di Marina Mandarin Singapore tanggal 7-8 Maret 2006, hlm. 6 dan lihat juga Tholhatul Choir dan Ahwan Fanani (ed.), *Islam Progresif dan Ijtihadi Progresif dalam Pandangan Abdullah Saeed* dalam *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 528.

²⁶⁷ Omid Safi, (ed.), “*Introduction*,” dalam *Progressive Muslims: On Justice, Gender, and Pluralisin*, (Oxford: Oneworld, 2003), hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, ketidaksetujuan dari pemikir Islam lainnya Ashgar adalah karena Islam itu secara inheren sudah bersifat progresif, membebaskan dan revolusioner. Oleh karena itu, baginya, lebih baik mengkategorikan Islam secara periodik seperti kajian keislaman di era modern ketimbang berbicara tentang istilah Islam modern dan lain-lain.²⁶⁸

Begitu juga dengan Ashgar dan Syed Farid Alatas menyoal secara kritis penggunaan istilah Islam progresif di atas dengan menyatakan bahwa istilah tersebut tidak perlu karena akan mengindikasikan pula ada Islam yang tidak progresif. Lebih jauh lagi, istilah ini berkonotasi hubungan intim dengan apa yang disebut dengan Islam liberal, mengaca kepada pengalaman cendekiawan-cendekiawan yang ada di Mesir dan Indonesia.²⁶⁹ Meskipun sebagian pemikir muslim tidak setuju dengan penggunaan istilah Islam progresif, tetapi mereka sepakat bahwa dimensi progresif Islam menjadi urgen dan relevan untuk diangkat dan disosialisasikan dalam kehidupan kontemporer, termasuk dalam lapangan fiqh.²⁷⁰

Meskipun sebagian pemikir muslim tidak setuju dengan penggunaan istilah Islam progresif, tetapi mereka sepakat bahwa dimensi progresif Islam menjadi urgen dan relevan untuk diangkat dan disosialisasikan dalam kehidupan kontemporer, termasuk dalam lapangan fiqh Berdasarkan penjelasan panjang lebar tentang Islam yang berdimensi progresif tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan fiqh Islam progresif

²⁶⁸ IDSS, *Progressive Islam and The State...*, hlm. 14-15. Dan lihat juga Tholhatul Choir dan Ahwan Fanani (ed.), *Islam Progresif dan Ijtihad...*, hlm. 529.

²⁶⁹ IDSS, *Progressive Islam and The State...*, hlm. 16. Lihat juga Tholhatul Choir dan Ahwan Fanani (ed.) "*Islam Progresif dan Ijtihad...*", hlm. 529.

²⁷⁰ Tholhatul Choir dan Ahwan Fanani (ed.), *Islam Progresif dan Ijtihad...*, hlm. 529.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

adalah fiqh yang berupaya mengangkat dan mensosialisasikan dimensi dan nilai-nilai keadilan, kesetaraan dan kesamaan nilai-nilai kemanusiaan sebagai nilai-nilai esensial dalam Islam.

1) Kerangka Dasar Pemikiran Fiqh Islam Progresif

Keberadaan fiqh progresif adalah tidak dapat dilepaskan dan erat kaitannya dengan suatu keprihatinan yang berangkat dari penilaian bahwa Islam secara umum dan hukum Islam (fiqh) secara khusus sering kali dituduh dan sekaligus digugat sebagai penyebab munculnya *image* Islam sebagai agama terlalu normatif dan tradisional. Lambannya, kalau tidak malah terhentinya, perkembangan hukum Islam paska fase kodifikasi telah memposisikan ketertinggalan fiqh Islam jauh di belakang perkembangan peradaban manusia secara umum. Isu tertutupnya pintu ijtihad yang sangat mendominasi selama berabad-abad telah benar-benar menjadikan umat Islam bergantung kepada referensi intelektual abad klasik dan pertengahan yang dibarengi oleh ketidakmampuannya berdialog dengan realitas yang senantiasa berkembang.²⁷¹

Wael B. Hallaq, mencoba mendekonstruksi secara kritis dan akademik mengenai tidak matinya tradisi ijtihad di kalangan fuqaha. Wael B. Hallaq memaparkan betapa sebenarnya ijtihad masih bekerja di dalam perkembangan diskursus hukum Islam, tidak tertutupnya pintu ijtihad sebagaimana yang disimpulkan oleh Joseph Schacht.²⁷² Pandangan Wael B. Hallaq Hallaq ini

²⁷¹ Wael B Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usûl al-fiqh*. (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), hlm. 1-36.

²⁷² Wael B. Hallaq, *Was the Gate of Ijtihad Closed?* Dalam *International Journal of Middle East Studies* 16 (1984), hlm. 3-41. Artikel ini adalah bagian dari disertasi Ph.D nya pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikritik dan dibantah oleh Sherman Jackson²⁷³ dan Michel Hoebink²⁷⁴ yang justru membuktikan kebalikannya yaitu bahwa memang secara fakta menunjukkan hampir tidak ada perkembangan yang sama sekali baru setelah fase pembukuan dan pembakuan hukum Islam oleh empat mazhab yang terkenal itu yang disebabkan oleh terbuka lebarnya pintu *taqlid*. Bagi mereka berdua, Wael B. Hallaq Hallaq terlalu berlebihan, karena, meminjam istilah Jackson, "*regime of taqlid*" sudah menjadi fenomena global.²⁷⁵

Atas sanggahan, kritik dan bantahan tersebut di atas, Wael B. Hallaq pun akhirnya secara halus mengakui bahwa secara dominan, hukum Islam memang sudah kehilangan spirit ijtihad. Akan tetapi meskipun demikian di sana-sini masih ada orang yang melakukan ijtihad. Fenomena dominasi dan stagnasi pemikiran keislaman pada umumnya dan hukum Islam khususnya sebagaimana tersebut di atas adalah realita yang tak terbantahkan. Inilah yang mengantarkan Islam pada posisi yang sering kali bertentangan dengan kenyataan dan kebutuhan kehidupan dunia dan masyarakat kontemporer. Hukum (Islam atau fiqh) yang seharusnya, menurut pendekatan sosiologi hukum, bergerak bersama dengan perkembangan masyarakat, tidak berlaku pada hukum Islam.

Washington University tahun 1983. dan Tholhatul Choir dan Ahwan Fanani (ed.), *Islam Progresif dan Ijtihad...*, hlm. 524.

²⁷³ Sherman A. Jackson, *Islamic Law and The State: The Constitutional Jurisprudence of Shihab al-Din al-Qarafi*, (Leiden: E. J. Brill, 1996), hlm. 96. dan Tholhatul Choir dan Ahwan Fanani (ed.), *Islam Progresif dan Ijtihad*, hlm. 524.

²⁷⁴ Michel Hoebink, *Two Half of the Same Truth: Schacht, Hallaq, and the Gate of Ijtihad*, (Amsterdam: Middle East Research Associates, 1994) dan Tholhatul Choir dan Ahwan Fanani (ed.), *Islam Progresif dan Ijtihad*, hlm. 524.

²⁷⁵ Sherman A. Jackson, *Islamic Law*, hlm. 79-96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Piranti kerangka bangunan metodologi yang sebenarnya membuka peluang untuk mendorong pembaruan hukum Islam harus tunduk patuh di bawah dominasi "kesakralan" teks yang diinterpretasi oleh muslim generasi awal dan abad tengah. Oleh karena itu, adalah tepat apa yang disimpulkan bahwa hukum Islam sesungguhnya masih hidup, tetapi piranti metodologis dan landasan epistemologinya telah mati. Inilah yang menjadikan hukum Islam stagnan dan tidak berdaya serta kehilangan daya responsifnya ketika berdialog dengan realitas yang selalu perkembangan dan menuntut perubahan serta penyesuaian.²⁷⁶ Sebagaimana telah dikemukakan dalam paparan di atas bahwa munculnya istilah Islam progresif,²⁷⁷ muslim progresif dan *ijtihad* progresif sebagaimana telah dikemukakan diatas dapat dijelaskan dengan menggunakan pernyataan sebagai berikut:

The Present generation of Muslims, like the many preceding ones, faces the option of reproducing meaning intended for earlier generations or of critically and selectively appropriating traditional understandings to reinterpret the Qur'an as a part of the task of reconstructing society."²⁷⁸

Kajian mendalam tentang dimensi progresif Islam tersebut saat ini mulai marak dilakukan atas dasar suatu kesadaran dan kebutuhan akan dua hal: *pertama* adalah untuk merespons secara kreatif dan positif anggapan

²⁷⁶ Khaleed Abou El-Fadhl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, (Oxford: Oneworld, 2001), hlm. 171.

²⁷⁷ Kemudian pada tanggal 7-8 Maret 2006, *The Institute of Defence and Strategic Studies* (IDSS) telah menyelenggarakan seminar dengan tema "*Progressive Islam and The State in Contemporary Muslim Societies*" di Marina Mandarin Singapore. Narasumber pada seminar tersebut adalah antara lain Ashgar Ali Engineer, Abdullah Saeed, Syed Hussein Alatas, Ibrahim Abu-Rabi, Alparsalan Acikgence Shafi'i Anwar, Julkipli Wadi, Chandra Muzaffar dan Syed Farid Alatas. Latar belakang tema seminar tersebut diangkat adalah berdasarkan akan kebutuhan terhadap kajian dimensi progresif dari kebangkitan umat Islam. Kebangkitan Islam itu sendiri yang biasa ditarik ke belakang sejak abad 19 memiliki karakter *rational and cosmopolitan approach* dalam mengkaji problematika masyarakat Islam.²⁷⁷

²⁷⁸ Farid Esack, *Qur'an, Liberation & Pluralism*, (Oxford: Oneworld, 1997), hlm. 50 dan Tholhatul Choir dan Ahwan Fanani (ed.), *Islam Progresif dan Ijtihad...*, hlm. 526.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negatif dunia global yang menilai bahwa Islam merupakan agama yang senantiasa lamban dalam merespon laju zaman sehingga ada gap yang sangat lebar antara dunia Islam dan dunia Barat; *kedua* adalah adanya kesadaran bahwa salah satu strategi untuk melawan ekstrimisme yang senantiasa dituduhkan pada Islam adalah dengan memberdayakan elemen-elemen dan aspek progresif pada masyarakat muslim dan menjembatani jurang pemisah antara dunia Islam dengan lainnya.²⁷⁹ Dua hal inilah yang menjadi dasar urgensi edukasi dan sosialisasi Islam progresif.²⁸⁰

Oleh karena itu pengembangan dimensi progresif semacam ini, menurut Rasheed akan menawarkan sebuah pendekatan rasional dan moderat dalam mengelola pola hubungan dunia luas. Sementara Desker menawarkan strategi *reliving the progressive spirit of the pioneering Muslims*, Rasheed menawarkan konsep *reimagine Islam as civilizational project that carries a cultural heritage of both progress and reform*.²⁸¹

2) Metodologi fiqh keluarga progresif

Dari latarbelakang fiqh Islam progresif di atas juga mengindikasikan mengenai kerangka metodologinya. Akan tetapi sebelum memaparkan bagaimana kerangka kerja (*theoritical framework*) fiqh Islam progresif ini,

²⁷⁹ Barry Desker, direktur IDSS, dan Zainul Abidin Rasheed, Menteri Luar Negeri Malaysia, sepakat bahwa mengangkat, menggali dan mengembangkan dimensi progresif Islam ini menjadi suatu keharusan. Bagi Desker, dimensi atau aspek progresif Islam ini sekalipun sebenarnya bukan barang baru karena sesungguhnya dalam dunia Islam ada suatu tradisi yang tidak pernah pudar, yaitu apa yang disebutkan dengan istilah *on going drive to reform* yang mentradisi sejak runtuhnya Dinasti Ottoman tahun 1924.

²⁸⁰ IDSS, *Progressive Islam and The State...*, hlm. 2. dan Tholhatul Choir dan Ahwan Fanani (ed.), *Islam Progresif dan Ijtihad...*, hlm. 527.

²⁸¹ IDSS, *Progressive Islam and The State...*, hlm. 2-3. dan Tholhatul Choir dan Ahwan Fanani (ed.), *Islam Progresif dan Ijtihadi...*, hlm. 527.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada baiknya dilihat posisi pemikir muslim progresif dalam tren pemikiran muslim yang ada saat ini.

Di dalam kajian Islam kontemporer sekarang ini setidaknya terdapat enam tren kelompok pemikir muslim yang sedang mengemuka, yaitu:²⁸² 1) *The Legalist-traditionalist*, merupakan aliran pemikiran Islam yang titik tekannya adalah pada hukum-hukum yang dikembangkan dan ditafsirkan oleh para ulama periode pra modern; 2) *The Theological puritans*, aliran pemikiran Islam yang fokus pemikirannya adalah pada dimensi etika dan doktrin Islam; 3) *The Political Islamists*, aliran pemikiran Islam yang kecenderungan pemikirannya adalah pada aspek politik Islam dengan tujuan akhir mendirikan negara Islam; 4) *The Islamist Extremists*, aliran pemikiran Islam yang memiliki kecenderungan menggunakan kekerasan untuk melawan setiap individu dan kelompok yang dianggapnya sebagai lawan baik muslim ataupun non-muslim; 5) *The Secular Muslims*, aliran pemikiran Islam yang beranggapan bahwa agama merupakan urusan pribadi (*private matter*); dan 6) *The Progressive ijtihadists*, yaitu para pemikir muslim modern atau kontemporer yang berupaya menafsir ulang ajaran agama agar bisa menjawab kebutuhan masyarakat modern. Pada kategori yang terakhir inilah posisi muslim progresif.

²⁸² Abdullah Saeed, *Islamic Thought An Introduction*, (London and New York: Routledge, 2006), hlm. 142-150. Tholhatul Choir dan Ahwan Fanani (ed.), *Islam Progresif dan Ijtihadi.*, hlm. 532.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdullah Saeed dalam buku *Islamic Thought*, membahas lebih dalam dengan menyebutkan enam karakteristik yang paling penting yang dimiliki oleh mereka yang mengaku dirinya sebagai muslim progresif, yaitu:²⁸³

1. Mengadopsi pandangan bahwa beberapa bidang hukum Islam tradisional membutuhkan perubahan dan reformasi substansial dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat muslim saat ini;
2. Cenderung mendukung perlunya *fresh ijtihad* (pemikiran yang segar) dan metodologi baru dalam ijtihad untuk menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer;
3. Beberapa di antara mereka juga mengkombinasikan atau mengintegrasikan secara kreatif kesarjanaan Islam tradisional dengan pemikiran dan pendidikan Barat modern;
4. Secara teguh berkeyakinan bahwa dinamika dan perubahan sosial, baik pada ranah intelektual, moral, hukum, ekonomi atau teknologi, harus dapat direfleksikan dalam hukum Islam;
5. Tidak mengikatkan dirinya atau tidak merasa terikat pada dogmatisme atau mazhab hukum dan teologi tertentu dalam pendekatan kajiannya;
6. Lebih meletakkan titik tekan pemikirannya pada keadilan sosial, keadilan gender, HAM dan relasi yang harmonis antara Muslim dan non-Muslim.

Dari penjelasan kriteria di menunjukkan bahwa muslim progresif dituntut penguasaannya pada dasar-dasar Islam dan permasalahan-permasalahan kontemporer untuk kemudian melalui proses berfikir

²⁸³ Abdullah Saeed, *Islamic Thought An Introduction*, hlm. 150-151. Tholhatul Choir dan Ahwan Fanani (ed.), *Islam Progresif dan Ijtihadi.*, hlm. 534.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metodologis menemukan jawabannya. Karena itulah Abdullah Saeed juga menyebutnya dengan *progressive ijtihadist*. Dengan begitu, mereka dituntut untuk melompat jauh melampaui *apologia* yang sering dikumandangkan oleh kaum tradisional ataupun modernis dan juga melampaui batasan-batasan yang dicanangkan oleh kaum *neo-modernis*.²⁸⁴

Asas nilai keadilan, kebaikan dan keindahan adalah nilai-nilai universal Islam yang menjadi jiwa semua ketentuan-ketentuan hukum. Segenap ketentuan dan status hukum Islam tradisional, termasuk dalam bidang hukum keluarga yang tidak berpihak pada keadilan, kebaikan dan keindahan haruslah ditinggalkan untuk kemudian diganti dengan ketentuan dan status hukum yang sesuai dengan prinsip universal Islam dengan menggunakan pendekatan *progressive ijtihadist*. Dengan cara seperti inilah Islam dan hukum Islam akan dapat eksis dan hidup dalam percaturan dunia dan mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer seperti masalah hak-hak asasi manusia, gender, pluralisme dan lain sebagainya.²⁸⁵ Dalam bahasa Omid Safi, apa yang dilakukan oleh muslim progresif adalah

“Is not so much an epistemological rupture from what has come before as a fine-tuning, a polishing, a grooming, an editing, a re-emphasizing of this and a correction of that”.²⁸⁶

Progressive ijtihadists sebagai kerangka kerja fiqih Islam progresif. Kerangka kerja seperti ini tidaklah berkehendak untuk menciptakan sebuah

²⁸⁴ IDSS, *Progressive Islam and The State*, hlm. 15. Tholhatul Choir dan Ahwan Fanani (ed.), *Islam Progresif dan Ijtihad...*, hlm. 535

²⁸⁵ Tholhatul Choir dan Ahwan Fanani (ed.), *Islam Progresif dan Ijtihadi.*, hlm. 535.

²⁸⁶ Omid Safi, (ed.), *Progressive Muslims*, hlm. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama atau ajaran baru melainkan mencoba mereinterpretasi fondasi religius tradisional untuk mengakomodasi kehidupan kontemporer, terutama dalam menjawab isu-isu fiqh muslim masa kini dalam hal perkawinan seperti halnya perjanjian perkawinan.

3) Aplikasi metodologi fiqh keluarga progresif dalam Bidang Perjanjian Perkawinan

Berdasarkan dengan penerapan ijtihad yang dilakukan oleh muslim progresif yang telah diutarakan di atas, Abdullah Saeed mengidentifikasikan paling tidak ada tiga model ijtihad yang menurutnya sangat berpengaruh pada masanya masing-masing sepanjang sejarah hukum Islam, yaitu:

Pertama adalah *text-based ijtihad*, merupakan metode ijtihad yang sering dilakukan oleh fuqahah klasik dan abad tengah serta masih memiliki banyak pengaruh di kalangan pemikir tradisional. Model ijtihad seperti ini teks berkuasa penuh, baik itu Al-Qur'an, hadits ataupun pendapat ulama sebelumnya baik yang berupa *ijama'* ataupun *qiyas*.

Kedua, adalah *eclectic ijtihad*, adalah upaya memilih teks atau pendapat ulama sebelumnya yang paling mendukung pendapat dan posisi yang diyakininya. Dalam hubungan ini yang ada dalam upaya justifikasi bukan pencarian kebenaran.

Ketiga, adalah *context-based ijtihad*, merupakan fenomena baru yang mencoba memahami masalah-masalah hukum dalam konteks sejarah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konteks kekinian. Pada umumnya pendapat akhir nya akan mengacu pada kemaslahatan umum sebagai *maqasid al syari'ah*.²⁸⁷

Dari ketiga model ijihad yang dikemukakan diatas, ijihad model ketiga di atas itulah merupakan pilihan dan alternatif yang dilakukan oleh para *progressive ijihaditsts*. Metodologi yang digunakan pada masa klasik biasanya menggunakan teks al-Qur'an, kemudian memahami apa yang dikatan teks tentang permasalahan tersebut, dan menghubungkan teks itu dengan konteks *sosio historis*,²⁸⁸ *progressive ijihaditsts* mencoba lebih jauh lagi menghubungkan dengan konteks kekinian sehingga tetap *up to date* dan bisa diterapkan.

Oleh karena itu kehadiran fiqh progresif adalah untuk merumuskan seperangkat hukum Islam yang dapat menjadi referensi dasar bagi terciptanya masyarakat berkeadilan yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, meratanya nuansa kerahmatan dan kebijaksanaan, serta terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Dengan demikian, dalam fiqh Islam progresif adalah suatu rumusan baru atas Syari'at Islam yang sesuai dengan kehidupan.

Salah satu contoh persoalan kontemporer yang sedang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini terkait dengan melemahnya dalam mempertahankan ikatan perkawinan atau banyaknya perceraian. Maka diperlukan pengembangan untuk menjaga ikatan perkawinan tersebut yang memiliki sifat sakral dan profan ini dalam bentuk perjanjian perkawinan.

²⁸⁷ Abdullah Saeed, *Islamic Thought An Introduction*, hlm. 55. Tholhatul Choir dan Ahwan Fanani (ed.), *Islam Progresif dan Ijtihadi...*, hlm. 537.

²⁸⁸ Tholhatul Choir dan Ahwan Fanani (ed.), *Islam Progresif dan Ijtihadi ...*, hlm. 537.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa *progressive ijtihadist* sebagai kerangka baru untuk menelaah ulang konsep perjanjian perkawinan sebagai model untuk memperkuat ikatan perkawinan. Kerangka kerja seperti ini tidaklah berkehendak untuk menciptakan ajaran baru melainkan mencoba *mereinterpretasi fondasi religius tradisional* untuk mengakomodasi kehidupan kontemporer, terutama dalam menjawab isu-isu hukum keluarga masa kini.

b) Pembaharuan Perjanjian Perkawinan dalam Legislasi di Indonesia

Sebelum berbicara jauh mengenai model pembaharuan dalam hal perjanjian perkawinan. Terlebih dahulu akan dijelaskan aturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Di Indonesia terdapat 3 (tiga) produk peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka di negara Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan (yang dimaksud disini adalah KUHPerdata).²⁸⁹

²⁸⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan*, hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ahmad Sukardja,²⁹⁰ ketika dilihat dari proses keseluruhan dalam pembahasan UU Perkawinan, serta secara substansi dilihat seluruh pasal-pasal yang termuat dalam UU Perkawinan bisa dikatakan sudah islami. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa alasan diantaranya: (1) Isi UU meletakkan persamaan dan kedudukan manusia didepan hukum (*equal under the law*) dan pemerintahan, (2) Tidak memberatkan masyarakat, (3) Untuk menegakan keadilan, (4) Untuk mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan *kemudharatan*, (5) Prosedur pembentukan melalui musyawarah, (6) Isi UU Perkawinan ini sesuai dengan atau sejalan atau tidak bertentangan secara hakiki dengan syariat Islam.

Penulis berbeda dengan pendapat Ahmad Sukardji, terkait UU Perkawinan yang dianggap kesemuannya pasal-pasal sudah sesuai dengan syariat Islam. Menurut penulis UU Perkawinan masih terpengaruh dengan pemikiran ahli hukum perdata Belanda khususnya materi perjanjian perkawinan. Disinilah letak pentingnya pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia terkait masalah perjanjian perkawinan yang selama ini sudah berjalan dimasyarakat.

Dalam legislasi UU Perkawinan di Indonesia mengenai perjanjian perkawinan tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai makna filosofis dan makna dasar serta bentuk-bentuk perjanjian perkawinan. Serta apabila diamati lebih dalam lagi terdapat perbedaan terkait bentuk-bentuk perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

²⁹⁰ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UU Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan melakukan pembaharuan terhadap konsep perjanjian perkawinan dalam legislasi ini UU Perkawinan dan KHI yang digunakan sebagai pijakan Notaris dan Lemabaga perkawinan maka dapat ditemukan bahwa perjanjian perkawinan dapat digunakan untuk menguatkan ikatan perkawinan serta sebagai penyempurna konsep perjanjian perkawinan yang selama ini sudah berjalan dimasyarakat.

Pembaharuan berasal dari kata ‘baru’ ‘baharu’²⁹¹ yang mendapat penambahan awalan ‘pe’ dan akhiran ‘an’. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pembaharuan adalah (1) yang sebelumnya tidak ada, atau belum pernah dilihat (*diketahui dan didengar*), (2) mula-mula atau pertama-tama dilihat (*didengar dan diketahui*), pada masa (zaman) akhir-akhir ini, modern.²⁹²

Secara sederhana, gerakan pembaharuan (*tajdid, renewal*) dalam Islam dapat diartikan sebagai upaya, baik secara individu maupun kelompok pada kurun dan situasi tertentu, untuk mengadakan perubahan di dalam persepsi dan praktek keislaman yang telah mapan (*established*) kepada pemahaman dan pengamalan baru. Lazimnya, menurut Azyumardi Azra, pembaharuan bertitik tolak dari asumsi pandangan yang jelas dipengaruhi situasi dan lingkungan sosial, bahwa Islam sebagai ralitas dan lingkungan

²⁹¹ Penambahan huruf ‘m’ pada kata ‘pembaharuan’ disebut dengan *alomorf*. *Alomorf* adalah variasi bentuk dari suatu *morfem* disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang dimasukinya. *Morfem* adalah kesatuan yang ikut serta dalam pembentukan kata yang dapat dibedakan artinya. Yang apabila dibentuk dengan awalan ‘me’ akan menjadi ‘mem’, maka secara pasti pembentukan kata bendanya menjadi ‘pem’bia, membina, pembina, baharu, membaharui, pembaharuan, J.S Badudu, *Pelik-Pelik Bahasa Indonesia*, Cet. XXXII, (Bandung: Pustaka Prima, 1985), hlm. 82.

²⁹² W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: P.N Balai Pustaka, Cet. VIII, 1954), hlm. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial tertentu tersebut tidak sesuai atau bahkan menyimpang dari apa yang dipandang sebagai Islam yang sebenarnya. Islam yang lebih sesuai dengan Islam ideal, sesuai dengan cara pandang, pendekatan, latar belakang sosio kultural dan keagamaan individu, dan kelompok pembaharu yang bersangkutan. Karena alasan-alasan inilah, muncul berbagai tipologi gerakan pembaharuan Islam. Misalnya *Puritanisme*, *Neo Sufisme*, *Fundamentalisme*, *Sekularisme* atau *Westernisme*.²⁹³

Berbeda dengan itu, Harun Nasution²⁹⁴ mengatakan bahwa pembaharuan diperlukan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi modern. Memang dalam kenyataannya perkembangan sains dan teknologi modern membahas perubahan nilai, sistem dan sekaligus problema dalam aspek hukum yang sudah tentu memerlukan jawaban dan penyelesaian. Karena dengan jalan pembaharuan inilah tokoh-tokoh Islam modern mengharap akan dapat melepaskan umat Islam dari suasana keterbelakangan untuk selanjutnya dibawah kepada kemajuan.

Berbeda dengan penulisan tersebut, Nurcholis Majid²⁹⁵ menggunakan istilah modernisasi untuk pembaharuan dengan pengertian yang identik, atau hampir identik, dengan pengertian rasionalisasi. Yaitu proses perombakan

²⁹³ Azyumardi Azra, *Akar Akar Historis Pembaharuan Islam di Indonesia Neo-Sufisme Abad Ke 11-12 H, dalam Tasawuf*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, t.t.), hlm. 179.

²⁹⁴ Harun Nasution, mengatakan bahwa pembaharuan adalah pemikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk merubah faham-faham, adat istiadat, institusi-institusi lama dan sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, lihat Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, hlm. 9, juga Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Cet.VI, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 93.

²⁹⁵ Nurcholis Madjid, *Islam Komedernan dan Keindonesiaan*, hlm. 172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pola berfikir dan tata kerja lama yang tidak (rasional), dan menggantinya dengan pola berfikir dan tata kerja baru yang akliah. Kegunaananya untuk memperoleh daya guna dan efisiensi yang maksimal.

Isitilah pembaharuan yang dikaitkan dengan agama Islam sudah merupakan hal biasa yang digunakan para pemikir-pemikir Islam Indonesia, baik pembaharuan pemikiran Islam maupun pembaharuan hukum Islam, seperti yang dijumpai tulisan-tulisan Harun Nasution, Amir Syarifuddin, Ibrahim Hosen, Nurcholis Madjid, dan lain-lain. Selain pembaharuan dalam bahasa Indonesia, juga dapat ditemukan dari berbagai tulisan selain istilah lain sebagai konversi dari makna pembaharuan. Misalnya Harun Nasution dan Fazlurahman memadankannya dengan *modernisation* dalam bahasa Inggris, dan *tajdid* dalam bahasa Arab.²⁹⁶ Berbeda dengan Chandra Muzffar²⁹⁷ yang menggunakan istilah *Reformation* (reformasi) dan *Reserrence* (kebangkitan) sebagai pandangan pembaharuan dalam bahasa Inggris. Dan Abul A'la Maududi²⁹⁸ memadankan makna pembaharuan dengan *innovation* dalam bahasa Inggris, dan *tajdid* dalam bahasa Arab. Khusus dalam kontesk pembicaraan dalam hukum Islam, Munawir Sjadzali²⁹⁹ menggunakan istilah *Reaktualisasi Ajaran Islam*, dan Amir

²⁹⁶ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Cet. VI, hlm. 9-10. Lihat juga Fazlurahman, *Revival and Reform in Islam The Cambridge Histori of Islam*, Jilid 2, (London: Cambridge University Press, 1970), hlm. 632.

²⁹⁷ Chandra Muzaffar, *Kebangkitan Islam: Suatu Pandangan Global*, dalam Harun Nasution dan Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 70-72.

²⁹⁸ Abul A'la Maududi, *A Short History of The Revivalist Movenment in Islam*, terjemahan Hamid L.A Basalamah, *Gerakan Kebangkitan Islam*, (Bandung: Risalah, 1984), hlm. 41.

²⁹⁹ Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (Penyuting), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hlm. 1-11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarifuddin³⁰⁰ menggunakan istilah *Reformulasi Fiqih* (hukum Islam).

Bervariasinya istilah yang digunakan untuk maksud kata pembaharuan tersebut menunjukkan ada perbedaan bentuk bentuk pembaharuan itu sendiri. Seperti terlihat dari penjelasan Azyumardi Azra, lebih menekankan kepada ajaran Islam yang sebenarnya, Islam yang ideal, yang terlepas dari pengaruh situasi dan lingkungan yang lama kepada situasi dan lingkungan yang baru. Sementara itu Harun Nasution lebih menekankan adanya penyesuaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Lain halnya dengan Nurcholis Madjid yang lebih menekankan kepada Rasional ajaran itu sendiri.

Beranjak dari penjelasan diatas dan literatur lain yang ditemukan, maka penulis merumuskan pengertian pembaharuan yang dimaksud dalam disertasi ini adalah usah untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang tidak dikenal sebelumnya, dengan indikasi yang lebih rasional, sehingga lebih berdaya guna dalam memenuhi kebutuha hidup manusia, baik dengan mengkonversi yang lama untuk dapat diaktualkan, ataupun menciptakan yang baru dan belum ada sama sekali.

Dengan demikian pembaharuan hukum Islam yang dimaksud adalah usaha untuk memahami hukum Islam yang ideal, yang sesungguhnya, terlepas dari pengaruh situasi dan lingkungan mujtahid yang melahirkannya. Kemudian berupa dengan sungguh-sungguh untuk melakukan penafsiran ke arah yan lebih fungsional, proposional dan rasional, agar sesuai dengan

³⁰⁰ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran*, hlm. 89-90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuntutan situasi dan kondisi di lingkungan sekarang, baik berupa penafsiran itu bersifat modifikasi dari penafsiran hukum lama yang tidak ada sebelumnya, maupun penemuan baru.

Beberapa konsep atau teori tentang pembaharuan hukum Islam telah dikemukakan diatas. Sedangkan terkait metode atau sistem yang digunakan oleh para sarjana dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam kontemporer, Anderson³⁰¹ mencatat ada empat model diantaranya: (1) melalui aturan yang bersifat prosedur sesuai dengan tuntutan zaman modern (bersifat administratif), yang dalam istilah lain disebut *takhs}i@s} al-qad}a@* atau *siya@sah al-shar'iyah* tetapi substansinya tetap tidak berubah, (2) *Takhayyur* (memilih salah satu dari sekian banyak pandangan ulama mazhab fiqih yang ada, bukan saja dari yang empat atau lima mazhab populer tetapi juga dari mazhab lain termasuk pandangan Ibn Taimiyyah dan Ibn Qasyyim al-Jauziyyah) dan *Talfi@q* (menggabungkan pandangan dari sejumlah mazhab dalam satu masalah tertentu), (3) *Ijtihad*, dengan jalan kembali menginterpretasikan (*reinterpretasi*) teks syariah, dan (4) Menggunakan alternatif, yakni menggunakan aturan administrasi, misalnya dengan memberikan sanksi bagi yang melanggar, tetapi tidak berdasarkan alasan syariah.

Tahir Mahmood berpendapat, pada prinsipnya bentuk (metode) pembaharuan yang digunakan dalam hukum keluarga sama dengan yang

³⁰¹ Seluruh metode pemaharuan ini dibahas Anderson dalam tiga tulisannya, (1) *The Significant of Islamic Law in The World Today*, dalam *The American Journal of Comparative Law*, Vol 9 1960, hlm. 191-195; (2) *Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernization in the Middle East*, dalam *Internasional and Compartive Law Quarterly*, (20 Januari 1991), hlm. 12-15; (3) *Law Reform in The Muslim World*, (London: The Athlone Press, 1976), hlm. 42-77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan pada umumnya pembaharuan yaitu: (1) *Ijtihad*, (2) *Qiyas deduktif*, (3) *Ijma'* ditambah dengan dua teori baru, yakni (1) *Takhayyur*, dan (2) *Talfih*. Khusus pembaharuan hukum perkawinan muncul fenomena: (1) adanya fenomena memperlakukan pandangan semua mazhab pada tingkatan yang sama, dan penekanan pada (2) *istih}sa@n*, (3) *mas}lah}ah mursalah*, (4) *siya@sah al-shar'iyah*, (5) *istidla@l* dan semacamnya.³⁰²

Sedangkan Coulson mengkategorikan pembaharuan hukum Islam menjadi empat bentuk, yaitu: (1) Kodifikasi hukum Islam menjadi hukum perundang-undangan negara yang disebut dengan *siyasah*, (2) tidak terikatnya umat Islam pada satu pandangan mazhab, (3) perkembangan hukum dalam mengantisipasi perkembangan peristiwa hukum yang baru timbul, (4) perubahan hukum yang baru timbul disebut *tajdid* atau *neo ijtihad*.³⁰³

Pendapat Amir Syarifuddin³⁰⁴ mengatakan tentang metode formulasi hukum Islam menjadi (4) empat yaitu: (1) Kebijakan administrasi, sebagaimana yang terjadi di Mesir. Kebijakan ini menurutnya adalah sebagai usaha yang menjembatani fiqh yang tidak akan berubah dengan tuntutan masyarakat yang sudah berbeda dengan tuntutan kekinian, dengan membuat kebijaksanaan administrasi. Misalnya pencatatan perkawinan dan pembatasan usia perkawinan, (2) Aturan tambahan, dalam hal ini aturan ditempuh dengan tanpa mengurangi dan mengubah materi fiqh yang sudah ada. Jadi pertimbangan sosiologis dalam hal ini menonjol. Contohnya seperti masalah

³⁰² Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, hlm. 13.

³⁰³ Noul J. Coulson, *A History of Islamic Law*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), hlm. 182-217. Edisi Indonesia, Hamid Ahmad, (penterjemah), *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 212-252.

³⁰⁴ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran*, hlm. 137-38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waris pengganti, wasiat wajibah menurut istilah hukum waris mesir, (3) menerima cara *talfiq*, misalnya seperti yang terjadi di Turki yang menganut aliran mazhab Hanafi, apabila didalam beberapa hal diarsa tidak adil lagi untuk menjamin kemaslahatan, maka para ahli memasukan pendapat mazhab lain, (4) *Reinterpretasi atau reformulasi*, yaitu mengkaji ulang dalil-dalil kajian fiqh yang dirasa tidak aktual lagi dalam situasi dan kondisi tertentu, kemudian disusun penafsiran dan formulasi baru. Misalnya pelaksanaan poligami yang dahulunya mudah dan saat ini dibatasi atau dipersulit dengan syarat-syarat prosedur yang tidak gampang, bahkan ditentukan pula di Pengadilan Agama.

Esposito³⁰⁵ dalam penelitiannya membandingkan metode pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan di Mesir dan Pakistan, menyimpulkan pada dasarnya kedua negara ini menggunakan metode yang sama, yakni (1) *siya@sah al-shar'iyah*, (2) *Takhayyur*, dan (3) *Talfi@q*. Namun dalam praktiknya ada perbedaan, dimana Pakistan menggunakan ketiga konsep itu lebih bebas. Disamping itu, *takhayyur* yang dipraktikan di Mesir berbeda dengan praktik *takhayyur tradisonal*, yang biasanya hanya memilih salah satu diantara mzhab populer. Adapun *takhayyur* yang digunakan di Mesir adalah mengambil pendapat individu dari seorang ulama.

Pearl menyimpulkan,³⁰⁶ negara-negara muslim menggunakan empat metode dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga, yaitu: (1) *Takhayyur*, (2) *Talfi@q*, (3) *siya@sah al-shar'iyah*, dan (4) Murni memenuhi

³⁰⁵ John L, Esposito, *Women in Muslim*, hlm. 94-99.

³⁰⁶ Pearl, David dan Werner Menski, *Muslim Family Law*, hlm. 21-22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan sosial dan ekonomi tanpa mendsarkan sama sekali terhadap alasan mazhab, yang oleh pemikir lain disebut reinterpretasi terhadap teks nas sesuai dengan tuntutan zaman.

Perubahan hukum yang dilakukan di Negara-negara Muslim mengambil berbagai bentuk sebagai berikut:

- a. *Tahsis al-Qada*, yaitu menerapkan hukum Islam melalui pengadilan dengan cara membatasi syari'ah pada aspek hukum perdata Islam yang menjadi kompetensi peradilan;
- b. *Takhhayyur*, yaitu memilih berbagai pendapat di dalam mazhab-mazhab fiqih tertentu dan tidak memilih pendapat dominan di dalam mazhab arus utama. Nama lain dari takhayyur adalah talfiq, yaitu menggabungkan bagian dari doktrin suatu mazhab dengan bagian dari doktrin mazhab lain;
- c. *Reinterpretasi*, yaitu menafsirkan ulama prinsip syariah terhadap suatu isu. Sebagai contoh, The Tunisian Code of Personal Status 1965 yang menyatakan bahwa perceraian harus di depan pengadilan, dan pengadilan diizinkan untuk mewajibkan suami membayar sejumlah uang sebagai kompensasi jika menurut pengadilan suami mencari-cari alasan untuk bercerai;
- d. *Siyasah Shar'iyah*, yaitu menerapkan kebijakan dan aturan-aturan administratif yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariah;
- e. *Keputusan pengadilan*, di India dan bekas koloni Inggris lainnya misalnya, reformasi hukum Islam dapat dilakukan melalui keputusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadilan. Menurut metode ini pengadilan dapat menggunakan penalaran hakim jika tidak ada hukum yang jelas di dalam nas} al-Qur'an dan as-Sunnah. Hal ini juga dikenal di wilayah Maroko di bawah pengaruh mazhab Maliki bagi otoritas 'amal atau praktek pengadilan dikenal luas oleh para hakim.³⁰⁷

Sfat dan metode reformasi yang digunakan negara-negara muslim dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam di atas secara umum dapat dikelompokkan menjadi:

- a. *Intra-doctrinal reform*, yaitu pembaharuan yang tetap merujuk pada konsep fiqh konvensional, dengan cara 1) *Takhyir* (memilih pandangan salah satu ulama fiqh, terutama ulama di luar mazhab), atau dapat pula disebut dengan *tarjih*, dan 2) *talfiq* (mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama).
- b. *Extra doctrinal reform*, yaitu pembaharuan yang tidak lagi merujuk pada konsep fiqh konvensional, tetapi dengan melakukan reinterpretasi terhadap nass. Adapun cara dan dasar yang digunakan adalah dengan menggunakan *masalah mursalah*, *sadd al-dhari'ah*, *regulatori*, dan *administrasi*.³⁰⁸

Dengan menggunakan metode pembaharuan hukum keluarga Islam seperti, (1) *Takhayyur* (disini memiliki substansi untuk menelaah pendapat para ulama klasik, kontemporer maupun dari sistem perundang-undangan sudah berjalan di Indonesia dan negara-negara muslim), (2) *Talfiq*, (3) *siya@sah*

³⁰⁷ Tahir Mahmoud, *Family Law in The Muslim World*, hlm. 64.

³⁰⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: TazzaFa ACCadeMia, 2010), hlm. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-shar'iyah, (4) *al-mas}lah}ah*, (5) *al-'Urf* praktik perjanjian perkawinan yang selama ini sudah pada masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan (6) Administrasi, dalam artian bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat harus dicatatkan kepada lembaga yang berwenang agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat kepada kedua pasangan ataupun pihak ketiga. Diharapkan konstruksi metode ini dapat digunakan dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam Indonesia khususnya terkait konsep perjanjian perkawinan dalam legislasi di Indonesia dengan tujuan untuk memperkuat ikatan perkawinan dalam bentuk *al-Mi@tha@q al-Ghali@z}a*.

c) Pengembangan Model Perjanjian Perkawinan

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menyebutkan istilah nikah bersyarat ataupun persyaratan dalam perkawinan yang ada adalah istilah Perjanjian Perkawinan (*al-Shru@t} fi@ al-nika@h*). Hal ini tertuang dalam pasal 29 Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974, serta dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, dan 52; pasal 45 dan 46 mengatur tentang *taklik talaq* dengan segala tata caranya, pasal 47, 48, 49, 50, dan 51 mengatur perjanjian dalam hal harta bersama lengkap dengan cara pelaksanaannya, sedangkan pasal 52 mengatur hal lain di luar *taklik talaq* dan harta bersama.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perjanjian Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai isi Perjanjian Perkawinan itu sendiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dan *taklik talaq* tidak termasuk dalam kategori perjanjian perkawinan sebagaimana yang diatur dalam KHI. Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Sementara isi dalam Pasal 139 KUHPerdara disebutkan perjanjian perkawinan berkaitan dengan harta benda perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 139 KUHPerdara calon suami-istri berhak mengadakan penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai kebersamaan harta perkawinan dengan membuat perjanjian perkawinan.

Mengenai bentuk-bentuk perjanjian perkawinan menurut pendapat hukum Islam dapat dikembangkan lebih luas lagi tidak hanya masalah harta semata, selama perjanjian perkawinan yang dibuat manfaat dan tujuan yang *shahih* sehingga mesti dipenuhi berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang artinya:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

*“Orang-orang Islam itu menurut syarat mereka, kecuali apabila berupa syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.”*³⁰⁹

Serta tidak bertentangan dengan syariat yang sudah Allah SWT tetapkan, sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

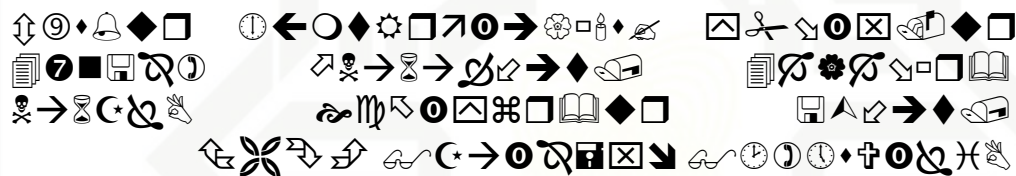
³⁰⁹ Hadits ini diriwayatkan oleh Abi@ ‘Abdullah Muh{ammad bin Isma@il al-Bukha@ri@, al-Ja@mi’ al-S{ah{i}@h, Juz II, hlm. 135. Abi@ Da@wud Sulaiman Ibnu al-ush’ath al-Sijista@ni@ al-uzdi@, Sunan Abi@ Da@wud, Juz IV, hlm. 16, (Hadits No: 3594), Sunan al-Tirmidhi@ Abi I@sa@ Muh{ammad ibnu I@sa@ Ibnu Su@rah, Al-Ja@mi Al-S{ah{i}@h, Sunan al-Tirmidzi@, Juz III, hlm. 626. (Hadits No: 1352), Hadits ini menurut Abu Isa Hasan Shahih. Abi@ Bakr Ahmad Ibnu al-Husain Ibnu Ali@ al-Baihaqi@, Sunan al-Kubra, Juz VIII, hlm. 131 dan 275. (Hadits No: 11429 dan 11929).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ

“Setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah, adalah batal, sekalipun seratus kali syarat.”³¹⁰

Sedangkan menurut Sahrur³¹¹ perjanjian perkawinan (*al-mi@tha@q al-zauji@yah*), merupakan implimentasi dari konsep surah An Nisa ayat 21:



“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.

³¹²(An-Nisa: 20-21)

Sehingga *al-Mi@tha@q al-Ghali@z}a* yang diambil oleh kedua belah pihak suami istri tersebut adalah janji kepada Allah untuk menunaikannya, dan ia telah membingkai 98% dalam kehidupannya bersama diantara kedua suami

³¹⁰ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Nasa@i Ah}mad Ibnu Ali@@ Ibnu Shu'aib, *Sunan Al-Nasa@i@*, Juz VI, hlm. 476. (Hadits No: 3451) dan Abi@ Abdulla@h Muh}ammad Ibnu Yazid al-Qazawi@ni@, *Sunan Ibnu Ma@jah*, Juz VI, hlm. 145. (Hadits No: 2521). Abi@ Bakr Ahmad Ibnu al-Husain Ibnu Ali@ al-Baihaqi@, *Sunan al-Kubra*, Juz VII, hlm. 213-214. Abi@ Qa@sim Sulaima@n Ibnu Ah}mad Ibnu Ayu@b li al-Khami@ al- T}a@bra@ni@, *al-Mu'jam Syagi@r al- T}abra@ni@*, Juz I, hlm. 177. Dia menyebutkan bahwa dia tidak meriwayatkannya dari Shu'bah, tapi dari Ibnu Abi Sirri dia juga meriwayatkannya di dalam Abi@ Qa@sim Sulaima@n Ibnu Ah}mad al- T}a@bra@ni@, *al-Mu'jam al-Kabi@r*, Jilid XI, hlm. 11. (Hadits No. 10869), dan Zawa@id Bazzar Jilid I hlm. 111. Dia juga mengatakan bahwa Bazzar meriwayatkannya dengan sanad yang berbeda-beda salah satu diantaranya adalah perawi thiqah. Riwayat Bazzar adalah mursal yang berasal dari para perawi hadits shahih.

³¹¹ Muhammad Shahrur, *Nahw Usul Jadidah*, hlm. 309

³¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri, dan mengandung aspek-aspek kemanusiaan dan kemasyarakatan selama menempuh kehidupan bersama.

Menurut Shahrur *al-mi@tha@q al-zauji@yahoo* tersebut berangkali dapat disusun dalam item-item berikut:³¹³ 1) Suami istri (kedua belah pihak pasangan) berjanji untuk jujur satu sama lain dan tidak saling membohongi, 2) Suami istri (kedua belah pihak pasangan) berjanji untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji (mengkhianati perkawinan), 3) Suami istri (kedua belah pihak pasangan) berjanji untuk saling menjaga kesehatan dan harta lainnya, dan tetap bersabar dalam keadaan lapang, sempit, sehat dan sakit, 4) Suami istri (kedua belah pihak pasangan) berjanji untuk menjaga dan mendidik anak-anak dengan baik. 5) Suami istri (kedua belah pihak pasangan) berjanji untuk saling menjaga privasi yang lainnya, dan tidak meyebarluaskan privasi tersebut kepada orang lain.

Demikian Point-point diatas penting dari *al-Mi@tha@q al-Ghali@z}a*, dimana kedua belah pihak wajib menepatinya dan keduanya sah menjadi suami istri. Item-item tersebut tidak mungkin dituliskan dalam materi-materi '*aqad*. Oleh karenanya, kealpaan salah satu pihak untuk menunaikannya, baik seluruh atau sebagian darinya, mengakibatkan tuntutan perceraian, karena telah melanggar dan melalaikan perjanjian kepada Allah SWT.

Sedangkan dalam perundang-undangan di negara-negara muslim perjanjian perkawinan diatur sedemikian rupa, seperti praktiknya di negara

³¹³ Ibid, hlm.310.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mesir dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan perjanjian saling menguntungkan antara kedua pihak untuk mengadakan pernikahan tanpa ada pembatasan atau pengekan salah satu pihak untuk membatalkan perjanjian tersebut. Namun demikian, jika perjanjian itu batal dan merugikan pihak lain baik secara moril ataupun material, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan perkara ke pengadilan atas kerugian tersebut.³¹⁴

Dalam hukum perkawinan Iran Tahun 1967 pasal 4 dijelaskan pasangan yang beniat untuk melaksanakan perkawinan boleh membuat perjanjian dalam akad perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan. Perjajian tersebut dilaksanakan dibawah perlindungan pengadilan.³¹⁵ Disamping itu, taklik talaq pada dasarnya juga merupakan perjanjian perkawinan yang terutama bertujuan untuk melindungi hak-hak istri supaya tidak diabaikan oleh suami, termasuk perjanjian untuk tidak dipoligami oleh suami.

Dalam pandangan perundang-undangan Turki tentang hak-hak keluarga tahun 1917 pasal 38, misalnya, dinyatakan bahwa seorang iteri berhak mencantumkan dalam taklik talaq bahwa poligami suami dapat menjadi alasan perceraian. Begitu juga di maroko, dalam akad mencantumkan dalam tak'lik talaq bahwa poligami suami dapat menjadi alasan perceraian.³¹⁶ Begitu pula di Maroko, dalam akad nikah, mempelai perempuan dapat mengajukan syarat untuk tidak dipoligami, apabila sayarat ini dilanggar,

³¹⁴ Dawoud Sudqi El-Alami, *The Marriage Contract in*, hlm.16.

³¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*, hlm. 492-493.

³¹⁶ Khairuddin Nasution, *Status Wanita Di Asia*, hlm. 245.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka istri berhak untuk mengajukan perceraian ke pengadilan.³¹⁷

Sedangkan perjanjian perkawinan dalam hukum adat di Indonesia yang sudah berjalan selama ini terdapat di beberapa wilayah yaitu: adat Lampung, adat Bali, dan adat Dayak Ngaju. Praktik perjanjian perkawinan yang dibuat oleh masyarakat adat yang ada di Indonesia ini sangat luas bentuk perjanjian perkawinannya. Esensi yang dibangun dengan perjanjian perkawinan ini bertujuan untuk memperkuat ikatan perkawinan dari pasangan, ikatan kekeluargaan, ikatan masyarakat adat dan melegitimasi perkawinan. Disinilah perlu dikembangkan tentang bentuk-bentuk perjanjian perkawinan, yang bertujuan untuk memperkuat aturan perjanjian perkawinan dalam UU Perkawinan dan KHI yang sudah ada selama ini. Serta memberikan kebebasan pada pasangan dalam menentukan materi perjanjian perkawinan, seperti dalam prinsip *al-Musawah*, *al-Adalah*, *al-Hurriyah* dan *al-Rahmah*³¹⁸ serta materi yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan prinsip dasar shari'ah Islam serta memelihara lima unsur pokok keluarga (*al-Kulliyat al-Khams fi al-Usrah*) dalam memelihara mahligai ikatan perkawinan.

d) Esensi Perjanjian Perkawinan Dalam Menuju Keluarga *Saki@nah*, *Mawaddah*, dan *Rah}mah* di Indonesia

Esensi perjanjian perkawinan sebenarnya untuk memujudkan keluarga *saki@nah*, *mawaddah*, dan *rah}mah*, memperkuat ikatan sakral dan profan dalam perkawinan, memperkuat pondasi dan bangunan keluarga, serta

³¹⁷ M. Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga*, hlm. 110.

³¹⁸ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN Press, 2007), hlm. 83-108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertegas pola relasi dan interaksi dalam berkeluarga dll. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga *saki@nah, mawaddah, dan rah}mah* (SAMAWA).

Keluarga merupakan titik dasar dalam membangun peradaban yang baik di masyarakat, oleh karena itu Islam memberikan perhatian tersendiri mengenai keluarga yang bingkai dalam ikatan perkawinan. Untuk membangun dan mewujudkan keluarga *saki@nah, mawaddah, dan rah}mah* ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam membina keluarga: bermitra dalam berhubungan, musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, *mahabbah* (kecintaan), *al-adalah* (keadilan), dan *al-ma'ruf* (mempergauli dengan baik). Prinsip-prinsip ini dibingkai dengan membuat sebuah komitmen dalam perjanjian perkawinan, agar salah satu pasangan tidak ada yang merasa dirugikan diantaranya:

1. *Al-Karamat al-Insaniyah* (Pemuliaan Manusia)

Manusia yang menjalin keluarga adalah manusia-manusia yang diciptakan Allah yang mengemban amanah sebagai *khalifah fi@ al-ard*. Baik itu suami atau istri, keduanya adalah manusia yang diberikan tanggungjawab sebagai pewaris bumi dan harus menjaganya. Laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehormatan dan derajat yang mulia sebagai manusia. Seperti dalam

Q.S An-Nisa: 1:



“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.³¹⁹ (Q.S An-Nisa: 1)

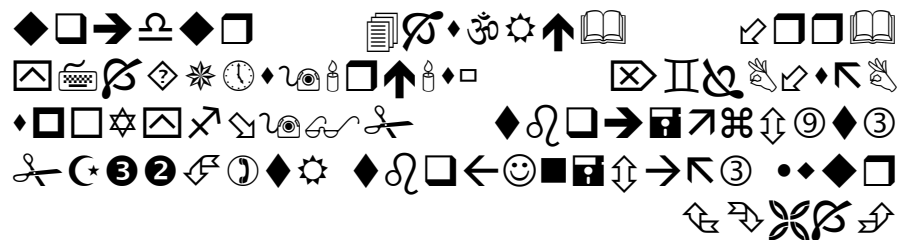
Di dalam ayat ini jelas, asal usul laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu *min nafsin wahidah*. Ada juga ayat yang menegaskan persamaan kewajiban dan balasan etik yang sama baik bagi laki-laki dan perempuan. Al-Qur’an menyebutkan dalam Q.S An-Nisa: 124:



³¹⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah*, hlm. 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”.³²⁰ (Q.S An Nisa: 124)

Disamping itu, hak hukum bagi laki-laki dan perempuan dijamin keberadaannya oleh Islam. Hak tersebut meliputi hak membeli dan menjual, hak mengelolah harta, hak mendapatkan waris dan hak mendapatkan kompensasi. Seperti dalam Q.S An-Nisa: 4.



“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.³²¹ (Q.S An-Nisa: 4)

Berdasarkan hal diatas, suami dan istri dalam keluarga juga memiliki posisi yang sama untuk dimuliakan. Sama-sama sebagai manusia

³²⁰ Ibid, hlm. 142.

³²¹ Ibid, hlm. 115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang harus memuliakan dan dimuliakan, tidak lebih dan tidak kurang.

2. Bermitra

Bermitra dan saling melengkapi merupakan prinsip penting dalam keluarga *saki@nah, mawaddah, dan rah}mah*, karena semua pasangan harus saling melengkapi dan saling membutuhkan yang mensyaratkan hubungan mitra sejajar. Tidak ada pihak yang lebih penting dari yang lain, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain dan tidak ada yang lebih berkuasa dari yang lain. Karena Islam telah memberikan hak dan kewajiban bagi masing-masing anggota keluarga secara tepat dan manusiawi. Apabila hal tersebut ditepati, akan mengentarkan kepada mereka kebaikan didunia maupun diakhirat.³²²

Untuk mewujudkan ketenangan dan ketentraman dibuthkan saling pengertian, tidak boleh ada penindasan dan untuk itu memerlukan kesejajaran untuk memandang sesama pasangan sebagai sama-sama mahkhluq Allah yang menghormati. Prinsip saling membutuhkan hanya dapat terpenuhi bila masing-masing saling menghormati satu sama lain, saling menerima dan memberi, saling nasehat menasehati dan saling sabar dalam mengurangi berbagai cobaan dengan cara bermintra.

3. Musyawarah

³²² Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami: Tatanan dan Peranannya dalam Kehidpuna Masyarakat*, Cet IV, (Surakarta: Era Intermedia, 2004), hlm. 39-40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap persoalan yang muncul dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan secara bersama, berdiskusi, dan tidak saling memaksakan kehendak. Masing-masing pasangan harus terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangan. Seperti dalam Q.S al-Imran; 159:



“.....dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.....”³²³ (Q.S Al-Imran: 159)

Adapun manfaat musyawarah jika dibiasakan dalam rumah tangga:

- a. Masalah dapat segera terpecahkan. Dengan musyawarah kita akan mendapatkan beberapa jalan alternatif dalam menyelesaikan masalah menyangkut untuk kemaslahatan bersama;
- b. Keputusan diambil memiliki nilai keadilan. Musyawarah adalah proses dengar dari berbagai pendapat, yang nantinya akan diambil atas kesepakatan bersama. Keputusan bersama tentu akan sangat jauh dari unsur keterpaksaan, sehingga setiap orang dapat menunaikan tugasnya masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama;
- c. Menciptakan stabilitas emosi. Dalam musyawarah kita akan menemukan perbedaan pendapat dari yang kita sampaikan. Di sinilah kita melatih menahan emosi dan menghargai pendapat orang lain;

³²³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melatih anggota keluarga menyampaikan pendapat. Ini yang tak kalah penting. Dari rumah, anak sudah dibiasakan menyampaikan pendapat, apalagi suatu perkara kebenaran. Betapa banyak anak yang sangat cerdas dalam menyusun uneg-unegnya dan menjawab soal-soal dalam bentuk tulisan, tetapi sangat gagap ketika harus menyampaikannya kepada orang lain;
- e. Program anggota keluarga lebih terkontrol;
- f. Adanya kebersamaan. Salah satu manfaat musyawarah adalah terkumpulnya anggota keluarga sehingga akan saling mempererat kehangatan antara sesama keluarga;
- g. Dapat menyatukan perbedaan pendapat. Dalam musyawarah akan ditemukan perbedaan pendapat. Kadang mengambil satu tapi kadang saling meramu antara-antara berbagai pendapat, sehingga menjadi kesepakatan. Inilah salah satu indahnya musyawarah.

Mungkin masih banyak lagi manfaat-manfaat musyawarah yang tidak diketahui admin di sini. Pastinya tidak akan rugi orang yang istikharah dan tidak akan menyesal orang yang musyawarah.

4. *Mahabbah* (cinta)

Untuk menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga diperlukan kecintaan antara pasangan, karena setiap anggota keluarga memiliki kewajiban dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang penuh cinta, kasih sayang dan ketentraman baik fisik maupun rohani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

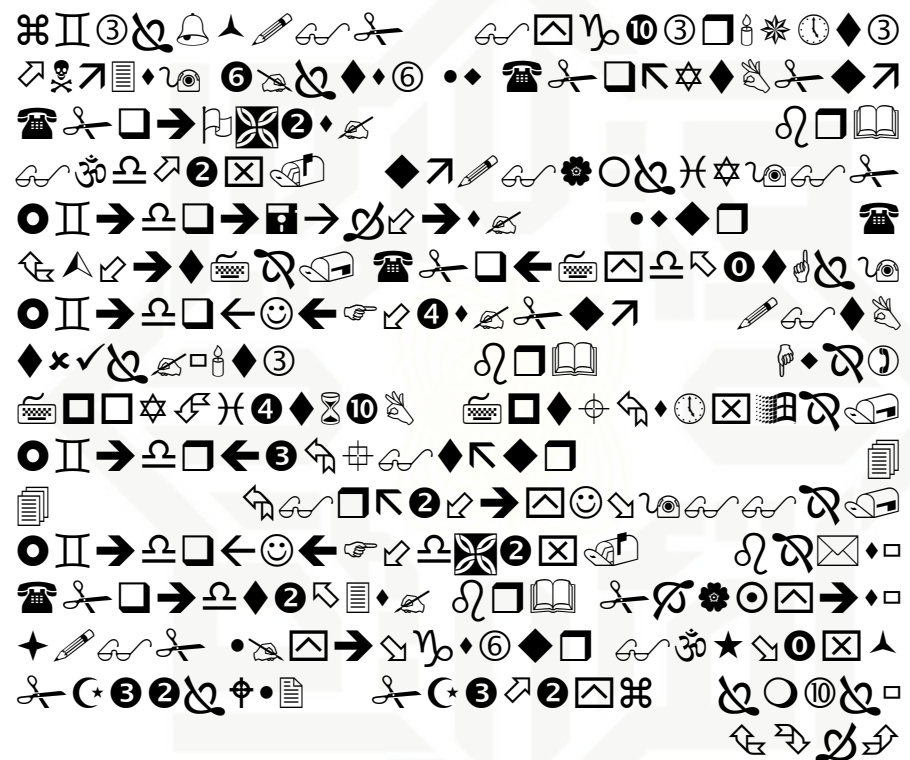
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Tidak adanya Kekerasan

Tidak adanya kekerasan fisik dan psikis diperlukan agar masing-masing pasangan bisa mengembangkan potensinya untuk mencapai ideal dan cita-cita pernikahan, dengan tidak menihilkan pasangan.

Hal ini dijelaskan dalam Q.S An-Nisa: 19:



“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.³²⁴
(Q.S. An-Nisa: 19)

³²⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

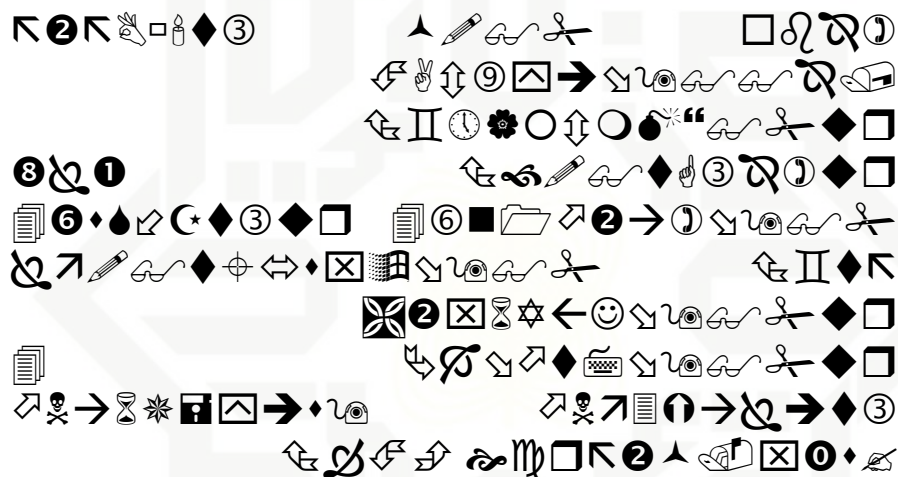
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. *Al-Adalah* (Keadilan)

Setiap pasangan atau anggota keluarga harus berbuat adil terhadap pasangannya. Hanya dengan keadilanlah keluarga bisa mendapatkan kesempatan mengembangkan diri tanpa harus memandang dan membedakan identitas gender atau jenis kelamin, karena Islam memerintahkan untuk berbuat adil, seperti dalam Q.S An-Nahl: 90:



“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.³²⁵
(Q.S An-Nahl: 90)

7. *Al-Ma'ruf*

Mempergauli pasangan dengan cara yang baik dan lemah lembut, diantara caranya adalah menyadari bahwa di dalam keluarga ada hak-hak masing-masing anggota keluarga yang harus ditunaikan: masing-masing harus menjaga perkataan agar tidak melukai

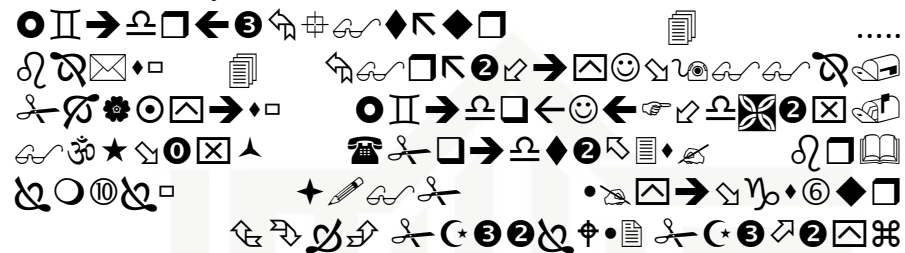
³²⁵ Ibid, hlm. 415

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggotanya, dan lain-lain. Sedangkan keluar ada hak bertetangga dan ada bagian-bagian dari peran kemasyarakatan yang masing-masing anggota berhak melakukannya.

Al-Qur'an menyebutkan dalam Q.S An-Nisa: 19:



“.....Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.³²⁶ (Q.S. An-Nisa: 19)

b. Perjanjian perkawinan Sebagai Ikatan Sakral dan Profan

Perbuatan hukum yang akan dilewati manusia salah satunya adalah perkawinan. Sesuai dengan kodratnya manusia (*Sunnatullah*) mempunyai naluri untuk tetap mempertahankan keturunannya. Dalam hal ini tentunya hal yang tepat untuk mewujudkannya adalah dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu cara untuk membentuk keluarga, karena perkawinan ini mutlak diperlukan sebagai syarat terbentuknya sebuah keluarga.

Oleh karena itu dalam Islam, perkawinan merupakan perjanjian yang kuat yang dibuat atas nama Allah. Oleh karena itu hidup suami istri bukanlah semata-mata sebuah ikatan yang berdasarkan perjanjian berdimensi

³²⁶ Ibid, hlm. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemanusiaan.³²⁷ Atas dasar itulah pernikahan jika dilihat dari sisi perjanjian dengan Allah merupakan perjanjian yang sakral (*al-Mi@tha@q al-Ghali@z}a*) dan jika dipandang dari sisi perjanjian antara seseorang laki-laki dan perempuan perkawinan dinamakan perjanjian profan yang melahirkan hak dan kewajiban.

Oleh karena itu, pasangan yang menikah disatukan dalam perjanjian yang kokoh dengan akad nikah (*al-Mi@tha@q al-Ghali@z}a*), yaitu persetujuan yang meresap ke dalam jiwa. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa: 21):

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.³²⁸ (Q.S. An-Nisa: 21)

Perjanjian yang kuat menjadi inti dari permulaan perkawinan. Sebab Islam menyadari bahwa menjalin kehidupan keluarga tidaklah selalu mulus dan lurus, ada banyak hambatan yang merintanginya. Setiap keluarga memiliki persoalan dan kadar kualitas dan kuantitas yang berbeda-beda. Di saat yang lain, setiap orang ingin meraih kebahagiaan, baik pribadi, masyarakat, maupun keluarga.

³²⁷ Rusli M. Amin, *Rumahku Surgaku: Sukses Membangun Keluarga Islami*, (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2003), hlm. 24.

³²⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

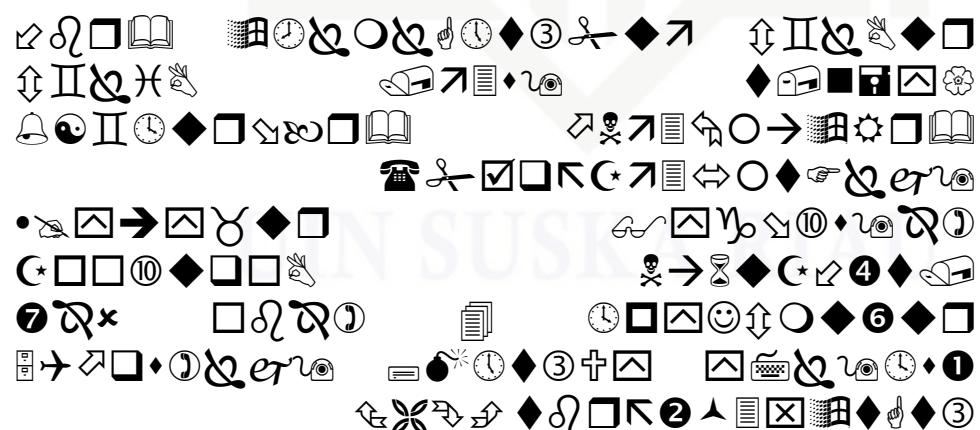
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk itu Islam memandang perkawinan memiliki nilai ibadah. Meski begitu, pernikahan dalam Islam juga dipandang tidak semata-mata sebagai murni ibadah, tetapi terdapat juga unsur sosialnya, karena perkawinan berarti mempertemukan satu keluarga dengan keluarga lain: dan berhubungan dengan masyarakat. Salah satu dimensi sosial masyarakat adalah tercermin dari upaya Islam untuk menjadikan perkawinan diketahui publik, bukan semata-mata diketahui hanya kedua belah pihak.

Dari uraian diatas jelas bahwa, perkawinan disatu sisi merupakan perjanjian yang melibatkan Allah SWT karena bernilai ibadah dan menjadi ikatan yang sakral. Sedangkan disisi lain, perkawinan juga menjadi perjanjian yang profan yang melibatkan antara manusia (antara seseorang laki-laki dan perempuan).

c. Perjanjian perkawinan sebagai Pondasi dan bangunan keluarga

Pondasi ideal dan cita pernikahan dalam Islam sebagaimana yang ada dalam Q.S Ar-Rum: 21:



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³²⁹ (Q.S Ar-Rum: 21)

Dalam ayat ini tersirat tentang kata *mawaddah dan rah}mah*, hal ini merupakan suatu petunjuk untuk mencapai tujuan keluarga sakinah. Tuhan menjadikan hubungan kejiwaan antara suami dan istri sangat kuat yang terkadang melebihi hubungan mereka dengan orang-orang yang paling dekat yakni orang tuanya.³³⁰

Kandungan ayat ini menggambarkan bahwa pernikahan dalam Islam idealnya melahirkan jalinan ketentraman (*saki@nah*), rasa kasih sayang sebagai suatu ketenangan yang dibutuhkan oleh masing-masing pasangan. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam diharapkan dapat terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.³³¹ Perjanjian perkawinan disinilah sebagai perencanaan awal untuk menciptakan keluarga samawa.

d. Perjanjian Perkawinan Dapat Memperkokoh Relasi dan Iteraksi dalam Perkawinan

Untuk mewujudkan perkawinan yang samawa (*saki@nah, mawaddah, dan rah}mah*), diperlukan peran aktif dan rasa tanggungjawab antara sumai dan istri. Dengan begitu tanggungjawab dalam keluarga ini diperlukan prinsip-prinsip musyawarah dan keterbukaan. Salah satu prinsip yang paling fundamental adalah masing-masing anggota keluarga memiliki akhlak

³²⁹ ibid, hlm. 644.

³³⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'annul Majid An-Nur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 3170.

³³¹ Yusdani dan Muntoha, *Keluarga Mas}lah}ah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII dan Komunitas Indonesia yang adil dan Setara-KIAS FP yogyakarta, 2013), hlm. 13-14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang senantiasa dijadikan pedoman dalam berelasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga.

Dinamika dalam mewujudkan prinsip-prinsip keluarga SAMAWA adalah bagian dari persoalan yang terus menerus ada dalam setiap keluarga. Dinamika ini dapat dijadikan bagian yang berguna, tetapi juga dapat menimbulkan malapetaka jika kedua pasangan tidak berhasil menyelesaikan persoalan-persoalan yang diperselisihkan. Ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang suami dan istri dalam membangun relasi dan interaksi dalam perkawinan.

1. Memiliki kedewasaan dan kearifan

Kedewasaan atau kematangan dalam berfikir, bertindak dan bersikap diperlukan dalam berkeluarga. Dengan begitu, persoalan kedewasaan bukan hanya umur, tetapi menyangkut kematangan sikap. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan yang cukup tentang kehidupan terutama kehidupan rumah tangga. Karena dalam keluarga sering muncul berbagai masalah yang ringan, sedang maupun yang berat.

2. Sehat akal dan batinnya

Pasangan suami istri harus memiliki fikiran yang sehat dan dewasa karena apabila telah berumah tangga, seseorang suami dan istri harus memikirkan dan berbuat yang terbaik dalam membangun keperluan rumah tangganya, baik secara lahiriah maupun batiniah.

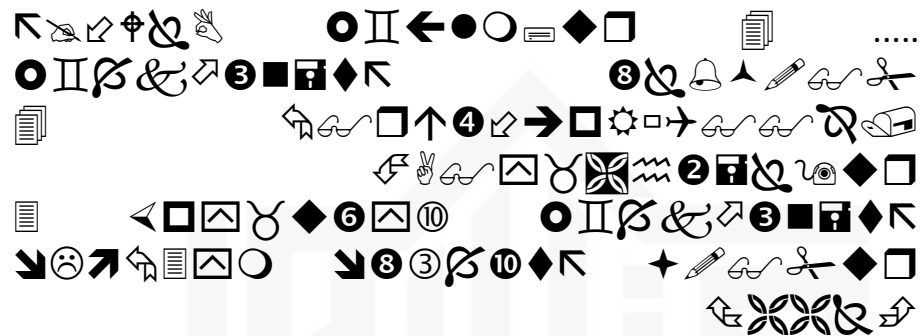
3. Saling menghormati hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suami dan istri harus saling menghormati hak masing-masing untuk mengarungi keluarga, dengan cara tidak memaksakan kehendaknya.

Seperti dalam Q.S Al-Baqarah: 228:



“..... dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.³³² (Q.S Al-Baqarah: 228)

Perkataan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Seperti halnya pria mempunyai hak untuk rujuk kepada istri yang diceraiakannya, istri pun mempunyai hak untuk diperlukan secara ma'ruf, yakni sesuai dengan tuntutan agama, sejalan dengan akal sehat, serta sesuai dengan sikap orang yang berbudi.³³³ Ayat ini secara tegas menyatakan adanya hak yang harus dilindungi. Di antara hak-hak masing-masing yang harus diperhatikan: hak untuk diperlakukan baik, dimuliakan, memperoleh kualitas hidup yang baik, dihormati dll.

4. *At-Ta'awun* (kerjasama)

³³² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 55.

³³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir AL-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 490.

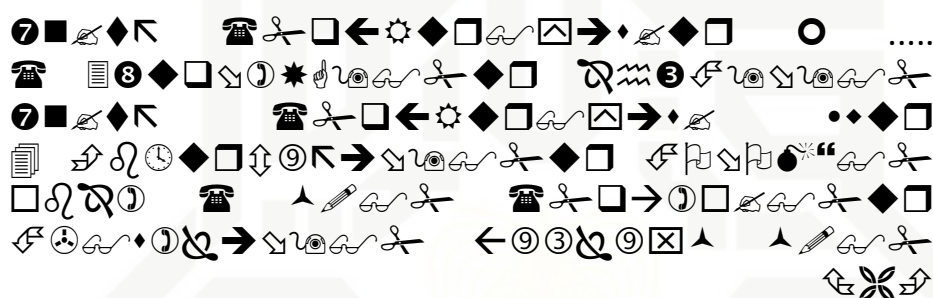
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam membangun keluarga yang samawa, diperlukan kerjasama antara suami dan istri. Ini didasarkan atas latarbelakang dari pasangan yang berbeda, baik dari segi budaya, pendidikan, usia dll. Semetara keluarga harus dijalankan bersama-sama, sehingga harus ada kerjasama. Tentu kerjasama yang dimaksud disini untuk kebaikan bukan kejahatan. Seprti dalam Q.S Al-Maidah: 2.



“.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya ”.³³⁴(QS. Al-Maidah: 2)

5. Setia

Sikap saling percaya diperlukan agar tidak menimbulkan curiga dan percekcoakan yang tidak dapat didiamkan. Setia adalah bukti keikhlasan dan cinta sejati. Pasangan dalam keluarga harus selalu ikhlas menjaga perasaan untuk tidak memberikan cintanya kepada orang lain. Disamping itu, bukti setia juga tidak membebani salah satu pasangan dengan tuntutan yang tidak dapat dilakukan.

6. Menjaga kehormatan keluarga

³³⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saling menjaga kehormatan keluarga diperlukan, agar keluarga yang dibangun tidak berantakan akibat salah satu diantara anggota keluarga ada yang mengumbar kemungkaran. Diantara caranya menjaga ucapan dan perbuatan. Misalnya masing-masing tidak mengumbar aib keluarga kepada khalayak yang berarti menjatuhkan martabat keluarga. Kedua belah pihak harus dapat menutupi aib atau kelemahan masing-masing pasangan.

7. Menjadi Teladan

Pasangan suami istri harus berperan menjadi teladan dalam keluarga. Adapun peran sebagai seorang ayah dan ibu adalah menjadi teladan bagi anak-anak dan keluarganya. Karenannya, memberikan teladan sangat penting bagi seorang ayah dan ibu. Harus diakui, bahwa merosotnya moral generasi muda saat ini, tidak lepas dari perantara kedua orang tua. Namun sayangnya ternyata orang tua seringkali lalai dalam membimbing mereka dengan akhlak yang baik dalam pelakuan dan tindakannya sehari-hari.³³⁵

8. Bertingkah Laku yang *Ma'ruf*

Agama Islam berpandangan rumah tangga sebagai tempat ketenangan, keamanan, dan kesejahteraan. Islam juga memandang hubungan dan jalinan suami-istri dengan mensifatinya sebagai hubungan cinta, kasih dan sayang, dan menegaskan unsur ini di atas pilihan dan kemauan mutlak agar semuanya dapat berjalan dengan

³³⁵ Ahmad Sofyan, *The Best Husband in Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2006), hlm. 29.

sambut menyambut dan saling sayang menyayangi. Kewajiban harus selalu diperhatikan oleh suami istri adalah menjaga kemuliaan pasangan dari hal-hal yang menyebabkan keharmonisannya dihina atau hal-hal yang merendahkan martabatnya sebagai manusia. Adapun perilaku yang baik dalam menjaga keharmonisan keluarga diantaranya”

- a. Memberikan rezki yang halal *thayyiba*;
- b. Menasehati pasangan dengan cara yang baik;
- c. Memperbaiki kualitas keluarga;
- d. Membimbing keluarga untuk mengamalkan Agama dan ahlak;
- e. Tidak membuka rahasia dan aib keluarga;
- f. Tidak saling menyakiti dan;
- g. Berkepala dingin dalam menyelesaikan masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.